

No. 4/1992: Akselerasi Modernisasi Kedua

- DJISMAN S. SIMANDJUNTAK, Akselerasi Modernisasi Kedua
- ANWAR NASUTION, Peranan Teknologi dalam Akselerasi Modernisasi Pembangunan Nasional
- PRIJONO TJIPTOHERIJANTO, Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam PJPT II
- HADI SOESASTRO, Pembangunan Ekonomi Timor Timur: Tantangan Bagi Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Penduduk
- SUDARSONO HARDJOSOEKARTO, Perubahan Struktural dan Kebijakan Koperasi
- TRI PRANADJI, Gejala Birokrasi, Kekuasaan dan Mobilitas Kelas: Kasus pada Masyarakat Jawa dan Sumatera Timur di Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX

Dokumen:

- SUDIBYO, YOYOK ARIESSUSANTO & F. ANDREA, Ringkasan Peristiwa ASEAN

No. 5/1992: Perubahan Hubungan Eksternal dan Paradigma Pembangunan

- EDY PRASETYONO, Kerja Sama Keamanan Asia-Pasifik: Pemikiran dan Masalah-masalah yang Dihadapi
- JUSUF WANANDI, Kerja Sama Keamanan Indonesia-Australia
- BANTARTO BANDORO, Hubungan Indonesia-Korea: Mencari Kerangka Baru Kerja Sama
- J. SUPRANTO, Perkembangan Ekspor Indonesia Menuju Pasar Global
- SUKARDI RINAKIT, Citra Kanada dalam Koran Indonesia: Antara Konflik Domestik dan Donatur
- H.W. ARNDT, Usaha Pencarian Suatu Paradigma Baru Pembangunan

No. 6/1992: Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

- EMIL SALIM, Kesinambungan dengan Pembaruan
- OTTO SOEMARWOTO, Dari Stockholm ke Rio: Implikasinya Bagi Pembangunan Nasional
- I NYOMAN S. NUITJA, Ekologi Kelautan: Suatu Tantangan Besar Negara Bahari
- M. BLANTRAN DE ROZARI, Perubahan Iklim dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan
- DJ. A. SIMARMATA, Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Pencemaran Lingkungan
- HADI SOESASTRO, Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Pasifik Barat Hingga Tahun 2010 dan Implikasinya Bagi Permintaan Energi

Dokumen:

- SUDIBYO, YOYOK ARIESSUSANTO & F. ANDREA, Ringkasan Peristiwa ASEAN

ANALISIS CSIS

Integrasi Ekonomi Internasional, Regional dan Nasional

- Integrasi Ekonomi Internasional, Regional, dan Nasional
- Aspek-aspek Internal dan Eksternal Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN
- ASEAN: Arah Perkembangan Masa Depan
- Wawasan Bisnis Keturunan Cina ASEAN
- Kebijaksanaan Teknologi untuk Pembangunan Ekonomi: Dapatkah Jepang Ditiru?
- Profil PMA dan PMDN: Alokasinya Menurut Provinsi dan Sektor Serta Negara Asal PMA
- Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN



Analisis CSIS

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis masing-masing.

Logo CSIS



Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: *Nalar Ajar Terusan Budi*. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka beralaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelanjanan gambar orang di tengah piringan melambangkan keterbukaan budi -- tiadanya sikap *a priori* -- pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Kalimat *Nalar Ajar Terusan Budi* yang tertera pada lingkaran piringan adalah *surya sengkala*: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus menge-mukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. *Nalar* menurut tradisi Jawa itu berwatak 1, *Ajar* berwatak 7, *Terusan* berwatak 9, dan *Budi* berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. *Nalar Ajar Terusan Budi* juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya menganalisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna *Nalar Ajar Terusan Budi* adalah bahwa bagi CSIS, bernalar, belajar serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo ini dituangkan dalam wujud piringan perunggu oleh G. Sidharta.

Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab

Rufinus Lahir

Dewan Redaksi

Daoed Joesoef, A.M.W. Pranarka, J. Soedjati Djiwandono, M. Hadi Soesastro, Harry Tjan Silalahi, Jusuf Wanandi, Clara Joewono, Djisman S. Simandjuntak, Onny S. Prijono, Bantarto Bandoro

Redaksi Pelaksana

Bambang Walgito, Sunarto nDaru Mursito, Medelina K. Hendytio

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X



ANALISIS CSIS

TAHUN XXI, NO. 1, JANUARI-FEBRUARI 1992

Daftar Isi

• Pengantar Redaksi	2
• Integrasi Ekonomi Internasional, Regional dan Nasional <i>Hadi Soesastro</i>	4
• Aspek-aspek Internal dan Eksternal Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN <i>Anwar Nasution</i>	13
• ASEAN: Arah Perkembangan Masa Depan <i>Suhadi Mangkusuwondo</i>	30
• Wawasan Bisnis Keturunan Cina ASEAN <i>Bob Widyahartono</i>	41
• Kebijaksanaan Teknologi untuk Pembangunan Ekonomi: Dapatkah Jepang Ditiru? <i>Erman Aminullah</i>	52
• Profil PMA dan PMDN: Alokasinya Menurut Provinsi dan Sektor Serta Negara Asal PMA <i>J. Supranto</i>	68
• Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN <i>Sudibyo, Yoyok Ariessusanto & F. Andrea</i>	80

Pengantar Redaksi

KETERLIBATAN Indonesia dalam proses integrasi ekonomi regional dan integrasi ekonomi internasional akan membawa manfaat hanya jika pada saat bersamaan diupayakan integrasi ekonomi nasional yang semakin meningkat. Hal ini dikemukakan oleh *Hadi Soesastro* dalam analisisnya. Diajukan pula bahwa pengembangan Indonesia Bagian Timur (IBT) yang dicanangkan pemerintah dewasa ini, misalnya, merupakan upaya penting bagi integrasi ekonomi nasional, karenanya sejak semula harus direncanakan dalam kerangka integrasi ekonomi nasional dan bukan sebagai upaya yang berdiri secara terpisah.

Menurut *Anwar Nasution*, ASEAN tidak mungkin membentuk pasar yang bersifat *inward looking*. Namun demikian, dalam batas-batas tertentu, negara-negara ASEAN dapat meningkatkan kerja sama ekonomi untuk semakin memperbaiki iklim investasi di masing-masing negara anggota. Tujuan kerja sama tersebut adalah untuk menstimulasi pembagian kerja dan spesialisasi produksi antarnegara anggota, yang sebenarnya telah mulai dirintis oleh penanaman modal swasta.

Penilaian yang jujur menyimpulkan bahwa dari penampilan ASEAN sekarang tidak banyak hasil yang dicapai dalam kerja sama ekonomi. Menurut *Suhadi Mangkusuwondo*, dalam menghadapi perekonomian dunia yang didominasi negara-negara industri maju dengan kecenderungan proteksionisme dan praktik diskriminasi perdagangan, maka semakin mendesaklah kerja sama ASEAN memikirkan penghimpunan sumber-sumber daya dan saling berbagi pasar demi pengembangan berbagai sektor ekonomi bersama menjadi ekonomi yang efisien dan kuat sehingga mampu bersaing di pasaran dunia. Bagaimanapun kemajuan ekonomi ASEAN akhir-akhir ini terutama didorong oleh relatif tingginya pertumbuhan perdagangan luar negerinya. Jikalau perdagangan luar negerinya tersendat-sendat, maka perkembangan ekonominya pun akan menjadi lebih lambat pula.

Negara-negara anggota ASEAN mempunyai salah satu persamaan yang menonjol, yaitu sebagian warganya adalah keturunan Cina yang kebanyakan berprofesi di bidang bisnis. Sejak zaman kolonial hanya di bidang bisnislah kapling hidup mereka disediakan, yaitu diawali dengan berdagang eceran dan grosir, lambat laun merayap menjadi pengusaha yang mekar dan sukses. Prestasi bisnis tersebut, dari yang kecil sampai yang besar, dibahas oleh *Bob Widyahartono* yang mengemukakan bahwa keadaan itu lebih banyak dikembangkan karena jaringan kerja yang bersifat pribadi atau kultur keluarga (*guanxi*) dan dilandasi

sikap-sikap mempercayai (*sin yung*). Ini juga tampak dalam arah *managerial* yang ditentukan oleh pemilik selaku *inner circle*, serta ketertutupan manajemen. Dan dalam hubungan kerja mereka lebih menilai loyalitas daripada kecakapan, berorientasi kelompok, dan menjaga harmoni sosial. Disamping itu, mereka juga menekankan pentingnya kerajinan mendengar, ketekunan menyerap informasi, dan mengolahnya untuk kemudian disusul dengan tindak lanjut secara enerjik.

Keberhasilan pembangunan ekonomi Jepang menurut *Ernan Aminullah* ditentukan oleh kemampuan teknologi, yang perkembangannya dilandasi akumulasi investasi teknologi. Pada tahap awal, kebijaksanaan negara berperan melengkapi kekurangmampuan teknologi swasta, disamping berupaya mempercepat pertumbuhan kemampuannya. Selanjutnya, perkembangan teknologi Jepang banyak bertumpu pada sektor swasta, yang kemajuan teknologinya terpacu oleh corak organisasi industri dan suasana persaingan antarperusahaan. Maka pengalaman Jepang yang dapat dimanfaatkan dalam kebijakan teknologi Indonesia ialah negara perlu aktif mengalihkan hasil-hasil R & D dari laboratorium universitas, lembaga penelitian nasional, dan balai industri kepada seluruh jajaran perusahaan industri besar, menengah dan kecil. Suasana persaingan industri harus dijamin melalui UU anti monopoli (bukan justru dilindungi), agar diciptakan iklim peningkatan efisiensi dan mutunya melalui investasi teknologi, seperti perencanaan teknologi impor. Belum terciptanya perbaikan efisiensi dan mutu yang terus-menerus sekarang ini menyebabkan banyak industri Indonesia sulit bersaing di pasar internasional.

Kendatipun penanaman modal asing dan domestik semakin meningkat dan cukup menggembirakan, namun sebagaimana dipaparkan oleh *J. Supranto* sejauh ini alokasinya telah tersebar secara pincang baik sektor maupun lokasi investasinya. Dari segi sektoral PMA maupun PMDN sebagian besar ditujukan ke sektor industri; sedangkan dari segi lokasi sebagian besar diarahkan ke Indonesia Bagian Barat, khususnya Pulau Jawa dan terutama ke DKI Jakarta atau Jawa Barat. Padahal, selama ini aspirasi pemerataan pembangunan sudah selalu dijanjikan dengan lantang. Upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan dipandang sulit tercapai, kalau tidak diimbangi dengan usaha pemerataan penanaman modal. Bagaimanapun tidak meratanya hasil-hasil pembangunan niscaya akan menumbuhkan keresahan sosial dan mengganggu stabilitas nasional.

ASEAN perlu segera menyepakati pelaksanaan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), agar negara-negara anggotanya tidak bergabung dalam wadah lain. AFTA perlu segera dilaksanakan sejalan dengan akan berfungsinya Pasar Tunggal Eropa (PTE) 1993, serta Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko yang telah sepakat membentuk kawasan perdagangan bebas serupa. Pembentukan AFTA diharapkan akan memacu peningkatan perdagangan diantara negara-negara anggota ASEAN yang selama ini berjalan lamban. Demikian hal yang dikemukakan oleh Menteri Perdagangan Arifin Siregar di Jakarta tanggal 6 Desember 1991. Berbagai kerja sama ASEAN lainnya dapat diikuti dalam Ringkasan Peristiwa ASEAN bulan November-Desember 1991 yang disusun oleh *F. Andrea, Yoyok Ariessusanto* dan *Sudibyo* sebagai editornya.

Integrasi Ekonomi Internasional, Regional dan Nasional*

Hadi Soesastro

Apa yang Sedang Terjadi?

INTERNASIONALISASI pasar finansial dan globalisasi produksi yang sudah menjadi pembicaraan umum dewasa ini, dan hingga batas tertentu memang sudah menjadi kenyataan, bisa dilihat sebagai manifestasi dari terjadinya integrasi ekonomi dunia. Sebaliknya, dapat juga dikatakan bahwa internasionalisasi pasar finansial dan globalisasi produksi itulah yang telah mendorong proses integrasi ekonomi internasional. Perbedaan penafsiran ini bersumber pada perbedaan pengertian tentang integrasi ekonomi, atau secara lebih tepat, tentang sifat dari integrasi itu.

Integrasi ekonomi dapat bersifat institusional, yaitu yang dilansir oleh otoritas politik. Contoh dari proses integrasi ekonomi seperti ini adalah Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang didasarkan atas suatu kesepa-

katan formal, yaitu Perjanjian Roma. Proses integrasi ekonomi juga dapat bersifat fungsional, secara lebih "alamiah" dan terjadi karena peningkatan kesalingtergantungan ekonomi. Timbulnya ekonomi Asia Pasifik, seperti yang seringkali dikenal sebagai *Pacific economic community* (PEC) atau *Pacific regional economy* (PRE), merupakan contoh dari proses integrasi ekonomi yang bersumber pada kesalingtergantungan ekonomi yang meningkat. Proses ini lebih banyak digerakkan oleh pertimbangan ekonomi dari para pelaku ekonomi yang bersangkutan. Otoritas politik (negara, pemerintah) yang bersangkutan dapat menghambat proses ini, tetapi juga dapat semakin mendorong proses integrasi. Gagasan mengenai kerja sama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik, seperti yang dikenal dengan *Pacific Economic Cooperation* (PEC), mengusulkan perlunya proses integrasi ekonomi itu -- setelah mencapai suatu tahapan tertentu dalam perkembangannya -- diformalkan atau dilembagakan.

Integrasi ekonomi antara dua ekonomi atau lebih dapat terjadi karena berbagai se-

*Makalah ini dalam Seminar Sehari, Peringatan 20 Tahun CSIS, "Menuju Satu Kebudayaan? Nasionalisme dan Internasionalisme di Persimpangan Jalan," yang diselenggarakan di Jakarta, 28 Agustus 1991.

bab. Majalah *The Economist*, misalnya, melihat bahwa antara ekonomi Amerika dan Jepang telah terjadi integrasi ekonomi yang cukup dalam, sehingga lahir apa yang disebutkannya sebagai "ekonomi Nichibei", yaitu penggabungan dari kata "Nihon" (Jepang) dan "Beikoku" (negara bebas, yaitu Amerika Serikat).¹ Walaupun terjadi pertentangan dan persaingan ekonomi dan perdagangan yang sengit antara Amerika dan Jepang, tetapi banyak kalangan beranggapan bahwa hubungan antara kedua negara itu cukup berketeraan karena integrasi ekonomi yang begitu tinggi. Tambahan lagi, hubungan politik dan strategis antara kedua negara itu mempunyai arti yang sangat penting bagi keduanya. Namun demikian, untuk mengelola kesalingtergantungan ekonomi yang tinggi itu telah dirasakan perlunya dibentuk suatu mekanisme kerja sama yang dapat menghindarkan konflik dan untuk mengatasi persengketaan yang timbul (*dispute settlement*). Mike Mansfield, pada saat meninggalkan Jepang setelah bertugas sebagai Duta Besar Amerika Serikat di sana untuk waktu yang cukup lama, mengusulkan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas (*free trade area* - FTA) antara Amerika dan Jepang dengan tujuan di atas. Begitu pula usulan tentang suatu forum kerja sama di Asia Pasifik, seperti gagasan OPTAD yang dilontarkan pada akhir tahun 1970-an, dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme yang dapat memanfaatkan peluang kerja sama dan untuk mengatasi friksi yang timbul dari peningkatan kesalingtergantungan ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik.²

¹ *The Economist*, 7 Desember 1985, "Survey Japan," 17.

² Tentang perkembangan usulan-usulan kerja sama ekonomi Pasifik, lihat Hadi Soesastro, "Institutional

Uraian di atas menunjukkan bahwa integrasi ekonomi yang bersifat fungsional, yang timbul dan digerakkan oleh bekerjanya pasar (*market*) membawa persoalan bagi, dan mempunyai pengaruh atau pun dampak terhadap otoritas politik atau negara bangsa (*state*), dan juga sebaliknya. Oleh sebab itu, proses integrasi ekonomi dunia telah menjadi fokus pengkajian ekonomi politik internasional (*international political economy*) yang sangat menarik.³ Teori dualisme ekonomi, misalnya, melihat adanya dua sektor ekonomi yang secara relatif terlepas satu dari lainnya, baik dalam ekonomi internasional maupun dalam ekonomi nasional. Kedua sektor itu adalah: sektor modern, yang maju dan mempunyai tingkat efisiensi serta integrasi ekonomi yang tinggi; dan, sektor tradisional yang ditandai oleh keterbelakangan dan teknik produksi yang usang serta tingkat pemenuhan hidup subsisten. Kita di Indonesia sangat mengenal teori Boeke. Pengamatan Boeke di Hindia Belanda di waktu lalu mendorongnya untuk berpendapat bahwa sektor tradisional ternyata sukar untuk digerakkan (dipengaruhi) oleh sektor modern, sementara otoritas politik (pemerintah kolonial) tidak dapat berbuat banyak untuk mentransformasikan sektor tradisional.

Aspects of Pacific Economic Cooperation," dalam Hadi Soesastro dan Han Sung-joo (editor), *Pacific Economic Cooperation: The Next Phase* (Jakarta: CSIS, 1983), 3-25.

³ Lihat, antara lain, Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (Princeton: Princeton University Press, 1987); Susan Strange, *States and Markets -- An Introduction to International Political Economy* (New York: Basil Blackwell, 1988); Stephen Gill dan David Law, *The Global Political Economy* (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1988); dan, Robert A. Isaak, *International Political Economy - Managing World Economic Change* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1991).

nal dan sebaiknya "bersabar laksana malai-kat".

Teori dualisme ekonomi yang umum menyatakan bahwa proses pembangunan ekonomi melibatkan transformasi sektor tradisional menjadi sektor modern melalui modernisasi struktur ekonomi, sosial dan politik. Pada tatanan internasional, integrasi global dari pasar-pasar ataupun lembaga-lembaga (misalnya di bidang keuangan) dilihat sebagai akibat dari daya-daya ekonomi dan mekanisme pasar yang mengarah pada tingkat efisiensi ekonomi dan kesalingtergantungan global yang lebih tinggi. Meluasnya ekonomi pasar merupakan akibat alamiah dari dibebaskannya kekuatan pasar. Jika pembatasan-pembatasan, yang bersifat struktural maupun buatan otoritas politik, dihilangkan maka manusia pasti akan memperluas kegiatan ekonominya. Pada tatanan internasional proses ini tampaknya kini semakin dipercepat oleh kemajuan teknologi, terutama di bidang komunikasi dan transportasi, dan menurunnya biaya-biaya transaksi oleh karena berkembangnya berbagai prasarana bisnis internasional. Ekonomi dunia modern, yang muncul dari proses integrasi ekonomi internasional ini, merupakan hasil evolusi melalui ekspansi mekanisme pasar secara global dan bukan oleh kesepakatan diantara otoritas politik negara-negara bangsa di dunia. Rezim ekonomi internasional setelah Perang Dunia II dengan lembaga-lembaga ekonomi internasional hasil Bretton Woods, seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, maupun GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), telah ikut mendorong proses ini dengan cara mengakomodasi, memperlancar, dan memperkuat mekanisme pasar.

Gambaran tentang proses yang logis dan mulus itu dalam kenyataannya berbeda, dan

tampaknya cenderung menjadi semakin rumit. Proses integrasi ekonomi internasional yang didorong oleh kekuatan pasar tampaknya memang akan terus meningkat, karena daya-daya pasar itu terasa semakin kuat dan terus meluas. Negara-negara berkembang yang semula menutup diri kini satu persatu membuka ekonominya, melakukan liberalisasi dan deregulasi, oleh karena melihat keharusan untuk bisa menginjakkan kakinya ke anak tangga pembangunan yang lebih tinggi dengan lebih cepat. Tetapi proses ini pasti tidak dapat berjalan mulus sebab yang naik ke anak tangga yang lebih tinggi itu akan mengambil tempat pihak lain yang tidak mampu meningkat ke anak tangga berikutnya.

Berhasilnya sejumlah negara, terutama di Asia Timur, untuk naik kelas menjadi negara industri baru (*newly industrializing economies*) telah dijadikan bukti keunggulan mekanisme pasar yang dielu-elukan, tetapi pada saat yang sama juga dipandang sebagai ancaman. Di kalangan negara-negara maju sendiri persaingan untuk meraih anak tangga kemajuan teknologi berikutnya, bahkan untuk melompat beberapa langkah ke depan, juga telah semakin meningkatkan daya-daya pasar, yang sekaligus mengundang otoritas politik untuk mengambil berbagai tindakan proteksi ataupun secara aktif merumuskan dan menerapkan suatu kebijaksanaan resiprositas yang agresif, selain suatu "industrial policy" dan "strategic trade policy". Persoalan politik timbul karena, walaupun semua negara akan mengalami kemajuan, laju kemajuan itu tidak bisa sama. Selain itu, kesalingtergantungan juga tidak pernah bersifat simetris.

Peningkatan integrasi ekonomi antara negara-negara MEE, melalui proyek Eropa 1992 -- yang juga didorong oleh integrasi in-

stitusional -- dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di dunia internasional. Bagi MEE usaha ini penting oleh karena mereka merupakan bagian dari ekonomi dunia dan, mau tidak mau, harus mengambil bagian dalam proses integrasi ekonomi internasional yang akan terus berlangsung. Benteng Eropa (*Fortress Europe*), jika terjadi, merupakan penyimpangan dari tujuan Pasar Tunggal Eropa. Walaupun demikian, kekhawatiran akan munculnya suatu blok ekonomi Eropa yang proteksionis dianggap telah menimbulkan kecenderungan pembentukan kelompok-kelompok regional untuk menghadapinya, atau bahkan untuk menandinginya.

Di Amerika Utara sedang berlangsung suatu proses negosiasi antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ke arah pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas (*NAFTA - North American Free Trade Area*) yang diharapkan dapat dirampungkan pada tahun 1992. NAFTA, jika dipelajari asal usulnya, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu blok ekonomi regional yang dibentuk untuk menyaingi Eropa. Tetapi terbentuknya NAFTA mungkin akan semakin memperkuat kecenderungan ke arah regionalisme ekonomi dan upaya-upaya untuk memperkuat integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi regional tidak harus bertentangan dengan kecenderungan integrasi ekonomi internasional. Tetapi, jika perkembangan itu mengarah kepada pembentukan blok-blok ekonomi, maka implikasinya bagi perkembangan ekonomi dunia pada umumnya diperkirakan akan tidak menggembirakan.

Secara hipotetis dapat diajukan tiga skenario tentang kemungkinan arah perkembangan ekonomi dunia. Skenario pertama adalah suatu ekonomi dunia *multilateral*,

yaitu di mana interaksi ekonomi antara semua negara di dunia didasarkan pada aturan permainan yang bersifat multilateral; di bidang perdagangan, misalnya, aturan permainan itu didasarkan atas prinsip "non-discrimination" dan "non-conditional MFN", seperti yang menjadi aturan tertulis GATT, tetapi yang telah dilanggar di sana sini. Upaya negosiasi dalam Putaran Uruguay adalah untuk memperkuat kembali GATT beserta aturan perdagangan internasional. Jika upaya ini berhasil diharapkan akan tercipta landasan kuat bagi ekonomi dunia multilateral itu. Teori "hegemonic stability" menyatakan bahwa sistem ekonomi internasional yang liberal ini hanya bisa dipertahankan oleh adanya "hegemon" -- pemimpin dunia -- yang bersedia menanggung ongkosnya.

Skenario kedua, yang dapat disebut sebagai suatu ekonomi dunia *trilateral*, adalah suatu ekonomi dunia yang dikuasai sepenuhnya atau didominasi bersama-sama oleh tiga kawasan ekonomi negara-negara maju, yaitu Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang. Ekonomi dunia seperti ini akan ditentukan oleh Kelompok G-7 atau bahkan G-5 (untuk bidang moneter dan keuangan), atau pada dasarnya mungkin ditentukan hanya oleh "G-3", yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Dalam ekonomi dunia ini Kelompok G-77 yang terdiri dari negara-negara berkembang, ataupun G-15 yang belum lama ini dilansir oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir, hanya bisa berteriak tetapi tidak mempunyai "suara" yang berarti.

Skenario ketiga, yang semakin banyak dibicarakan orang, adalah suatu ekonomi dunia *tripolar*, yang terdiri dari tiga kubu yang saling bersaing, yaitu Eropa Barat (yang bisa meluas meliputi Eropa Timur dan Mediterania), Amerika Utara (yang bisa di-

perluas meliputi Amerika Latin), dan Asia Timur (yang bisa diperluas meliputi Australasia). Masing-masing kubu merupakan pengelompokan ekonomi yang eksklusif sifatnya, dan akan mencoba memaksimalkan hasil bagi kelompoknya sendiri tanpa mempedulikan dampak eksternalnya. Ekonomi dunia semacam ini akan menjadi sangat tidak stabil. Ada pula pendapat bahwa dalam kubu Amerika dan kubu Asia Timur sendiri juga akan terjadi ketidakstabilan. Ini disebabkan dalam masing-masing kubu itu terdapat satu ekonomi yang sangat dominan, yaitu ekonomi Amerika Serikat di kubu Amerika dan ekonomi Jepang di kubu Asia Timur. Keadaan ini akan semakin mempersulit hubungan-hubungan peka yang sudah ada antara negara yang berposisi dominan itu dengan negara-negara tetangganya.

Pendapat yang berbeda menyatakan bahwa ekonomi dunia tripolar ini mungkin merupakan pemecahan (solusi) yang paling "feasible" saat ini, yakni suatu solusi "second best", sebab kesepakatan multilateral tidak akan mudah dicapai. Yang diusulkan oleh pemikiran ini adalah suatu ekonomi dunia di mana interaksi ekonomi antara ketiga kubu itu "dikelola" (*managed*); di bidang perdagangan akan diterapkan "managed trade" yang berdasar pada resiprositas, misalnya. Melalui pengelolaan itu, dan upaya-upaya integrasi ekonomi regional masing-masing kelompok -- termasuk liberalisasi secara regional -- diharapkan bahwa lambat laun akan terjadi liberalisasi secara global dan integrasi ekonomi internasional. Hal ini tercermin dalam slogan "melalui regionalisme menuju globalisme", yang kini seringkali dikumandangkan.

Pandangan optimistis ini tentu saja tidak mempunyai dasar empirik. Yang dapat diharapkan adalah bahwa upaya-upaya regional

itu tidak bersifat "inward looking" melainkan "outward looking", yaitu minimal mematuhi Artikel 24 dari GATT, tetapi tidak diperoleh jaminan apakah "pengelolaan" hubungan antarkubu akan menghasilkan suatu rezim ekonomi internasional yang stabil. Kubu Asia Timur, misalnya, akan merupakan kubu terlemah. Bobot ekonomi Asia Timur adalah yang terkecil diantara ketiga kubu itu. Laju pertumbuhan ekonomi kawasan ini memang diperkirakan akan tetap melebihi kawasan lainnya, dan pada tahun 2010 sangat mungkin produk domestik bruto (GNP) kawasan ini akan melampaui GNP kawasan MEE. Tetapi dibandingkan dengan MEE, Asia Timur jauh lebih tergantung pada perdagangan antarkawasan. Disamping itu, Asia Timur -- yang mau tidak mau akan dipimpin Jepang -- tidak mempunyai kekuatan tawar menawar yang cukup tinggi, ataupun cukup mempunyai *structural power*, yaitu yang dirumuskan oleh Susan Strange sebagai kemampuan untuk menentukan struktur *the power to define the structure*.⁴

Struktur-struktur ekonomi politik internasional yang penting dalam hal ini adalah struktur keamanan, struktur produksi, struktur finansial, dan struktur pengetahuan. Jepang jelas mempunyai kedudukan yang lemah dalam menentukan struktur keamanan karena di bidang itu akan tetap tergantung pada Amerika Serikat. Kemampuan Jepang yang utama tampaknya hanya terdapat dalam menentukan struktur produksi internasional. Di bidang finansial, walaupun Jepang merupakan negara kreditor utama dan sepuluh bank utama di dunia dewasa ini adalah bank Jepang, masih terdapat banyak alasan mengapa Jepang dianggap tidak bisa

⁴Susan Strange, *States and Market*.

mengembangkan kepemimpinan finansial (*financial leadership*). Begitu pula dalam struktur pengetahuan, reputasi Jepang lebih banyak terletak pada kemampuannya menerapkan hasil ilmu pengetahuan daripada mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, walaupun keadaan ini mungkin akan berubah dalam kurun waktu yang tidak lama.

Gagasan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir, untuk membentuk suatu pengelompokan ekonomi di Asia Timur, *East Asian Economic Group* (EAEG), dimaksudkan untuk memperkuat posisi negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur, yang hingga kini memang tidak mempunyai suatu forum bersama. Dari sudut pandang ekonomi, pengorganisasian subkawasan ini jelas tidak optimal walaupun perdagangan dan interaksi ekonomi lainnya intra subkawasan ini cenderung untuk terus meningkat. Amerika Serikat merupakan pasar yang sangat penting bagi negara-negara Asia Timur. Dari sudut pandang politik, EAEG bisa diterima, tetapi "feasibility"-nya sangat diragukan sebab Jepang tidak ingin mempertaruhkan hubungan politik-keamanannya dengan Amerika Serikat untuk mengambil kepemimpinan dalam EAEG. Oleh karena itu gagasan yang menyebabkan fragmentasi kawasan Pasifik ini sulit untuk diterima.

Bagi masing-masing subkawasan di Asia Pasifik, tampaknya kawasan ekonomi yang optimal adalah yang meliputi seluruh kawasan Pasifik; artinya, yang mengikutsertakan Amerika Utara. Gagasan kerja sama ekonomi Pasifik memang merupakan suatu upaya untuk melibatkan Amerika Serikat dalam perkembangan ekonomi kawasan. Komitmen Amerika terhadap ekonomi kawasan memang masih diragukan walaupun berkali-kali pihak pemerintahnya menyata-

kan Amerika sebagai kekuatan Pasifik. Inisiatif ekonomi yang berarti dengan kawasan ini belum pernah dilontarkan oleh Washington, sementara yang ada sejauh ini lebih ditujukan ke Karibia (*Caribbean Basin Initiative*) dan Amerika Latin (*Enterprise for the Americas*). Selain itu juga dirasakan bahwa Amerika Serikat tidak memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungan ekonominya dengan Jepang. SII (*Structural Impediments Initiative*) mungkin bersifat terlalu *ad hoc* dan sulit dapat bersifat langgeng. Bagi kelangsungan kerja sama ekonomi Pasifik, Amerika Serikat perlu merumuskan kebijaksanaannya terhadap Asia Pasifik.⁵ Tampaknya, dalam hubungan inilah terletak arti strategis dari gagasan kerja sama ekonomi Pasifik itu. Apa arti strategisnya bagi Indonesia?

Tantangan Bagi Indonesia

Arah perkembangan ekonomi dunia sangat berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Jika sistem perdagangan internasional dapat dipertahankan terbuka, Indonesia dapat melanjutkan upaya pengembangan ekspor sebagai salah satu motor pertumbuhan utama. Apabila timbul blok-blok perdagangan yang diskriminatif sifatnya, maka Indonesia mungkin akan mengalami berbagai kesulitan, sebab hambatan-hambatan dalam akses ke pasar menjadi semakin sulit untuk ditembus walaupun daya saing ekonomi Indonesia dapat terus dipertajam. Itulah sebabnya Indonesia sangat berkepentingan atas rezim ekonomi internasional yang akan timbul. Ekonomi Indonesia, sebagai akibat dari pe-

⁵Hadi Soesastro, *The East Asian Economic Group (EAEG) Proposal and East Asian Concepts of the Pacific Basin*, Mimeo CSIS, M51/91, Februari 1991.

nerapan kebijaksanaan yang lebih terbuka, telah semakin terintegrasi dalam ekonomi dunia. Apakah ada derajad optimal dari pengintegrasian ekonomi Indonesia ke dalam ekonomi dunia?

Proses integrasi ekonomi internasional akan terus berlangsung, tetapi "outcome"-nya bagi berbagai ekonomi dan negara bangsa akan dipengaruhi oleh arah perkembangan ekonomi dunia seperti digambarkan oleh tiga skenario di atas. Salah satu gejala menarik yang dapat kita amati sekarang adalah upaya (strategi) berbagai ekonomi atau negara bangsa untuk mempengaruhi proses itu sedemikian rupa sehingga menghasilkan "outcome" yang paling menguntungkan dengan cara membentuk pengelompokan regional. Eropa mempelopori proses ini. Amerika Serikat, sebagai ekonomi yang terbesar di dunia, mungkin juga telah tergiur untuk mengambil strategi ini. Jepang secara formal tidak terlibat dalam kerja sama regional terlembaga yang mana pun. Komitmen Jepang hanya pada kerja sama ekonomi Pasifik. Maka dari itu Jepang tergabung dalam APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), tetapi forum antarpemerintah ini baru bersifat informal. Secara *de facto* Jepang telah menjadi bagian dari suatu struktur produksi regional yang diciptakannya di kawasan Pasifik, khususnya di Asia Timur, dengan Jepang sendiri sebagai intinya.⁶ Jepang juga telah menjadi pelopor integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Timur khususnya dan di kawasan Asia Pasifik yang lebih luas.⁷ Penanaman modal asing (PMA) Jepang yang meningkat secara dramatis sela-

ma 6-10 tahun terakhir ini telah menjadi faktor utama dalam integrasi ekonomi regional ini.

Paradigma "formasi angsa terbang" menggambarkan proses integrasi ekonomi regional di Asia Pasifik sebagai akibat dari adanya pembagian kerja internasional yang sangat dinamis. Telah banyak studi menunjukkan bahwa proses ini terjadi dengan cukup cepat dan telah tercermin dalam pembagian kerja yang menjadi semakin horizontal serta perdagangan intraindustri yang semakin intensif, terutama dalam industri manufaktur.⁸ Agar proses ini bisa berlanjut, formasi "angsa terbang" itu tidak bisa "dipimpin" hanya oleh Jepang. Itulah sebabnya mengapa keterlibatan Amerika Serikat mempunyai arti penting. Karena itu pula, kawasan ekonomi yang optimal adalah kawasan Pasifik. EAEG tidak bisa menggantikan APEC, tetapi bisa memperkuat kedudukan negara-negara Asia Timur dalam APEC.

Bagaimana posisi Indonesia dalam proses integrasi regional ini? Rasanya sulit bagi Indonesia untuk tidak mengambil bagian dalam struktur produksi regional yang disebutkan terdahulu. Sebab, keterlibatan Indonesia dalam globalisasi produksi sangat erat kaitannya dengan dan telah dimungkinkan oleh integrasi produksi yang terjadi di Asia Timur. Masalahnya adalah apakah Indonesia mendapatkan "tempat yang wajar" dalam struktur produksi itu. Jawabannya tidaklah terletak di Jepang, tetapi pada kebijaksanaan dan kemampuan Indonesia sendiri. Dapatkah dan perlukah Indonesia menentukan bidang-bidang PMA Jepang yang

⁶Lihat Hadi Soesastro, *Can US and Japan Save the Pacific?* Mimeo CSIS (akan terbit).

⁷Hadi Soesastro, *Pacific Economic Cooperation: The Role of Smaller Economies*, Mimeo CSIS, M40/90, Agustus 1990.

⁸Antara lain, lihat Marcus Noland, *Pacific Basin Developing Countries -- Prospects for the Future* (Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1990).

diinginkannya, dan mampukah Indonesia merealisirnya? Ini merupakan tantangan yang penting bagi Indonesia dan juga bagi negara-negara ASEAN lainnya.

Indonesia, demikian pula negara-negara ASEAN lainnya, dapat saja membiarkan Jepang menentukan di bidang-bidang mana PMA-nya akan ditanamkan di masing-masing negara itu. Dengan perkataan lain, keunggulan komparatif anggota-anggota ASEAN akan ditentukan oleh Jepang. Dengan cara ini sebenarnya integrasi ekonomi kawasan ASEAN telah dapat dipercepat. Jika keadaan seperti ini diterima bersama, maka yang perlu dilakukan Indonesia adalah mempertahankan daya tarik yang tinggi bagi PMA Jepang dan PMA dari negara-negara lainnya. Tetapi bila Indonesia secara aktif ingin ikut menentukan arah industrialisasinya maka memang diperlukan kebijaksanaan yang aktif di berbagai bidang, tidak saja di bidang investasi, tetapi juga di bidang ketenagakerjaan, dan di bidang teknologi.

Yang kini sudah harus diantisipasi adalah datangnya "gelombang ketiga PMA Jepang" yang akan melibatkan investasi di sektor-sektor produksi dengan teknologi yang mutakhir. Sifat PMA ini berbeda dengan yang berlangsung dalam gelombang pertama pada tahun 1970-an yang datang untuk memanfaatkan kebijaksanaan substisi impor. Teknologi yang dibawa adalah yang relatif sudah usang. Gelombang kedua, yang merupakan relokasi industri, membawa teknologi yang lebih maju dan baru karena produk yang dihasilkan harus bisa bersaing di pasar internasional. Tetapi sejumlah besar investasi dalam rangka relokasi ini, seperti yang terjadi di Muangthai, bersifat "footloose", dan karenanya akan berpindah dengan cepat pula. Gelombang keti-

ga akan melibatkan investasi yang merupakan bagian dari pengembangan industri-industri yang baru, seperti yang berkaitan dengan aplikasi teknologi *fine ceramics* dan *fibre optics*, dan dilaksanakan dalam rangka globalisasi yang direncanakan sejak semula; jadi, bukan sekedar relokasi.

Perlukah negara-negara ASEAN mengkoordinasi kebijaksanaan investasi dan industrinya? Agenda bagi ASEAN dalam dasawarsa 1990-an ini penuh dengan berbagai tantangan. Salah satu masalah adalah untuk mempolakan struktur hubungan ekonomi eksternalnya, khususnya dengan mitra dagangnya yang utama. Dalam hubungan ini kiranya ASEAN perlu mempersiapkan suatu inisiatif untuk mengembangkan hubungan dengan Jepang: misalnya, bagaimana sebaiknya ASEAN dan Jepang mengelola kerja sama dalam konteks ASEAN sebagai "overseas production base" dari Jepang? Dengan Amerika Serikat telah dirintis suatu inisiatif yang dikenal sebagai AUI (*ASEAN-US initiative*), tetapi pelaksanaannya bersifat bilateral antara masing-masing anggota ASEAN dengan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan ASEAN sebagai kelompok memang belum mempunyai identitas ekonomi. Oleh sebab itu masalah yang juga penting bagi ASEAN adalah meningkatkan kerja sama ekonomi intra-ASEAN dengan tujuan untuk mengembangkan identitas ekonomi kawasan ini. Upaya ini pada akhirnya dapat mengarah pada peningkatan integrasi ekonomi ASEAN, walaupun tujuan ini tidak dicanangkan oleh ASEAN pada saat kerja sama itu dibentuk. Gagasan kawasan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area*), misalnya, kembali dilontarkan oleh beberapa pimpinan pemerintahan di ASEAN dan diusulkan untuk dibicarakan secara serius dalam KTT ASEAN IV di

Singapura permulaan tahun 1992. Ada kemungkinan gagasan ini kini lebih bisa diterima karena ekonomi-ekonomi ASEAN umumnya sudah menjadi lebih terbuka dan struktur industrinya telah menjadi lebih komplementer. Pada saat gagasan ini dapat direalisir, kira-kira 15 tahun yang akan datang, pasar ASEAN juga akan merupakan pasar yang cukup besar yang mempunyai daya pikat.⁹

Gagasan Segitiga Pertumbuhan, yang meliputi Singapura, Johor dan Riau (Sijori), merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara-negara ASEAN. Pola kerja sama ini akan meningkatkan integrasi ekonomi di daerah segitiga itu, dan pada gilirannya bisa menjadi ujung tombak bagi integrasi ekonomi regional yang lebih luas. Namun demikian, integrasi ekonomi regional di kawasan ASEAN mungkin hanya akan menghasilkan kantong-kantong pertumbuhan, dan seperti

⁹Mari Pangestu, "Pasar Bebas ASEAN," *Tempo*, 27 Juli 1991.

diramalkan Herman Kahn beberapa waktu lalu, ekonomi Pasifik yang dinamis itu mungkin memang hanya merupakan penggabungan dari dan melibatkan kesalingtergantungan antara kegiatan ekonomi Tokyo-San Fransisco-Los Angeles-Sydney-Jakarta-Singapura-Bangkok-Hong Kong-Taipei-Seoul:

Keterlibatan Indonesia dalam proses integrasi ekonomi regional dan integrasi ekonomi internasional hanya akan membawa manfaat jika pada saat bersamaan diupayakan integrasi ekonomi nasional yang semakin meningkat. Pengembangan Indonesia Bagian Timur (IBT) yang dicanangkan pemerintah dewasa ini, misalnya, merupakan upaya penting bagi integrasi ekonomi nasional, karenanya sejak semula harus direncanakan dalam kerangka integrasi ekonomi nasional dan bukan sebagai upaya yang berdiri secara terpisah.¹⁰

¹⁰Lihat pembahasan dalam Hadi Soesastro, *Ekonomi Indonesia Bagian Timur: Tantangan Menuju Tahun 2000*, Mimeo CSIS, M41/90, Agustus 1990.

Aspek-aspek Internal dan Eksternal Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN

Anwar Nasution

Pengantar

BERBAGAI perkembangan eksternal memberikan pertanda bahwa negara-negara anggota ASEAN semakin perlu untuk meningkatkan kerja sama ekonomi regional guna semakin meningkatkan kemakmuran ekonominya masing-masing. Kerja sama ekonomi yang dimaksud bukanlah untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar ekonomi yang tertutup seperti MEE atau NAFTA. ASEAN tidak mampu untuk menciptakan pasar bersama karena kemakmuran ekonomi negara-negara itu sangat tergantung pada jalur internasionalnya masing-masing. Kemakmuran ekonomi semua negara ASEAN sangat tergantung pada jalur keuangan, perdagangan dan teknologi dunia. Oleh karena itu, tujuan pokok kerja sama ekonomi ASEAN adalah untuk merangsang pembagian pekerjaan di negara-negara ASEAN guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menurunkan biaya produksi di kawasan ini.

Sementara itu, perubahan internal kebi-

jaksanaan ekonomi di masing-masing negara anggota memberikan petunjuk akan semakin dimungkinkannya peningkatan kerja sama regional. Untuk semakin merangsang kerja sama ekonomi regional itu, perlu dilakukan perubahan drastis akan orientasi maupun peranan Sekretariat serta komite-komite kerja sama ASEAN.

Selanjutnya makalah ini dibagi dalam enam bagian. Bagian kedua menguraikan secara ringkas sejarah dan falsafah perkembangan kerja sama ekonomi ASEAN. Bagian ketiga membahas proses deregulasi ekonomi negara-negara anggota yang semakin memberikan kemungkinan bagi peningkatan kerja sama ekonomi di lingkungan negara-negara itu. Bagian keempat membahas berbagai faktor eksternal dalam dasawarsa 1970-1990, yang menjadi alasan akan semakin perlunya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di lingkungan negara-negara ASEAN. Bagian kelima membahas bentuk kerja sama yang dimungkinkan dan diperlukan di ASEAN. Bagian keenam merupakan kesimpulan.

Kerja Sama Ekonomi ASEAN

Anggota ASEAN terdiri dari enam negara yang memiliki berbagai persamaan maupun perbedaan yang sangat menonjol. Perbedaan itu, antara lain, tercermin pada perbedaan luas wilayah, jumlah penduduk, kekayaan alam, falsafah hidup dan pengalaman historis maupun struktur, tingkat kemajuan serta arah kebijakan pembangunan ekonomi. Persamaan sesama mereka, antara lain, berupa rasial, komitmen pada pembangunan nasional, penggunaan mekanisme pasar, orientasi pada ekspor serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dan memanfaatkan perubahan situasi internasional. Berbagai indikator sosial-ekonomi ASEAN dimuat dalam Tabel 1.

Tujuan pendirian ASEAN, berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, adalah untuk membina kerja sama ekonomi dan kebudayaan di antara negara anggota. Namun dalam kenyataan, tali pengikat ASEAN yang terpenting hingga kini adalah terutama berkisar pada masalah politik dan keamanan regional. Kedua masalah itu, tadinya bersumber pada upaya untuk membendung musuh bersama, yakni komunisme. Setelah berakhirnya perang Vietnam, masalah tersebut beralih pada penyelesaian persoalan di Kampuchea, apakah akibat dari kekejaman rezim Khmer Merah ataukah invasi Vietnam.

Perhatian yang lebih besar pada peningkatan kerja sama ekonomi regional mulai diberikan setelah ditandatanganinya *Declaration of Concord* sebagai hasil Pertemuan Puncak di Bali dalam bulan Februari 1976. Deklarasi Bali itu merupakan dasar pembentukan *ASEAN Industrial Projects* (1976), *the Preferential Trading Arrangement* (PTA) (1977), *The ASEAN Industrial Com-*

plementation Scheme (1981) dan *the ASEAN Industrial Joint Venture Scheme* (AIJV) (1983). Di samping itu, juga telah dibentuk delapan komite Pemerintah dan berbagai forum resmi dan swasta untuk merangsang perwujudan kerja sama ekonomi regional. Komite resmi itu adalah masing-masing tentang: Keuangan dan Perbankan; Industri, Pertambangan dan Enerji; Perdagangan dan Pariwisata; Kebudayaan dan Penerangan; Bahan Makanan, Pertanian dan Kehutanan; Transportasi dan Komunikasi; Ilmu dan Teknologi; serta Pembangunan Masyarakat.

Ada dua falsafah yang menonjol di balik kerja sama ekonomi regional (PTA dan AIJV) di ASEAN selama ini. *Pertama*, pendirian industri pengganti impor menuju swasembada regional, seperti industri pupuk. Hambatan perdagangan (nontarif dan tarif bea masuk) digunakan untuk melindungi persaingan impor. Berbagai jenis barang yang masuk PTA (seperti pakaian musim dingin) tidak dikonsumir oleh konsumen di negara-negara ASEAN. Falsafah yang *kedua* adalah menonjolnya peranan Pemerintah, baik dalam pemilihan jenis proyek, dalam hal pemilikannya maupun penentuan lokasinya.

Kedua falsafah di atas mencerminkan strategi pembangunan nasional yang ditempuh di Thailand, Malaysia, Indonesia dan Filipina hingga awal dekade 1980-an. Pada masa itu, strategi pembangunan di keempat negara itu adalah untuk mengusahakan dan mengolah komoditi primer sumber daya alam. Dalam masa awal pembangunan ekonominya, keempat negara ini memodernisir sektor pertaniannya untuk menciptakan pasar bagi produk industri pengganti impor. Orientasi industrialisasi di masing-masing negara ASEAN adalah untuk meme-

Tabel 1

INDIKATOR GEOGRAFI DAN EKONOMI LIMA NEGARA ASEAN

	Thailand	Malaysia	Singapura	Indonesia	Filipina
Luas Daerah (Ribu Km ²)	513	330	1	1.905	300
Jumlah Penduduk (Juni 1989)	55,4	17,4	2,7	178,2	60
Tingkat Laju Pertambahan Penduduk (%)					
1965-1980	2,9	2,5	1,6	2,4	2,8
1980-1989	1,9	2,6	1,2	2,1	2,5
1989-2000 ¹	1,3	2,2	1	1,6	1,8
GNP Per Kapita (US\$), 1989	1.220	2.160	10.450	500	710
Tingkat Laju Pertambahan GNP (%), 1965-1989	4,2	4	7	4,4	1,6
Tingkat Laju Inflasi (%)					
1965-1980	6,2	4,9	5,1	35,5	11,7
1980-1989	3,2	1,5	1,5	8,3	14,8
Struktur Produksi Nasional (%), 1989					
Pertanian	15	20	0	23	24
Industri ²	38	36	37	37	33
Industri Manufaktur	21	26	26	17	22
Jasa-jasa	47	44	63	39	43
Indikator Keterbukaan Ekonomi, 1989 [(Ekspor + Impor)/GDP] (%)	74	144	374	50	51

Catatan: ¹Proyeksi²Termasuk sektor Penambangan dan Penggalian

Sumber: World Bank, World Development Report 1991.

Tabel 2

**PERDAGANGAN LUAR NEGERI ANTAR NEGARA ASEAN,
DENGAN DAN TANPA SINGAPURA (DI LUAR BRUNEI),
1970-1989**

	EKSPOR						IMPOR					
	Dengan Singapura			Tanpa Singapura			Dengan Singapura			Tanpa Singapura		
	Total	ke ASEAN	ke ASEAN	Total	ke ASEAN	ke ASEAN	Total	Dari ASEAN	Dari ASEAN	Total	Dari ASEAN	Dari ASEAN
	(Juta US\$)	(Juta US\$)	(% thd. Total)	(Juta US\$)	(Juta US\$)	(% thd. Total)	(Juta US\$)	(Juta US\$)	(% thd. Total)	(Juta US\$)	(Juta US\$)	(% thd. Total)
1970	6.152	1.217	19,8	4.547	178	3,9	7.552	1.110	14,7	4.905	226	4,6
1971	6.639	1.333	20,1	4.822	200	4,1	8.165	1.137	13,9	5.163	217	4,2
1972	7.925	1.488	18,8	5.645	216	3,8	9.549	1.296	13,6	6.011	244	4,1
1973	13.489	2.367	17,5	9.706	289	3,0	14.575	2.052	14,1	9.055	334	3,7
1974	22.812	3.509	15,4	16.777	433	2,6	23.566	3.055	13,0	14.585	434	3,0
1975	21.076	3.574	17,0	15.389	455	3,0	21.018	3.052	14,5	15.188	486	3,2
1976	26.492	4.240	16,0	19.398	618	3,2	26.808	3.971	14,8	17.028	725	4,3
1977	32.292	5.066	15,7	23.570	800	3,4	31.235	4.849	15,5	19.660	946	4,8
1978	37.102	6.046	16,3	26.567	851	3,2	37.542	5.556	14,8	23.117	873	3,8
1979	51.283	8.885	17,3	36.558	1.112	3,0	48.633	8.099	16,7	28.844	1.218	4,2
1980	67.386	11.969	17,8	47.158	1.513	3,2	65.910	11.120	16,9	39.166	1.582	4,0
1981	70.430	12.960	18,4	48.330	1.721	3,6	73.405	11.884	16,2	43.282	1.774	4,1
1982	69.677	15.899	22,8	46.327	1.807	3,9	77.671	15.178	19,5	46.062	1.963	4,3
1983	71.555	17.159	24,0	46.573	1.833	3,9	79.336	16.492	20,8	47.737	2.094	4,4
1984	76.898	15.248	19,8	51.200	1.907	3,7	75.820	14.293	18,9	44.614	2.259	5,1
1985	69.316	12.945	18,7	45.741	2.044	4,5	65.212	12.099	18,6	37.186	2.230	6,0
1986	65.839	11.417	17,3	42.457	1.594	3,8	62.804	10.758	17,1	35.928	1.747	4,9
1987	82.294	14.985	18,2	52.363	2.059	3,9	79.710	14.005	17,6	45.490	2.223	4,9
1988	103.594	18.308	17,7	63.462	2.316	3,6	104.494	17.256	16,5	58.803	2.608	4,4
1989	120.479	21.683	18,0	74.767	3.092	4,1	427.200	19.792	4,6	75.516	3.337	4,4
1990												

Catatan: Perdagangan Singapura dengan Indonesia dihitung berdasarkan formula 110% dari nilai CIF/FOB eksport dan impor yang dilaporkan oleh BPS

Sumber: IMF, Direction of Trade Statistics, berbagai edisi.

nuhi permintaan pasar dalam negeri. Sementara itu, orientasi penanaman modal di kawasan berikat (*export processing zones*) adalah ditujukan untuk langsung memenuhi pasar internasional di luar ASEAN.

Peranan sektor negara juga sangat menonjol dalam perekonomian. Di samping berfungsi sebagai regulator, peranan negara sangat menonjol dalam pemilikan badan usaha (melalui BUMN). Disamping itu, negara juga melakukan campur tangan dalam pengambilan keputusan usaha dan berperan secara langsung dalam menentukan alokasi faktor-faktor produksi. BUMN di Malaysia, Indonesia dan Filipina juga dibebani tugas sosial-politik. Ke dalam negeri, BUMN di Malaysia dan Indonesia sekaligus berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi antarrasial. Ke luar negeri BUMN digunakan sebagai penangkal (*countervailing force*) dominasi kekuatan ekonomi asing. Selama masa pemerintahan Presiden Marcos, BUMN di Filipina digunakan sebagai kasir penguasa.

Karena tidak memiliki sumber alam, Singapura menempuh strategi pembangunan yang berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hingga dekade 1960-an, ekonomi Singapura didasarkan pada pengolahan bahan primer yang dihasilkan di negara-negara tetangganya, terutama Malaysia dan Indonesia. Dalam dekade 1970-an, industrialisasi di negara itu diarahkan pada industri padat karya. Sejak dekade 1980-an, ekonomi Singapura berubah menjadi industri yang lebih bersifat padat modal dan padat teknologi. Di sektor jasa-jasa, kegiatan sebagai pedagang pengumpul dan sebagai pelabuhan bebas di kawasan ini terus dipertahankan. Sementara itu, Singapura juga tumbuh menjadi pasar keuangan regional serta pusat distribusi regional bagi MNC. Pelabuhan

udara Changi maupun pelabuhan laut di Singapura, misalnya, merupakan pelabuhan dan pusat persinggahan yang terpenting di Asia Tenggara.

Seperti di negara-negara ASEAN lainnya, peranan BUMN juga cukup menonjol dalam perekonomian Singapura. Namun demikian, Pemerintah negara itu memperlakukan BUMN-nya lebih sebagai instrumen komersial yang *accountable*, dibandingkan dengan BUMN di negara-negara ASEAN lainnya yang lebih menonjolkan peranan sosial-politik yang mengabdi bagi kepentingan penguasa.

Kerja sama ekonomi regional di ASEAN menjadi terhambat karena masing-masing negara ingin melakukan swasembada di segalah sektor ekonomi berdasarkan kedua falsafah pembangunan di atas. Sementara itu, baik kualitas maupun tingkat harga barang impor dari sesama anggota, belum dapat menyaingi impor dari negara-negara di luar ASEAN. Keringanan tarif bea masuk dalam rangka PTA belum dapat mengalihkan konsumen untuk mengimpor dari sesama anggota ASEAN.

Dalam realita, perdagangan antarnegara ASEAN hanya didominir oleh pola perdagangan bilateral tradisional, antara Malaysia dengan Singapura serta antara Indonesia dengan Singapura karena posisi Singapura sebagai *entrepot*. Tabel 2 menunjukkan bahwa rasio antara ekspor dan impor antarlima negara-negara ASEAN terhadap seluruh ekspor dan impor mereka seluruhnya selama periode 1970-1989, adalah cukup tinggi. Rasio ekspor berkisar antara 16% (1977) dan 24% (1983) sedangkan rasio impor berkisar antara 13% (1974) hingga 21% (1983).

Namun, jika dikeluarkan nilai perdagangan yang melewati Singapura sebagai pe-

labuhan perantara (*entrepot*), rasio perdagangan antarsesama negara ASEAN adalah sangat rendah. Ekspor antara sesama negara ASEAN hanya berkisar antara 4% dari nilai ekspor mereka seluruhnya sedangkan impor berkisar 3-6%. Filipina mengutamakan perdagangan langsung dengan Amerika Serikat karena negara itu memiliki preferensi khusus yang tidak dimiliki oleh negara ASEAN lainnya.

Rendahnya perdagangan antarsesama negara anggota ASEAN sekaligus mencerminkan orientasi perdagangan luar negeri masing-masing negara yang langsung berhubungan dengan pasar internasional, di luar kawasan regional. Orientasi langsung itu terjadi baik pada pengadaan atau impor barang modal, bahan mentah serta bahan penolong maupun dalam pemasaran komoditi ekspor. Pemasaran minyak mentah dari Malaysia, Indonesia dan Brunei, misalnya, mengutamakan penjualan langsung ke negara lain di luar ASEAN daripada melalui pabrik penyulingan minyak mentah di Singapura. Penyulingan minyak di Singapura menggantungkan diri pada minyak mentah dari Timur Tengah.

Rendahnya lalu lintas perdagangan antar negara-negara ASEAN, juga mencerminkan kurangnya komplementaritas ekonomi mereka. Kurangnya komplementaritas itu bukan saja tercermin pada hasil sektor pertanian dan pertambangan. Semua negara ASEAN juga menghasilkan produk-produk yang hampir sama di sektor industri manufaktur: tekstil dan pakaian jadi, alat-alat listrik, komponen kendaraan bermotor.

Deregulasi Ekonomi di ASEAN

Penurunan harga komoditi primer dan peningkatan beban pembayaran hutang luar

negeri memaksa keempat negara-negara ASEAN di atas untuk mengubah strategi ekonominya. Strategi baru tersebut ditandai dengan adanya deregulasi yang meliputi semua aspek perekonomian, baik pasar faktor-faktor produksi maupun pasar, barang-barang serta jasa-jasa. Tujuan deregulasi adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional agar merangsang peningkatan tabungan nasional dan investasi swasta serta pengembangan ekspor komoditi baru industri manufaktur.

Berbeda dengan falsafah dibalik strategi yang sebelumnya, strategi baru itu mengurangi campur tangan Pemerintah dalam pengaturan perekonomian dan mengundang partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta. Deregulasi di ASEAN menyangkut tiga aspek. *Pertama*, membuka pintu pasar lebih lebar (*relaxation of barriers to market entry*). Kebijakan ini membuka kemungkinan bagi munculnya pendatang baru dalam sektor yang tadinya tertutup. *Kedua*, mengurangi campur tangan langsung Pemerintah dalam pengambilan keputusan dunia usaha sebagai upaya untuk mengalokasikan faktor-produksi. Di sektor perbankan, misalnya, Pemerintah semakin meniadakan pagu kredit, pengarahan penggunaannya maupun penentuan tingkat suku bunganya.

Aspek ketiga deregulasi ekonomi di negara-negara ASEAN adalah menjual saham BUMN pada pemodal swasta dan merasionalisir cara pengelolaan BUMN yang masih ada. Karena diatur dalam konstitusi, BUMN di Indonesia menduduki posisi yang lebih sentral dalam arti politik maupun ekonomi. Alasan nonekonomis seperti ini membatasi penjualan atau swastanisasi pemilikan BUMN. Namun demikian, munculnya pendatang baru di sektor ekonomi yang tadinya dicadangkan pada BUMN akan semakin me-

ngurangi peranan BUMN dalam ekonomi nasional. Sementara itu, persaingan pasar sekaligus merangsang BUMN untuk memperbaiki diri.

Perubahan cara dan penurunan tingkat proteksi komoditi impor merupakan bagian terpenting dalam deregulasi perekonomian di negara-negara ASEAN. Perlindungan berupa kebijaksanaan nontarif semakin digantikan dengan perlindungan berupa tarif bea masuk. Tingginya tarif bea masuk, struktur maupun *variance*-nya semakin dirasionalisir untuk menetralisir sistem insentif apakah untuk ekspor ataukah untuk dijual di dalam negeri. Struktur tarif bea masuk seperti itu memperbesar akses produsen di dalam negeri untuk mendapatkan barang modal, bahan mentah dan penolong dengan tingkat harga yang paling murah serta kualitas yang terbaik, dari berbagai sumber di seluruh dunia.

Adanya deregulasi perekonomian di seluruh negara anggota ASEAN telah meningkatkan keterkaitan ekonomi nasional mereka dengan pasar dunia. Ini tercermin dari peningkatan antara rasio ekspor dan impor mereka terhadap PDB nya masing-masing (Tabel 1). Semakin besarnya rasio ekspor dan impor terhadap PDB dan semakin besarnya peranan investasi swasta asing dalam pembelanjaan pembangunan nasional sekaligus meningkatkan keterkaitan industri keuangan dan pasar tenaga kerja nasional dengan pasar keuangan maupun pasar tenaga kerja dunia.

Deregulasi perekonomian nasional di antara negara-negara anggota ASEAN sekaligus semakin memungkinkan perwujudan cita-cita kerja sama ekonomi regional. Perwujudan cita-cita kerja sama ekonomi regional itu menjadi semakin didorong dengan keputusan politik untuk membentuk ka-

wasan "segitiga pertumbuhan" yang menghubungkan Kepulauan Riau, Singapura dan Johor. Kawasan seperti itu dapat diperluas di sepanjang Selat Malaka maupun di sekitar Laut Cina Selatan yang menghubungkan Indonesia-Malaysia dan Thailand. Falsafah di balik pembentukan "segitiga pertumbuhan" itu mengubah kedua falsafah dasar PTA dan AIJV. Perjanjian tersebut sekaligus mencerminkan kemajuan yang lebih jauh dalam deregulasi ekonomi di Indonesia. Berbeda dengan di wilayah Indonesia lainnya, perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Riau boleh memiliki saham 100%.

Pengurangan hambatan akan lalu lintas faktor-faktor produksi maupun barang-barang serta jasa-jasa di kawasan "segitiga pertumbuhan" akan semakin memungkinkan pembagian pekerjaan dan mempererat keterkaitan perekonomian ketiga negara tersebut. Singapura akan dapat menspesialisir diri dalam tahap desain, dalam industri yang memerlukan teknologi yang lebih canggih ataupun dalam industri jasa-jasa seperti perdagangan dan distribusi, transportasi dan komunikasi serta pusat industri keuangan regional. Industri manufaktur yang padat karya dialihkan ke Johor ataupun Kepulauan Riau. Selain itu, Kepulauan Riau dapat dikembangkan sebagai lokasi industri rekreasi bagi masyarakat Singapura yang sudah lebih kaya maupun turis asing yang berkunjung ke negara itu.

Satu-satunya potensi masalah regional dan internal dari "segitiga pertumbuhan" dalam masa yang akan datang adalah dalam hal pembagian beban biaya investasi dan "kue" yang tidak transparan di kawasan itu. Sepantasnya, Singapura ataupun MNC dimintakan untuk lebih banyak menanggung biaya investasi infrastruktur yang diperlu-

kan untuk mengembangkan Batam dan Singkep. Dengan demikian, sumber keuangan ekonomi Indonesia yang semakin terbatas dapat digunakan keperluan pembangunan di daerah lainnya yang semakin memerlukan perhatian. Perhatian tersebut, antara lain adalah untuk memerangi kemiskinan di Pulau Jawa dan membangun Indonesia Bagian Timur yang belum cukup menarik bagi investasi modal swasta.

Faktor-faktor Eksternal

Dalam masa mendatang, negara-negara ASEAN belum dapat mengurangi ketergantungan mereka pada sumber modal, tenaga kerja ahli maupun teknologi asing. Orientasi ekonomi mereka pada ekspor mencerminkan ketergantungan ekonomi mereka pada pasar ekonomi internasional, khususnya pada pasar Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Ada tiga perkembangan eksternal mengapa semakin diperlukan upaya untuk meningkatkan kerja sama regional di ASEAN untuk dapat memanfaatkan faktor produksi asing tersebut di atas. Ketiga faktor tersebut adalah perkembangan teknologi yang mendorong globalisasi produksi, perkembangan di pasar keuangan internasional serta perkembangan sistem perdagangan dunia. Tendensi di pasar keuangan internasional mencerminkan bahwa negara-negara ASEAN perlu mengurangi ketergantungannya pada sumber keuangan resmi. Di lain pihak, dengan memperbaiki iklim investasi, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan menurunkan biaya produksi, negara-negara ASEAN masih punya peluang besar untuk menarik pemasukan modal swasta asing.

Ketidakpastian dalam sistem perdagang-

an dunia memberi petunjuk akan perlunya peningkatan kerja sama ekonomi regional di ASEAN ataupun kerja sama subregional di Asia. Tujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi regional dan subregional itu adalah untuk meningkatkan investasi modal swasta dan perdagangan antara sesama ASEAN maupun dengan subregion lainnya di Asia.

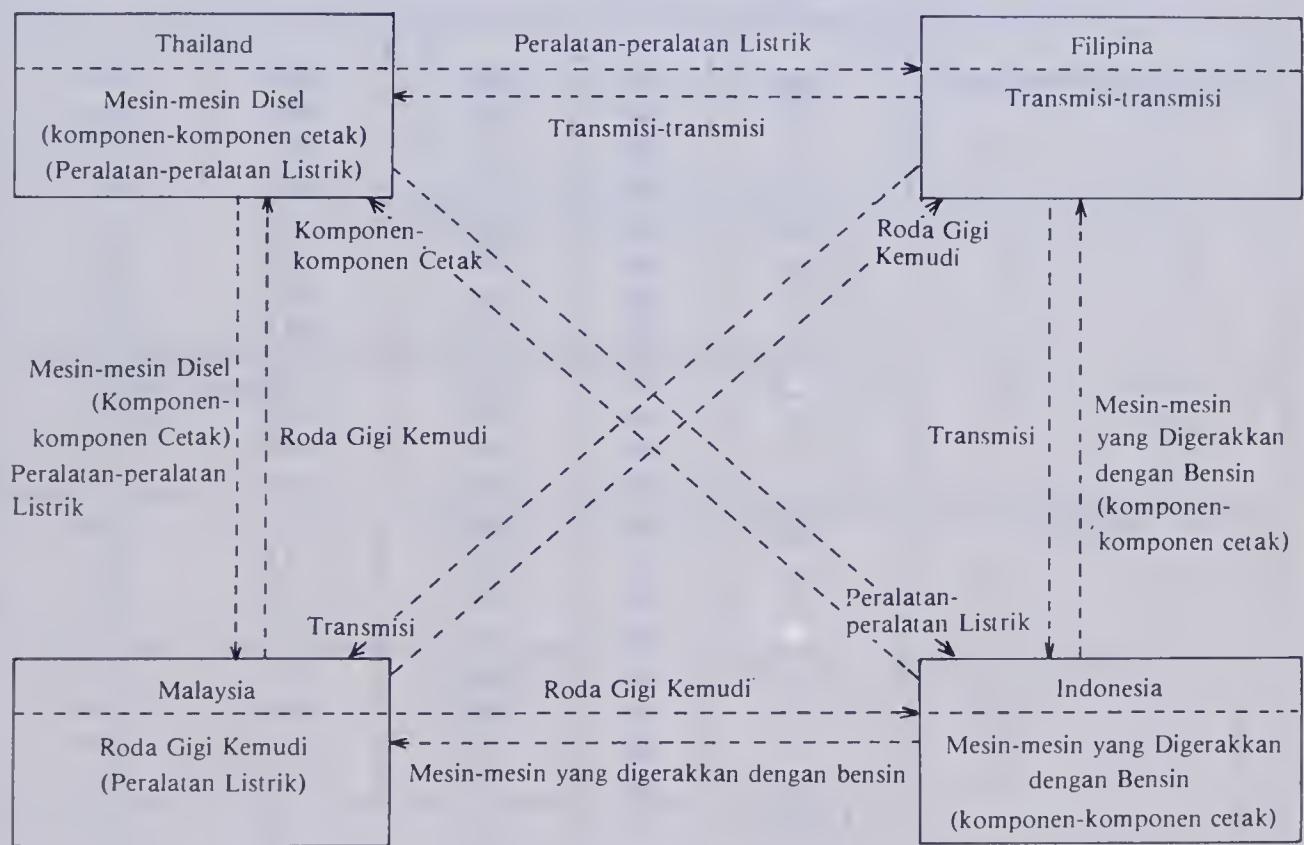
Globalisasi Produksi

Proses globalisasi produksi terutama didorong oleh adanya kemajuan pesat dalam teknologi produksi, telekomunikasi maupun transportasi. Perkembangan teknologi yang pesat itu telah memungkinkan dan mendorong disintegrasi vertikal proses produksi dalam industri manufaktur untuk menurunkan biaya produksi dan memanfaatkan skala ekonomi. Setiap tahap proses produksi dilakukan di berbagai pabrik yang berbeda yang terletak di berbagai lokasi, termasuk di manca negara. Pemilihan lokasi produksi tergantung pada proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing lokasi dan diperlukan untuk setiap tahap proses produksi itu.

Restrukturisasi industri di Jepang dan di negara-negara NICs di Asia Timur sejak pertengahan dekade 1980-an, misalnya, telah mendorong relokasi produksi industri padat karya dan padat bahan mentah ke wilayah-wilayah zona industri di Pantai Timur RRC dan ASEAN. Kedua kawasan yang disebut terakhir ini memiliki sumber tenaga kerja yang relatif murah maupun sumber daya alam yang memadai. Industri padat modal dan padat teknologi tetap berada di negara-negara Asia Timur. Walaupun produksi dilakukan di RRC dan ASEAN, namun, desain, pemasaran dan jasa-jasa lainnya tetap

Grafik 1

**SISTEM RESIPROKAL PRODUKSI KOMPONEN-KOMPONEN DI ASEAN
KASUS PABRIK TOYOTA**



Sumber: "Pasar Mobil di Asia dan Oseania," Toyota Motor Corp.

Tabel 3

DISTRIBUSI REGIONAL PENJUALAN DARI PERUSAHAAN JEPANG
(dalam %)

Industri	Wilayah	Tahun	Penjualan Domestik	Ekspor ke Jepang	Ekspor ke Negara Ketiga
Industri-industri Manufaktur	Asia	81	61,7	10,0	28,4
		84	63,9	12,3	23,8
		87	53,0	16,1	31,0
		90	63,7	15,9	20,4
	NIEs	81	51,1	12,6	36,3
		84	54,0	16,4	29,8
		87	45,6	19,7	34,7
		90	57,5	19,5	23,0
	ASEAN	81	79,6	5,5	15,5
		84	79,1	6,1	14,8
		87	66,2	9,6	24,2
		90	73,4	10,3	16,3
Tekstil	Asia	81	60,2	4,8	34,9
		84	62,3	9,0	28,7
		87	45,7	10,2	44,1
		90	71,1	14,2	14,7
	NIEs	81	41,6	7,5	50,9
		84	55,8	18,8	25,4
		87	39,5	11,0	49,6
		90	75,2	13,6	11,1
	ASEAN	81	73,4	2,8	23,6
		84	65,8	4,1	30,3
		87	58,7	8,4	32,9
		90	67,6	14,7	17,7
Bahan-bahan Kimia	Asia	81	82,5	10,1	7,4
		84	80,4	10,9	8,8
		87	82,7	4,0	13,3
		90	77,7	10,4	11,9
	NIEs	81	79,5	11,4	9,1
		84	72,0	15,5	12,5
		87	81,0	3,0	16,0
		90	73,3	12,3	14,3
	ASEAN	81	86,4	8,5	5,2
		84	89,6	5,7	4,7
		87	85,8	5,8	8,5
		90	85,3	7,1	7,5

Tabel 3 (*lanjutan*)

Industri	Wilayah	Tahun	Penjualan Domestik	Ekspor ke Jepang	Ekspor ke Negara Ketiga
Mesin-mesin Listrik	Asia	81	87,8	2,9	9,3
		84	66,3	3,2	27,5
		87	37,2	23,5	39,3
		90	36,6	27,5	35,9
Alat-alat Transportasi	NIEs	81	64,2	5,7	30,1
		84	29,2	7,3	63,5
		87	33,0	28,1	38,9
		90	37,1	30,4	32,6
	ASEAN	81	95,9	1,9	2,2
		84	89,9	5,5	4,6
		87	54,3	4,7	41,0
		90	34,9	17,5	47,6
	Asia	58,5	58,5	8,9	32,6
		84	19,7	30,6	49,8
		87	73,3	5,5	21,2
		90	91,8	1,7	6,5
	NIEs	81	68,9	8,3	32,8
		84	21,4	29,7	48,9
		87	53,7	9,1	37,2
		90	81,0	3,7	15,3
	ASEAN	81	0,0	100,0	0,0
		84	1,9	39,3	58,8
		87	89,7	2,5	7,8
		90	96,4	0,9	2,8

Sumber: Didasarkan atas "Basic Research on Business Activities Abroad," MITI.

Catatan: 10% atau lebih dari perusahaan-perusahaan Jepang yang disebutkan di sini dimiliki oleh firma-firma Jepang.

Tabel 4

**DISTRIBUSI REGIONAL PEMBELIAN KOMPONEN-KOMPONEN
OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN JEPANG**
(dalam %)

Industri	Wilayah	Tahun	dari Domestik	dari Jepang	dari Negara Ketiga
Industri-industri Manufaktur	Asia	81	42,3	40,6	17,1
		84	36,1	42,8	21,1
		87	42,0	47,2	10,8
		90	49,1	40,5	10,4
	NIEs	81	44,3	38,1	17,6
		84	31,2	41,4	27,3
		87	37,6	52,8	9,6
		90	51,0	40,0	9,0
	ASEAN	81	38,6	46,3	16,2
		84	43,1	44,8	12,1
		87	51,7	34,9	13,4
		90	45,9	41,2	12,9
Tekstil	Asia	81	38,4	29,4	32,1
		84	47,4	19,1	33,5
		87	43,3	14,8	41,9
		90	45,2	21,7	33,2
	NIEs	81	35,6	34,9	29,5
		84	38,0	22,6	39,4
		87	31,8	20,6	47,5
		90	62,1	5,6	32,2
	ASEAN	81	41,0	24,6	34,6
		84	51,1	17,7	31,2
		87	51,8	10,5	37,6
		90	25,4	40,4	34,2
Bahan-bahan Kimia	Asia	81	52,1	30,6	17,3
		84	27,6	15,9	56,5
		87	53,4	37,9	8,7
		90	56,2	34,6	9,2
	NIEs	81	68,8	22,7	8,6
		84	20,9	10,7	68,3
		87	42,0	47,9	10,2
		90	49,3	45,6	5,0
	ASEAN	81	27,5	42,2	30,3
		84	43,1	27,8	29,1
		87	80,7	14,0	5,3
		90	65,2	20,3	14,6

Tabel 4 (*lanjutan*)

Industri	Wilayah	Tahun	dari Domestik	dari Jepang	dari Negara Ketiga
Mesin-mesin Listrik	Asia	81	38,2	60,4	1,4
		84	31,3	64,8	3,9
		87	37,1	54,3	8,5
		90	42,1	46,3	11,6
	NIEs	81	70,7	26,6	2,7
		84	23,4	71,9	4,7
		87	37,8	53,9	8,3
		90	44,1	47,7	8,3
	ASEAN	81	33,0	65,8	1,2
		84	32,9	63,4	3,7
		87	33,6	56,5	9,8
		90	34,1	40,9	25,0
Alat-alat Transportasi	Asia	81	14,6	72,7	12,7
		84	56,2	41,5	2,3
		87	31,1	62,5	5,4
		90	58,8	40,8	0,4
	NIEs	81	14,7	72,5	12,8
		84	61,4	38,3	0,3
		87	33,8	62,0	4,3
		90	70,4	28,7	0,9
	ASEAN	81	0,0	100,0	0,0
		84	1,5	75,3	23,3
		87	26,6	64,3	6,9
		90	52,4	47,5	0,1

Sumber: Didasarkan atas "Basic Research on Business Activities Abroad," MITI.

Catatan: 10% atau lebih dari perusahaan-perusahaan Jepang yang disebutkan di sini dimiliki oleh firma-firma Jepang.

dikuasai oleh kantor pusat induk perusahaan di negara asal modal.

Orientasi pemasaran hasil produksi industri manufaktur oleh MNC di RRC dan ASEAN bukan saja ditujukan memenuhi keperluan permintaan pasar dalam negeri negara setempat. Pemasaran produk industri manufaktur dari kedua kawasan itu juga ditujukan pada pemenuhan pasar dalam negeri asal modal maupun ke pasar internasional di luar ASEAN dan Asia Timur. Peningkatan penanaman modal swasta dari Asia Timur ke RRC dan ASEAN telah sekaligus meningkatkan spesialisasi ekonomi masing-masing negara. Pada gilirannya, pembagian kerja dan spesialisasi ini telah meningkatkan perdagangan regional maupun subregional.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa melalui investasi modal swasta, telah terjadi pembagian pekerjaan regional dan subregional di ASEAN dan Asia Timur. Karena dominannya peranan modal perusahaan Jepang di kedua kawasan itu, maka dapatlah dikatakan bahwa poros penanaman modal swasta itu adalah modal swasta Jepang. Spesialisasi anarnegara di kedua kawasan tersebut semakin terangsang setelah adanya deregulasi perekonomian di negara-negara itu. Sebagai contoh, pembagian kerja regional, Grafik 1 menggambarkan pembagian pekerjaan antarpabrik komponen mobil Toyota di ASEAN. Tabel 3 menggambarkan orientasi pemasaran perusahaan Jepang di ASEAN dan Asian NICs dan Tabel 4 mencerminkan sumber pengadaan mereka.

Keadaan Pasar Keuangan Internasional

Keadaan pasar keuangan internasional yang semakin ketat memberikan pertanda

bahwa negara-negara ASEAN perlu memberikan perhatian bagi pemasukan investasi modal swasta sebagai sumber pembelanjaan pembangunan nasional mereka. Investasi modal swasta hanya tertarik untuk masuk ke suatu negara jika negara itu dapat meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksinya. Modal swasta asing tertarik untuk membeli surat-surat berharga (saham dan obligasi) milik perusahaan nasional jika ada keterbukaan dalam perusahaan yang mengeluarkannya. Perbaikan iklim investasi dan keterbukaan tersebut memerlukan perbaikan sistem hukum dan sistem akuntansi nasional.

Kesulitan ekonomi dalam negeri di negara-negara maju memberikan petunjuk bahwa kemampuan mereka untuk memberikan bantuan serta pinjaman lunak menjadi semakin berkurang. Sementara itu, kebutuhan dunia akan sumber dana seperti itu meningkat dengan cepat sehubungan dengan masalah hutang luar negeri negara-negara Amerika Latin, kesulitan ekonomi negara-negara Afrika, reformasi sosial di negara-negara komunis serta upaya perdamaian di Timur Tengah. Ini semua memerlukan pembelanjaan dalam jumlah besar dan prioritas tinggi bagi perdamaian dunia. Sebaliknya, stabilitas regional dan sukses pembangunan nasional negara-negara ASEAN, mengurangi kemampuan mereka untuk dapat memperoleh bantuan dan pinjaman lunak dari sumber resmi tersebut.

Sumber dana pinjaman dari bank komersial juga menunjukkan tendensi penurunan yang cukup drastis berkenaan dengan kesulitan yang dialami oleh bank-bank komersial di seluruh dunia. Kesulitan itu berkisar pada peningkatan kredit macet mereka, baik kredit pada pemerintah negara berkembang maupun kepada sektor swasta dan perorangan

an di dalam negerinya masing-masing. Erosi nilai modal mereka karena kemerosotan nilai saham mengurangi kemampuan mereka untuk memberikan kredit sehubungan dengan kewajiban untuk memenuhi *capital adequacy ratio* (CAR) yang mulai berlaku tahun 1992.

Sementara itu, pinjaman komersial yang terlalu besar dapat menimbulkan kesulitan bagi pengendalian moneter dan manajemen hutang luar negeri di negara peminjam. Pemasukan pinjaman komersil yang membengkak menghadapkan Bank Sentral pada dua pilihan yang serba sulit. Pilihan itu adalah menambah jumlah uang beredar atau menaikkan nilai mata uang nasional. Sementara itu, tekanan pada neraca pembayaran menjadi semakin meningkat pada saat pembayaran kembali hutang jangka pendek itu. Tekanan tersebut semakin besar jika pinjaman luar negeri jangka pendek tidak segera dapat menyumbang pada peningkatan efisiensi ekonomi nasional maupun pada peningkatan ekspor. Hal seperti ini dialami oleh Korea Selatan dalam awal dekade 1980-an maupun oleh Indonesia sejak tahun 1989.

Sistem Perdagangan Internasional

Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa Putaran Uruguay hanya mampu menghasilkan kesepakatan untuk mempertahankan stabilitas sistem perdagangan internasional yang berlaku dewasa ini. MEE dan Jepang akan bertahan pada posisi semula untuk mengurangi secara bertahap akan hambatan perdagangan dan subsidi pada produk-produk sektor pertanian. Hambatan perdagangan atas produk-produk pertanian, mungkin, akan digantikan dari sistem kuota dengan sistem tarif. Namun, tingkat bea masuk impor yang masih sangat

tinggi (sekitar 600-700%), membuat tidak adanya perbedaan yang menyolok antara kedua cara proteksi itu. Ini mencerminkan bahwa Uruguay Round belum berhasil untuk semakin mengurangi proteksi, bilateralisme dan regionalisme dalam sistem perdagangan internasional.

Proteksi yang semakin meningkat dalam dekade 1970-an dan 1980-an adalah terutama ditujukan bagi impor dari negara-negara Asia, termasuk ASEAN. Peningkatan proteksi itu menggunakan berbagai instrumen nontarif yang nontransparan. Sementara itu, regionalisme yang terpenting untuk di perhatikan adalah pasar bersama MEE dan blok perdagangan NAFTA yang merupakan pasar terpenting bagi ekspor komoditi non-migas Indonesia dan ASEAN. Bagaimana bentuk kebijakan perdagangan di kedua pasar terpenting itu pada tahun 1992, belum jelas hingga kini.

Menurut dugaan, negara-negara maju di MEE akan memberikan konsesi kepada negara-negara yang kurang maju seperti Italia Selatan, Yunani, Portugal, Spanyol dan Irlandia. Demikian pula dengan konsesi Canada dan Amerika Serikat kepada Mexico dalam rangka NAFTA. Dugaan akan adanya konsesi di MEE semakin beralasan karena adanya permintaan penundaan keikutsertaan penuh negara-negara terbelakang tersebut dalam EMS. Keikutsertaan mereka dalam EMS akan meningkatkan tingkat upah di negara-negara terbelakang itu dan membatasi kemampuan mereka menggunakan kebijaksanaan kurs untuk mempengaruhi daya saing komoditi ekspor.

Sementara itu, MEE juga akan memberikan konsesi perdagangan pada negara-negara Eropa Timur sebagai bagian dari kebijaksanaan mereka untuk membantu pro-

gram stabilitas dan rehabilitas ekonomi negara-negara tersebut. Tanpa konsesi seperti itu akan terjadi migrasi tenaga kerja secara besar-besaran dari bekas negara-negara komunis ke Eropa Barat yang didorong oleh alasan ekonomi. Komoditi ekonomi negara-negara terbelakang di MEE maupun dari bekas negara-negara komunis adalah merupakan substitut komoditi eksport dari negara ASEAN. Dengan demikian, konsesi-konsesi perdagangan seperti ini akan meningkatkan tembok proteksi di MEE sehingga mengurangi akses eksport nonmigas dari negara-negara ASEAN.

Bentuk Kerja Sama Ekonomi ASEAN

Sebagaimana telah diuraikan di atas, ASEAN tidak mungkin untuk membentuk suatu pasar bersama, seperti MEE, ataupun blok ekonomi yang bersifat *inward-looking*, seperti NAFTA. Namun demikian, ASEAN dapat melakukan kerja sama ekonomi yang bersifat *outward-looking*. Tujuan kerja sama regional itu adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi bersama dan merangsang spesialisasi serta pembagian pekerjaan antar negara yang sebenarnya telah dimulai oleh investasi modal swasta.

Melalui kerja sama regional, negara-negara ASEAN dapat mengkoordinasikan proses deregulasi ekonomi nasional, koordinasi penurunan tarif bea masuk maupun koordinasi peniadaan berbagai ketentuan lainnya yang menghambat lalu lintas modal, tenaga kerja serta perdagangan antar negara. Selain dari tarif bea masuk maupun quota impor, banyak sekali ketentuan-ketentuan teknis yang menghambat lalu lintas hubungan ekonomi antar negara. Peniadaan hambatan-hambatan nontarif itu memerlu-

kan harmonisasi kebijaksanaan di dalam negeri, seperti standar industri, pengaturan investasi maupun perpajakan. Contoh yang realistik adalah harmonisasi bentuk formulir bea cukai maupun mempercepat proses periksaan imigrasi ataupun menyempurnakan standar industri.

Untuk mempermudah koordinasi dan harmonisasi masalah-masalah teknis tersebut, staf Sekretariat ASEAN maupun komite-komite ASEAN perlu diperkuat dengan menarik tenaga-tenaga profesional. Sekretariat ASEAN dan komite-komite seyogyanya dapat melakukan analisa untuk mengidentifikasi masalah sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan. Analisa-analisa teknis seperti itu sebaiknya dilakukan oleh tenaga profesional yang mengetahui masalahnya secara mendalam, dan bukan oleh para diplomat ataupun oleh birokrat.

Kesimpulan

ASEAN tidak mungkin untuk membentuk pasar bersama yang bersifat *inward looking*. Namun demikian, dalam batas-batas tertentu, negara-negara ASEAN dapat meningkatkan kerja sama ekonomi untuk semakin memperbaiki iklim investasi di masing-masing negara anggota. Tujuan kerja sama tersebut adalah untuk menstimulir pembagian kerja dan spesialisasi produksi antarnegara anggota, yang sebenarnya telah mulai dirintis oleh penanaman modal swasta.

Melihat perbedaan tingkat industrialisasi di negara-negara anggota, diharapkan akan adanya peningkatan kemakmuran ekonomi bersama dari kerja sama ekonomi seperti

itu. Peningkatan kemakmuran ekonomi bersama itu adalah bersumber dari peningkatan lalu lintas perdagangan barang-barang maupun jasa-jasa serta faktor-faktor produksi, eksploitasi skala ekonomi dan dampak efisiensi. Penurunan biaya produksi melalui kerja sama ekonomi seperti itu akan meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN di pasar internasional. Peningkatan efisiensi sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan

ini bagi penanaman modal swasta.

Untuk mewujudkan kerja sama ekonomi regional itu, orientasi Sekretariat dan Komite-komite ASEAN perlu diubah dan personilnya perlu diperkuat dengan tenaga-tenaga profesional. Personil yang profesional itu diperlukan untuk menyusun agenda serta menyiapkan analisa bagi pengambil keputusan.

KEPUSTAKAAN

— Banks, Gary. *Trading Blocs in the Asia-Pacific Area*, Working Paper No. 90/1, Center for International Economics, RSPacS, ANU, Maret 1990.

Chen, Edward K.Y., et. al., *South China Economic Zones: Its Development and Prospects*. Paper untuk konferensi MITI/RI "Interdependence Among the Asian Economies." Tokyo, 12 November 1991.

Elek, Andrew. "The Challenge of Sia-Pacific Economic Cooperation." *Pacific Review* 4 (Juli 1991).

Hiemenz, Ulrich. *The Future of Asia-Pacific Economies - A View from Europe*. Paper disajikan pada konferensi New Delhi "The Future of Asia-Pacific Economies (FAPE IV)." 11-13 Maret 1991.

Imada, Pearl, ct. al., *A Free Trade Area: Implication for ASEAN*. Paper disajikan pada joint IPS-ISEAS "Round Table ASEAN Economic Co-operation in the 1990s." Singapore, 27-28 Juni 1991.

Nasution, Anwar. "Challenges of Macroeconomic Management in ASEAN Five." Laporan kepada UN-ESCAP/DPD, 12 Oktober 1991, tidak dipublikasikan.

-----, *The Future of Asian Developing Economies in the Changing International Economic Order*. Paper disajikan pada "Interdependence Among the Asian Economies." The International Trade and Industry of MITI, Tokyo, 12 November 1991.

Pangestu, Mari Elka, et. al., *Intra ASEAN Economic Cooperation: Is There A New Perspective?* Paper disajikan pada ASEAN and the Pacific Conference, Singapore, 2-3 September 1991.

Uryu, Fujio, et. al., *Japanese Trade and Direct Investment in East Asia - An Industry by Industry Analysis of Characteristics*. Paper disajikan pada konferensi "Interdependence Among the Asian Economies." The Research Institute of International Trade and Industry of MITI, Tokyo, 12 November 1991.

Yam, T.K., et. al., *ASEAN and Pacific Economic Co-operation*. Paper disajikan pada Workshop on ASEAN and the Pacific, Singapore, 25-26 Juni 1991.

ASEAN: Arah Perkembangan Masa Depan*

Suhadi Mangkusuwondo

Ringkasan

KENDATIPUN ada kemungkinan terjadi kemunduran-kemunduran, seperti resesi ekonomi dunia yang serius akibat tingginya harga minyak bumi setelah penyerbuan Kuwait oleh tentara Irak, yang diperburuk oleh gagalnya perundingan dagang GATT-Putaran Uruguay, tampaknya pasti bahwa proses globalisasi perekonomian dunia tak terelakkan. Tidak ada suatu negara atau kelompok negara pun dapat lepas dari perkembangan menuju saling ketergantungan ekonomi yang semakin besar dan karena itu semuanya harus menyesuaikan kebijaksanaan nasionalnya.

Dalam kerangka trend besar itu, ASEAN seharusnya mengubah tekanan strateginya, yang sejauh ini didasarkan pada pemikiran dan tujuan kemandirian kolektif (*collective*

self-reliance). Dalam strategi ini ASEAN telah mencoba, tanpa sukses, menghimpun kekuatan sumber dayanya dan saling berbagi pasar dengan maksud mendapatkan kemandirian yang lebih besar agar dapat lebih baik menghadapi ancaman-ancaman dari luar, seperti ancaman proteksionisme dan praktik dagang yang bersifat diskriminatif dari negara industri maju.

Strategi ASEAN bertahun-tahun selama ini harus diubah menuju usaha bersama untuk memperoleh keuntungan maksimal dari proses globalisasi ekonomi dunia. Penghimpunan sumber daya dan saling berbagai pasaran harus dilihat dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang demikian itu.

Dengan strategi semacam itu sukses atau kegagalan kerja sama ekonomi ASEAN seharusnya tidak lagi dinilai dengan lebih pesat berkembang atau tidak perdagangan dan investasi intra-ASEAN dibandingkan dengan perdagangan dan investasinya dengan negara luar ASEAN, melainkan diukur dengan keberhasilan ASEAN secara bersa-

*Diterjemahkan oleh Sunarto dari Mursito Daru Mursito dari makalah Suhadi Mangkusuwondo yang disampaikan dalam Konferensi Malaysia-Indonesia II di Hotel Rasa Sayang, Penang tanggal 11-14 Desember 1990.

ma-sama memelihara laju pertumbuhan ekonominya yang pesat dan meningkatkan peran dan pengaruhnya pada perekonomian dunia.

Performa di Bidang Kerja Sama Ekonomi

Para pengamat dan pejabat ASEAN tampaknya sepakat bahwa selama lebih dari 20 tahun kerja sama ASEAN prestasi yang telah dicapainya terutama adalah dalam bidang politik. Kerja sama ekonomi sejauh ini baru menunjukkan sedikit hasil-hasil yang nyata. Bahkan walaupun dalam ketentuan perdagangan preferensial ASEAN (ASEAN PTA) makin lama semakin banyak ditambahkan barang dalam daftar komoditi yang mendapatkan keringanan pajak impor, dan bahkan meskipun margin preferensi telah diperbesar secara bertahap, belum ada bukti mengenai dampaknya pada perdagangan antarnegara di ASEAN. Diantara negara-negara anggota ASEAN pada umumnya perdagangan telah mengalami perluasan, tetapi perdagangan antarnegara ASEAN sebagai bagian dari seluruh perdagangannya ternyata sedikit menurun selama 5 tahun terakhir.

Angka-angka yang terpapar dalam Tabel 1 memperlihatkan bahwa di semua negara ASEAN perdagangan dengan anggota ASEAN sebagai persentase dari seluruh perdagangannya antara tahun 1984 dan 1989 telah menurun (Singapura tidak disebutkan dalam tabel karena *IMF: Direction of Trade Statistics* tidak mencantumkan angka ekspor dan Singapura dengan Indonesia. Brunei Darussalam juga tidak disebut karena data-nya tidak lengkap). Selama periode itu Malaysia telah meningkatkan eksportnya ke ne-

gara-negara ASEAN secara berarti (dari US\$4.406 juta menjadi US\$6.385 juta), tetapi dalam persentase dari seluruh ekspor Malaysia telah menurun dari 26,6% menjadi 25,5%. Begitu pula, ekspor Thailand ke negara-negara ASEAN telah meningkat lebih dari duakali lipat (dari US\$1.030 juta dalam tahun 1984 menjadi US\$2.301 juta dalam tahun 1989), tetapi dalam persentase dari keseluruhan eksportnya menurun dari 13,9% menjadi 11,5%. Dalam hal impor pun terjadi hal yang sama. Semuanya ini telah berlangsung kendatipun ada pengaturan dagang preferensial diantara ASEAN.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa selama dekade terakhir telah ada perubahan yang jelas dalam struktur ekspor dan impor ASEAN. Bagian dari produk manufaktur dalam perdagangan antarnegara ASEAN secara pasti telah meningkat. Jika pada masa lalu perdagangan terutama terdiri dari bahan-bahan mentah, maka sekarang manufaktur merupakan bagian yang lebih besar; ini mencerminkan telah terjadinya perubahan struktur ekonomi di negara-negara ASEAN. Industrialisasi yang pesat telah berlangsung di negara-negara ini, sehingga menyebabkan berubahnya struktur ekspor dan impor. Apa yang dipaparkan Tabel 3 menunjukkan perubahan struktur ekspor dan impor Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya selama dekade terakhir. Bagian dari produk manufaktur dalam ekspor pada tahun 1979 baru 14,9%, sepuluh tahun kemudian telah mencapai 48,8%. Begitu pula, impor Indonesia dari negara-negara ASEAN pada tahun 1979 hanya 23,7% yang berupa manufaktur, tetapi sepuluh tahun kemudian meningkat menjadi 49,4%. Perubahan yang serupa dapat diamati pula pada negara-negara ASEAN yang lain. Maka tidak benar lagi kalau dikatakan bahwa ne-

Tabel 1

PANGSA PERDAGANGAN INTRA-ASEAN
(dalam Juta US\$)

		Ekspor		Impor	
		1984	1989	1984	1989
Indonesia	Dunia	21.881	21.936	13.880	16.467
	ASEAN	2.448	2.408	1.947	1.682
	Pangsanya	11,4%	11,0%	14,0%	10,2%
Malaysia	Dunia	16.563	25.049	14.057	22.588
	ASEAN	4.406	6.385	2.735	4.243
	Pangsanya	26,6%	25,5%	19,5%	18,8%
Filipina	Dunia	5.343	7.754	6.262	11.165
	ASEAN	517	529	780	1.121
	Pangsanya	9,7%	6,8%	12,5%	10,0%
Thailand	Dunia	7.414	20.028	10.415	25.296
	ASEAN	1.030	2.301	1.643	2.959
	Pangsanya	13,9%	11,5%	15,8%	11,7%

Sumber: IMF, Direction of Trade Statistics, 1990

Tabel 2

INDONESIA: PANGSA PERDAGANGANNYA DENGAN ASEAN
(dalam Juta US\$)

		1979	1984	1989
Ekspor:				
	Dunia	15.590	21.888	22.159
	ASEAN	2.229	2.487	2.429
	Pangsanya	14,3%	11,4%	11,0%
Impor:				
	Dunia	7.203	13.882	16.360
	ASEAN	839	1.948	1.765
	Pangsanya	11,7%	14,0%	10,8%

Sumber: Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Tabel 3

INDONESIA: PANGSA PERDAGANGAN MANUFAKTUR DENGAN ASEAN
 (dalam Juta US\$)

	1979	1984	1989
Ekspor:			
Jumlah	2.229	2.487	2.429
Manufaktur	332	710	1.186
Pangsanya	14,9%	28,6%	48,8%
Impor:			
Jumlah	838	1.948	1.765
Manufaktur	199	559	872
Pangsanya	23,7%	28,7%	49,4%

Sumber: Biro Pusat Statistik, Jakarta.

gara-negara ASEAN menghasilkan komoditas yang sama dan karena itu di pasaran dunia menjadi pesaing satu sama lain, sehingga peluangnya hanya kecil sekali untuk perdagangan antarnegara ASEAN. Sejalan dengan perkembangan ekonomi ASEAN, peluang untuk saling melengkapi diantara negara-negara itu meluas, khususnya dalam produk manufaktur, yang membuka peluang untuk semakin meningkatnya perdagangan antarnegara ASEAN di masa mendatang.

Banyak mata dagangan ekspor baru merupakan produk dari penanaman modal asing yang berasal dari Jepang dan NIB Asia Timur. Relokasi industri dari Asia Timur ke ASEAN telah mulai dalam tahun 1960-an. Akan tetapi, sementara pada awalnya industri-industri yang direlokasi kebanyakan memproduksikan mata dagangan bernilai

dan berteknologi rendah (seperti pakaian dan alas kaki), dan direlokasikan ke ASEAN karena potensi pasar negara tuan rumah maupun karena pembatasan kuota yang dihadapi oleh NIB di pasar utama AS dan ME, maka investasi baru tahun 1980-an menghasilkan produk-produk yang lebih canggih, seperti monitor komputer, *key board* komputer, dan suplai energi yang umumnya diorientasikan ekspor, memasok barang-barang untuk pasar ketiga, termasuk pasaran AS, ME, Jepang dan NIB Asia sendiri. Investasi yang datang dari Jepang dan NIB Asia telah sangat meningkat selama tiga atau empat tahun terakhir, yang menjamin bahwa ekspor manufaktur ASEAN akan terus tumbuh dengan pesat dalam beberapa tahun mendatang. Menarik untuk diperhatikan bahwa akses pada tenaga kerja yang murah dan sumber daya alam telah disebut oleh para investor sebagai faktor yang menarik di

ASEAN, tetapi tidak disebut-sebut ASEAN-PTA sebagai faktor daya tarik yang menyebabkan para penanam modal memilih ASEAN sebagai lokasinya.

Semuanya ini tidak berarti bahwa para pejabat ASEAN telah gagal melaksanakan pekerjaan rumah mereka. Mereka telah bekerja amat keras untuk membuat hasil, tetapi mereka seringkali dihambat oleh mandat yang diberikan oleh pemerintah mereka masing-masing. Hal yang paling mengecewakan ialah kalau, setelah perundingan yang panjang dan sulit, pejabat-pejabat itu sampai pada usul-usul yang mereka pandang sebagai berarti dan bahkan "berani dan inovatif", tetapi lalu pihak-pihak luar yang membaca laporan-laporan yang berasal dari pertemuan ASEAN kemudian memandang hasil-hasil itu sebagai terlalu kecil, dan meragukan tentang implementasinya, dan karena itu bersikap skeptis terhadap kemungkinan dampaknya bagi kerja sama ekonomi antarnegara ASEAN. Akan tetapi, penilaian yang jujur tentang penampilan ASEAN telah menyebabkan banyak orang berkesimpulan bahwa tidak banyak yang telah dicapai sejauh ini. Bahkan para pejabat pemerintahan pun seringkali sampai pada kesimpulan yang sama. Misalnya, Presiden Soeharto dalam pidatonya pada pembukaan Pertemuan Menteri-menteri Ekonomi ASEAN yang lalu (pertemuan AEM ke-22) di Bali secara implisit mengakui itu ketika beliau mengatakan bahwa dirasa perlu untuk "menciptakan suatu kerja sama ekonomi yang lebih berarti dan lebih efektif antar negara-negara ASEAN".

Bukti selama ini menunjukkan bahwa perdagangan antarnegara ASEAN meluas, tetapi hal itu sebagai bagian dari perluasan keseluruhan perdagangan yang telah berhasil dicapai oleh setiap negara ASEAN mela-

lui kebijaksanaan nasional mereka masing-masing. Jika perdagangan secara keseluruhan terus meluas, dapat diharapkan perdagangan antarnegara ASEAN juga akan meningkat, apakah ada pengaturan dagang preferensial ASEAN ataupun tidak.

Kebutuhan akan Pendekatan Baru

Para pejabat ASEAN sangat menyadari adanya perubahan-perubahan mendasar yang telah terjadi dalam arena politik dan ekonomi dunia. Pada umumnya ada kesadaran bahwa walaupun ada ketegangan di Teluk Persia setelah penyerbuan tentara Irak ke Kuwait, dan bahkan meskipun tidak ada kepastian mengenai hasil dari percobaan menuju pembaruan politik dan ekonomi di Uni Soviet dan Eropa Timur, namun trend umum dalam perkembangan global tampaknya bergerak menuju berkurangnya konflik politik dan militer.

Pada dasarnya, ASEAN lebih dari 20 tahun yang lalu diciptakan untuk mengurangi bahaya konflik-konflik potensial, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Sekarang, dengan prospek nyata terpecahannya masalah Kamboja dan pemulihian hubungan Korea Utara dan Selatan, maka bahaya konflik-konflik bersenjata tampaknya menurut. Sementara itu, Indonesia telah memulihkan dan Singapura memulai hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina, dan Presiden Soeharto pada awal bulan November 1990 telah melakukan kunjungan resmi ke Vietnam. Dengan adanya suasana baru seperti itu, di mana prospek perdamaian dan stabilitas jauh lebih cerah, tumbuhlah perasaan bahwa keberadaan ASEAN perlu diberikan landasan yang lebih kuat. Hal ini juga dirasakan dalam bidang kerja

sama ekonomi.

Banyak usaha telah ditempuh oleh para pejabat ASEAN selama bertahun-tahun untuk memunculkan ide-ide baru dan pendekatan-pendekatan baru menuju kerja sama ekonomi ASEAN. Usaha terbaru dilakukan pada Pertemuan Menteri-menteri Ekonomi (AEM) ASEAN ke-22, yang dilakukan di Bali pada tanggal 29-30 Oktober 1990. Pada pertemuan itu Indonesia, melalui menteri industriya Ir. Hartarto, mengusulkan suatu pendekatan baru, yang didasarkan atas pengalaman Indonesia sendiri dalam mengembangkan industrinya. Kerja sama ASEAN seharusnya tidak dimulai dengan liberalisasi perdagangan, melainkan dengan memberikan tekanan pada kerja sama dalam pembangunan industri serta investasi. Industri-industri tertentu yang mengolah bahan mentah yang tersedia di kawasan ini sebaiknya dipilih dan dikembangkan secara bersama, dengan partisipasi substansial dari sektor swasta. Industri-industri ini hendaknya menikmati akses preferensial ke dalam pasar ASEAN, dengan tujuan akhirnya adalah bebas mengalirnya produk-produk itu di dalam ASEAN. Secara bertahap, makin lama semakin banyak produk dapat dimasukkan dalam skema ini, sehingga akhirnya kelak bagian yang substansial dari produk industrial dapat bergerak bebas di kawasan ASEAN ini.

Gagasan membebaskan arus barang dan investasi secara sektoral ini barangkali tidak seluruhnya baru, karena suatu pendekatan sektoral menuju liberalisasi perdagangan adalah satu dari pilihan-pilihan yang pernah diperbincangkan dalam perundingan-perundingan sebelumnya. Tetapi gagasan Indonesia, yang biasanya dipandang sebagai negara yang paling *inward-looking* di antara anggota-anggota ASEAN ini, dapat

dilihat sebagai suatu terobosan. Meskipun demikian, sebagai satu kritik terhadap gagasan ini, implementasinya masih akan tidak praktis dan menghabiskan waktu berdasarkan pengalaman masa lalu. Usul itu adalah untuk mempromosikan industri-industri yang berbasiskan sumber daya alam, di mana negara yang miskin sumber daya alam seperti Singapura atau Brunei mungkin tidak akan tertarik. Premis dasarnya ialah bahwa ASEAN memiliki keunggulan komparatif natural dalam memproses bahan-bahan mentah. Akan tetapi, bahkan Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia pun mungkin tidak mudah menyetujui industri-industri mana yang seharusnya dimasukkan dalam skema ini. AEM ke-22 menyebutkan semen, pupuk dan pulp sebagai produk permulaan untuk skema ini, tetapi implementasinya mungkin membutuhkan waktu, dan perundingannya secara detail atas apa yang direncanakan mungkin akan berjalan lamban selama bertahun-tahun. Disamping itu, dari usul itu tidak jelas apakah tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan industri-industri untuk memenuhi keperluan pasar ASEAN, ataukah dimaksudkan untuk dieksport ke pasar internasional. Jikalau akhirnya akan gagal karena daya serap pasar ini terlalu terbatas. Oleh sebab itu, agar skema ini bisa berhasil, ia harus diorientasikan ke luar (*outward-oriented*). Dalam hal ini perlakuan preferensial hendaknya bersifat sementara, yang dibutuhkan hanya untuk pengembangan industri yang masih "balita", tetapi dalam hal ini secara regional dan bukan nasional.

Masalah lain yang berhubungan dengan itu adalah bahwa jika tujuan akhirnya untuk memungkinkan bebas bergeraknya barang dan investasi, walaupun atas dasar sektoral yang selektif, apakah itu tidak membutuh-

kan basis institusional atau legal yang lebih kuat? Sehubungan dengan itu layak diperhatikan bahwa AEM, dan AMM sebelumnya, telah sepakat untuk mengkaji lebih jauh usul yang diajukan Filipina mengenai kemungkinan mengadakan Perjanjian Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Treaty*). Suatu perjanjian yang secara hukum mengikat negara-negara anggota mungkin perlu sebagai prasyarat bagi jalinan ekonomi yang kuat, dan tentunya tak terelakkan jika yang dinginkan akhirnya ialah integrasi dari ekonomi ASEAN.

Pendekatan sektoral menuju kerja sama ekonomi ASEAN yang lebih erat memang bukanlah masalah substantif satu-satunya yang didiskusikan dalam pertemuan AEM. Sesungguhnya sejumlah keputusan telah diambil, antara lain:

- menggunakan segi tiga pertumbuhan antara wilayah Malaysia, Singapura dan Indonesia sebagai suatu model untuk memperkuat kerja sama ekonomi;
- menyetujui pembangunan Proyek Tambang Potassium ASEAN di Thailand yang berkapasitas satu juta ton setahun;
- menyetujui produk-produk tambahan sebagai produk AIJV;
- menetapkan tarif preferensial bersama yang efektif atas proyek-proyek AIJV antara negara-negara yang berpartisipasi;
- menetapkan tarif preferensial bersama yang efektif atas produk-produk terpilih: semen, pupuk, pulp;
- memperbesar lebih lanjut margin preferensi sampai 75% untuk mata dagangan yang lama dan sampai 50% untuk mata dagangan yang lama dan sampai 50% untuk mata dagangan baru;
- mengurangi mata dagangan yang ada dalam daftar perkecualian hingga 5%;

- mengurangi syarat produk kandungan ASEAN dari 50% menjadi 35% untuk 21 produk kimia.

Dan lagi, dengan rasa puas AEM menyatakan tercapainya kemajuan dalam penyiapan Tahun Kunjungan ASEAN 1992, dan penyelesaian Jaringan Kabel Serat Optik Bawah-laut.

Orang tidak dapat menganggap remeh persetujuan-persetujuan ini sebagai tak berarti karena sebenarnya semuanya itu amat berarti. Jikalau ASEAN terus-menerus bergerak ke arah yang sekarang, meskipun setiap kali berupa langkah-langkah kecil, sesungguhnya pada akhirnya akan sampai juga pada tujuan yang ditetapkan, yaitu kerja sama ekonomi yang lebih erat, atau bahkan suatu kawasan perdagangan bebas atau suatu kesatuan bea cukai dan akhirnya suatu pasar bersama. Masalahnya adalah berdasarkan pengalaman selama ini, jika ASEAN terperangkap pada metode dan cara kerja sama yang sekarang, maka akan diperlukan waktu lama untuk mengimplementasikan semuanya yang telah disetujui, dan timbul pertanyaan apakah ASEAN mau menanti demikian lamanya dan tidak ditinggalkan oleh perubahan-perubahan dunia yang cepat.

Itu merupakan satu alasan mengapa banyak orang berpendapat bahwa apa yang diperlukan ASEAN sekarang adalah suatu rangsangan atau dorongan baru yang dapat menghasilkan tindakan-tindakan yang "berani dan inovatif" dan membuat ASEAN bergerak lebih cepat menuju arah yang dinginkan. Mantan Menteri Luar Negeri Singapura, Rajaratnam, selama pertemuan meja bundar ASEAN keempat yang diselenggarakan oleh Institute of Southeast Asian Studies di Singapura awal tahun ini menyatakan bahwa kekhawatiran bersama-

lah yang menyebabkan berhimpunnya ASEAN, yaitu ketakutan akan komunisme ketika tentara AS mundur dari Vietnam. Lebih lanjut dikatakannya bahwa ASEAN merupakan suatu organisasi tanpa tujuan, dan bahwa ketakutan bersamalah yang pada pokoknya menghimpun ASEAN selama 10 tahun yang pertama. Sekarang dengan hilangnya ketakutan itu, maka ASEAN harus mendapatkan suatu fokus baru untuk mempertahankan kesatuannya. Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, pada pertemuan yang sama juga mengatakan bahwa harus ada suatu persepsi tentang ancaman luar yang sama-sama dirasakan oleh semua negara ASEAN.

Dalam bidang ekonomi barangkali masalahnya tidak segamblang seperti dalam bidang politik. Akan tetapi, di sini juga dapat dikatakan bahwa salah satu motif yang mendasari kerja sama ekonomi ASEAN adalah untuk menghadapi ancaman proteksionisme dan praktek-praktek diskriminatif lain dari negara-negara industri maju. Dalam suatu dunia yang didominasi oleh negara-negara industri besar, sangatlah wajar bagi negara-negara ASEAN untuk memikirkan penghimpunan sumber-sumber daya mereka dan saling membagi pasar mereka dalam rangka menjadi lebih mandiri. Gagasan pengaturan dagang preferensial regional ditelorkan dalam situasi seperti itu. Sekarang, lebih dari 20 tahun kemudian, banyak hal telah berubah baik di dalam negara-negara ASEAN sendiri maupun dalam kancah ekonomi global. Di sini, sebagaimana dalam bidang politik, mungkin dibutuhkan suatu renungan kembali dalam suasana yang telah banyak berubah. ASEAN perlu mendefinisikan kembali tujuan-tujuan ekonominya dan prinsip-prinsip maupun metode kerja sama ekonomi regionalnya.

Bertindak Secara Regional, Tetapi Berpikir Secara Global

Salah satu kesepakatan yang dicapai selama pertemuan AEM ke-22 adalah merekomendasikan untuk mengadakan Pertemuan Puncak ASEAN keempat dalam bulan Desember 1991 di Singapura. AEM juga menyetujui agar Pertemuan Puncak seyogyanya tampil dengan program-program baru yang bersifat substantif untuk memperkuat lebih lanjut kerja sama ekonomi ASEAN. Keputusan ini telah menimbulkan tekanan kepada para pejabat dan menteri-menteri untuk segera keluar dengan gagasan-gagasan yang substansial dan untuk menyiapkan *position papers* dan usul-usul untuk dipertimbangkan dan disetujui oleh kepala-kepala pemerintahan. Bagaimanapun juga kita tidak dapat meminta para kepala pemerintahan bertemu tanpa suatu harapan membuat keputusan yang penting. Oleh karena itu, barangkali sekaranglah waktu yang baik untuk melakukan suatu pemikiran kembali tentang kerja sama ekonomi ASEAN.

Satu masalah yang membutuhkan pemikiran kembali adalah mengenai dasar alasan kerja sama ekonomi ASEAN. Apakah yang menjadi tujuan kerja sama ekonomi ASEAN? Apakah benar-benar kita memerlukan pengaturan dagang preferensial? PTA ASEAN diadakan untuk mendukung industri-industri ASEAN dengan menyediakan pasar yang terjamin. Pada dasarnya kebijakan ini berorientasi *ASEAN-inward*: pasar ASEAN pertama-tama diperuntukkan bagi produk-produk ASEAN, dan produk-produk asing hanya boleh masuk jika ASEAN tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Ada juga suatu kekhawatiran bahwa industrialisasi di ASEAN akan dirintangi oleh negara-negara industri maju melalui cara pemberlakuan tarif tinggi mereka yang protektif maupun hambatan nontarif. Oleh sebab itu, penting sekali bagi ASEAN untuk membina ketahanan diri dan jangan terlalu

banyak tergantung pada pasar negara-negara ketiga.

Kelemahan mendasar dari alur pandangan ini ialah pertama, mengandaikan bahwa setiap negara anggota ASEAN bersedia berbagi seluruh pasar dalam negerinya dengan negara anggota ASEAN yang lain, suatu asumsi yang terbukti jauh dari realistik. Memang hal ini mungkin berubah bersama perkembangan waktu. Sangat mungkin terjadi bahwa pada suatu waktu di masa depan yang tidak terlalu jauh, masyarakat di ASEAN akan dapat menerima gagasan pembentukan pasar tunggal di ASEAN. Akan tetapi, untuk saat sekarang setiap negara ASEAN berkeinginan memperuntukkan pasar dalam negeri mereka bagi produk nasionalnya sendiri. Kedua, ukuran pasar ASEAN tidak cukup besar untuk menjamin pertumbuhan sektor industri yang efisien dan kuat. Kebijakan protektif ASEAN yang *inward-looking* kemungkinan akan melahirkan industri-industri yang tidak efisien, yang menikmati suatu pasar yang terlindungi tetapi yang tak sanggup bersaing dengan produk yang diimpor dari luar.

Oleh karena itu, pandangan ASEAN mengenai kerja sama regionalnya seyogyanya diubah dari bersifat *inward-looking*, atau secara potensial *inward-looking*, menjadi *outward-looking*. Kerja sama ekonomi seharusnya berorientasi pada pasar global dan bukan ke arah pasar intern ASEAN. Kerja sama perdagangan dan industri maupun kerja sama dalam bidang lain seperti perbankan, pariwisata, transportasi dan komunikasi seyogyanya dimaksudkan untuk memampukan ASEAN memperoleh keuntungan maksimal dari pasar dunia yang sekarang sedang mengalami proses globalisasi. Dalam konteks itu PTA ASEAN, AIJV, AIP dan sebagainya seharusnya tidak menjadi suatu tujuan tersendiri melainkan suatu alat untuk memperkuat ekonomi ASEAN, untuk memampukan ASEAN menang dalam persaingan di pasaran dunia.

Sekali prinsip ini diterima, maka ASEAN akan bergerak lebih cepat menuju tujuannya, yaitu kebebasan mengalirnya barang dan investasi dalam kawasan, dengan demikian mendorong tumbuhnya industri-industri yang berdaya saing internasional. PTA ASEAN masih dapat digunakan sebagai suatu instrumen, tetapi seyogyanya dihindarkan pendekatan produk demi produk. Sebagai gantinya, hendaklah digunakan pendekatan lintas sektoral atau setidak-tidaknya pendekatan sektoral, dalam meliberalisasi perdagangan antarnegara ASEAN; dan tujuan akhirnya adalah untuk memudahkan kelancaran integrasi perekonomian ASEAN ke dalam ekonomi global.

Satu pertanyaan yang perlu dijawab ialah akankah ada pendorong yang cukup kuat untuk menggerakkan ASEAN sehingga lebih cepat menuju integrasi ekonomi? Ada perasaan bahwa selama 10 tahun terakhir tampaknya ASEAN tidak mampu mengubah cara-cara dan metode kerjanya yang sudah mapan, yang berarti berproses lamban dalam kerja sama ekonominya antarnegara ASEAN. Bahaya dari sikap demikian ialah bahwa komitmen untuk memperkuat kerja sama ASEAN perlahan-lahan dapat melemah, dan dalam jangka lebih panjang ASEAN dibahayakan menjadi tidak relevan atau tidak bermanfaat lagi, sekurang-kurangnya sejauh menyangkut kerja sama ekonomi.

Kegagalan perundingan dagang Putaran Uruguay untuk mencapai kesepakatan pada sidang terakhirnya di Brussel (3-7 Desember 1990), dan bahaya matinya sistem perdagangan multilateral dan bermunculannya regionalisme, seharusnya menjadi sebab-sebab yang cukup kuat untuk mengguncang ASEAN agar bertindak. ASEAN harus menyadari bahwa selama dasawarsa terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi ASEAN yang relatif tinggi terutama didorong oleh perda-

gangan luar negerinya. Ekspor, khususnya manufaktur, merupakan lokomotif yang menarik ekonomi ASEAN maju. Jika perdagangan tersendat-sendat maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih lambat. Akibat gagalnya Putaran Uruguay akan berupa adanya tekanan-tekanan proteksionis yang tidak lagi dibendung oleh komitmen multilateral pada sistem perdagangan yang terbuka dan tak diskriminatif. Itu juga akan mendorong pembentukan dan penguatan blok-blok ekonomi regional. Kedua kecenderungan ini merugikan kepentingan-kepentingan jangka panjang ASEAN.

Kita ambil contoh kasus Indonesia. Strategi pertumbuhan berorientasi ekspor di Indonesia bertumpu di atas tiga pasar utama sebagai pembangkit tenaga, yaitu AS, ME dan Jepang dan akhir-akhir ini juga NIB Asia. Pada awal tahun 1980-an Indonesia berhasil keluar dari resesi dengan meningkatkan ekspor nonmigas secara substansial ke pasar AS, yang menjadi pengimbang bagi anjloinya ekspor minyak bumi secara tajam. Sebenarnya, selama bagian pertama tahun 1980-an ekonomi AS bertindak sebagai satu-satunya lokomotif bagi perekonomian seluruh dunia. Negara berkembang bukanlah merupakan pihak satu-satunya yang mengaitkan perkembangan ekonominya dengan meluasnya pasar AS. Jepang dan Eropa pun telah menikmati perluasan permintaan di pasar AS bagi ekspor mereka. Akan tetapi, pada pertengahan kedua tahun 1980-an Jepang mengubah pola pertumbuhannya dari bertumpu pada ekspor menjadi terutama berdasarkan pada meluasnya pasaran di dalam negeri. Impor Jepang meningkat secara tajam, termasuk dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ini diikuti oleh NIB Asia yang juga meningkat impornya secara substansial, sebagian akibat meningkatnya nilai mata uang mereka.

Akhir-akhir ini, Eropa Barat, menyongsong datangnya pasaran tunggal akhir tahun 1992, telah memperlihatkan penampilan ekonomi yang kuat, termasuk menguatnya kebutuhan impor. Selama beberapa waktu Eropa telah kehilangan pangannya dalam ekspor Indonesia, karena dilampaui oleh pangsa AS dan Asia Timur. Sekarang kecenderungan ini tampak berakhir, dan Eropa sekali lagi muncul sebagai salah satu pasar utama Indonesia. Ini merupakan perkembangan yang melegakan karena terjadi pada saat ketika pasar AS sedang melemah.

Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika Indonesia tidak terlalu ingin mempertimbangkan kemungkinan membentuk blok ekonomi regional yang terdiri dari Jepang, NIB Asia dan ASEAN (mungkin plus Australia dan Selandia Baru). Indonesia akan lebih senang mengaitkan perkembangan ekonominya dengan ketiga-tiga kekuatan ekonomi, AS, Jepang dan Asia Timur, dan Eropa Barat, daripada hanya bergantung pada satu pasaran, seperti misalnya Jepang.

Negara-negara ASEAN yang lain kurang lebih berada dalam posisi yang sama. Mereka semua mengandalkan perkembangan ekonomi mereka pada perdagangan dan mereka semua bertumpu pada pasaran utama ekspor mereka, AS, Eropa Barat dan Jepang. Jadi, kepentingan jangka panjang mereka ialah terus berlangsungnya sistem perdagangan internasional yang semakin terbuka dan tidak diskriminatif. Maka kerja sama di antara anggota-anggota ASEAN seharusnya menggunakan itu sebagai garis besar haluannya yang pokok.

Sebagai kesimpulan, ASEAN sedang menghadapi pilihan-pilihan yang sangat pelik di masa mendatang dekat ini, menyangkut arah perkembangan masa depan

nya. Satu tantangan besar datang dari kemungkinan perekonomian dunia, setelah gagalnya Putaran Uruguay GATT, terbagi dalam blok-blok ekonomi besar. Pembentukan suatu blok ekonomi Asia Timur, sebagai kekuatan pengimbang terhadap blok-blok Eropa dan Amerika, merupakan pemecahan terbaik yang kedua (*second-best solution*).

ASEAN seyogyanya tidak mentargetkan pemecahan terbaik yang kedua, melainkan pemecahan yang terbaik, yaitu bekerja sama, bukan hanya di dalam ASEAN tetapi juga dengan negara-negara sehaluan seperti Jepang dan NIB Asia, untuk menjaga dan memajukan sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan tidak diskriminatif.

Wawasan Bisnis Keturunan Cina ASEAN

Bob Widyahartono

DINAMIKA bisnis ASEAN, termasuk Indonesia, dalam dekade terakhir dan memasuki abad 21 yang disebut abad Asia Pasifik menarik perhatian kita. Lingkungan bisnis itu tidak hanya merupakan suatu rangkaian struktur, konsep-konsep organisasi yang berbeda dan praktik-praktek bisnis yang sangat mengakar. Tetapi terdapat juga dinamika kultural yang lebih mendalam mengenai sistemnya, yang pada gilirannya mempengaruhi seluk beluk perkembangan sektor bisnis ASEAN, termasuk Indonesia.

Masyarakat bisnis ASEAN menunjukkan dan masih mempraktekkan interaksinya yang sangat mempribadi (*highly personalised*), suatu ciri yang tampaknya juga terdapat di kebanyakan negara Asia. Sistem nilai utamanya adalah preservasi, termasuk penyelamatan "muka". Suatu kode tak tertulis berlaku dalam hubungan antara pelaku bisnis dengan pelanggan, antara atasan dan bawahan. Bentuk sopan santun dan saling menghormati berarti menjauhkan kritik pedas di hadapan orang banyak. Perasaan malu terbuka (*public shame*) dianggap suatu

hukuman berat. Dalam etos demikian, sikap terus-terang cara Barat "menyatakan apa adanya" jarang sekali muncul di permukaan. Persepsi bisnis yang mendasari interaksinya adalah berusaha untuk menjaga harmoni sosial. Hubungan kontrak tertulis sebagaimana lazimnya dipraktekkan dalam bisnis Barat, masih dianggap sebagai semacam pelengkap formal. Nilai-nilai tradisional masih banyak mendasari interaksi bisnis mereka.

Nilai-nilai "keras" Barat yang dipelajari dalam pendidikan formal tetap mereka seimbangkan dengan nilai-nilai "lunak" Timur. Pelaku bisnis Barat atau mereka yang telah banyak menimba konsep-konsep Barat seperti: ambisi, sikap agresif, prestasi, sukses, pengambilan resiko kompetitif, dan ketegasan kini pun masih harus dihadapkan dengan nilai-nilai tradisional yang mereka warisi seperti: kesetiaan, sikap mempercayai (*trust*), kerja sama, saling mengasihi (*compassion*), toleransi, dan menghargai "muka" orang lain sekalipun orang lain itu adalah pensuplai, pelanggan, atau bawahan dalam organisasi yang menyulitkan. Dalam

praktek bisnis, pelaku bisnis keturunan Cina ASEAN berusaha menemukan keunggulan dalam arti menjembatani pendekatan-pendekatan "keras" dan "lunak". Ini tidak berarti bahwa praktek bisnis mereka selama ini berlangsung dengan harmonis tanpa kelemahan atau kesalahan yang merugikan masyarakat luas.

Kelemahan dan kekurangan yang kadang-kadang tampak, disebabkan oleh kecenderungan ketertutupan dalam manajemen, dan ada sesuatu yang tidak diekspos secara transparan dengan dalih bahwa hal itu adalah strategi atau keunikan. Sikap demikian itu merupakan cermin perasaan kurang aman (*insecurity feeling*) dan takut disaingi atau kekurangmampuan dalam berkomunikasi secara sosial.

Meskipun demikian ada suatu unsur pragmatisme di kalangan pelaku mereka. Di

kalangan generasi tua ada yang berusaha mempraktekkan pepatah Cina kuno "Itikad baik menyuburkan itikad baik dan hal ini adalah baik bagi bisnis" (*goodwill breeds goodwill and can be good for business*), meskipun tak selalu berhasil karena pelaku bisnis banyak juga yang terpusat pada pikiran jangka pendek (*short term*).

HIPOTESA DAN VALIDITASNYA

Dalam menganalisis perilaku dan pola pikir (*mindscapes*) bisnis keturunan Cina ASEAN, sebaiknya kita tidak memiliki sikap praduga. Meskipun demikian, hipotesa dan pengujian serta argumentasi dari berbagai wawancara dan observasi memperlihatkan serangkaian karakteristik kultural yang melandasi wawasan bisnis keturunan Cina ASEAN sebagai berikut:

Hipotesa	Fakta dan Argumentasi/Alasannya
1. Strategi Bisnis	
Cenderung sangat mempribadi. Pilihan bidang usaha adalah oportunistik dan lebih banyak ditentukan oleh pemilik.	Benar. Tujuan strategis sangat mempribadi, meskipun belakangan ini tumbuh beberapa kelompok yang cenderung mengikuti logika industrial (<i>industrial logic</i>).
2. Perencanaan Korporat	
Pemilik kurang menyukai perencanaan korporat yang mereka anggap terlalu rumit.	Benar. Pemilik lebih menyukai pembuatan rencana sederhana atas dasar pemikiran <i>instant</i> dan bersifat jangka pendek.
3. Kontrol Operasional	
Kontrol operasional lebih banyak dijalankan menurut cara yang mempribadi daripada memakai sistem.	Benar. Kontrol yang mereka lakukan lebih banyak mereka kaitkan dengan sikap mempercayai (<i>trust</i>). Mereka lebih banyak memberi penilaian atas perilaku eksekutif mereka daripada hasilnya.
4. Delegasi Wewenang	
Secara formal ada, dalam praktiknya segala keputusan harus sepengetahuan atau dengan restu pemilik.	Benar. Pemilik dalam praktiknya lebih banyak melibatkan diri dalam hal-hal yang sangat rinci, karena mereka yang menentukan.

Hipotesa	Fakta dan Argumentasi/Alasannya
<p><i>5. Nepotisme</i></p> <p>Mereka lebih mendahulukan keluarga, meskipun secara profesional kurang mampu.</p>	<p>Benar. Bagi pemilik praktik bisnis merupakan keterkaitan keluarga yang erat (<i>tightly-knitted family organization</i>), yang dapat mentolerir kelemahan anggota keluarga.</p>
<p><i>6. Loyalitas</i></p> <p>Loyalitas pada pemilik memiliki bobot yang lebih besar daripada kecakapan profesional.</p>	<p>Benar. Bagi pemilik, eksekutif yang loyal berarti selalu bisa "bekerja sepenuhnya tanpa batas waktu".</p>
<p><i>7. Segmentasi Unit-unit Bisnis</i></p> <p>Unit-unit bisnis akan disegmentasikan demikian rupa sehingga bisa dikelola secara mandiri dan sumber dayanya bisa dialihkan dengan mudah antar bisnis (<i>across businesses</i>).</p>	<p>Kelompok-kelompok diorganisasi dalam unit-unit operasional yang otonom. Koordinasi sentral dilakukan oleh pemilik atau eksekutif pilihan menurut intuisi pemilik.</p>
<p><i>8. Interdependensi Manajemen</i></p> <p>Pemilik menghindari interdependensi manajemen antar bisnis (<i>across businesses</i>).</p>	<p>Kenyataan menunjukkan bahwa situasi berbeda dari hipotesanya. Banyak pemilik menganggap kalau lingkungan bisnis menguntungkan, mereka mempraktekan integrasi bisnis.</p>
<p><i>9. Penyebaran Resiko</i></p> <p>Mereka menyebar resiko dan mengelola aset-aset mereka sebagai satuan portfolio yang independen.</p>	<p>Benar. Derajat kemantapan stabilitas politik dan ekonomi mempengaruhi pola pikir mereka untuk menyebar resiko mereka dengan melakukan diversifikasi bisnis baik horizontal maupun vertikal (konglomerasi).</p>
<p><i>10. Kemampuan Mengelola</i></p> <p>Secara naluri mereka memiliki kemampuan manajerial, meskipun seringkali tidak didukung oleh pengetahuan konseptual.</p>	<p>Benar. Kenyataan ini merupakan produk lingkungan asal mereka, di mana pendidikan formal hanya mereka alami untuk sekadar mendukung praktik bisnis. Keadaan ini secara berangsur berubah dengan kesadaran bahwa berwirausaha harus berlandaskan pengetahuan (<i>knowledge base</i>). Karena itu generasi berikutnya mereka sekolahkan secara lebih baik.</p>

Tampaknya hipotesa dan validitasnya juga merupakan gambaran umum dari suku bangsa ASEAN lainnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa andaikata dilakukan riset yang komprehensif hasilnya akan tidak jauh berbeda.

S. Gordon Redding dalam bukunya *The Spirit of Chinese Capitalism* (1990) berpendapat bahwa *bisnis keluarga* adalah inti dan pusat kebanyakan pengusaha keturunan Cina di Asia (luar RRC). Terdapat beberapa pengaruh dasar dalam lingkungan dan buda-

ya yang diwarisi oleh para pemilik bisnis keluarga itu, meskipun sebagian sudah melangkah ke arah praktik berbisnis secara modern dengan mengakomodasi konsep-konsep manajemen modern baik dalam *marketing*, *finance*, *production* dan sumber daya manusia.

Pengaruh-pengaruh dalam lingkungan dan budaya yang diwarisi berupa: *Paternalisme* dan perasaan tidak aman (*insecurity*) yang bermuara pada praktik mempribadi (*personalism*) dan sikap defensif dengan jaringan kerja (*networking*) yang mempribadi (*personalistic networking*).

Sekalipun di permukaan tidak tampak pengaruh budaya yang diwarisi, namun *etika Konfusian* di kalangan pelaku bisnis yang tergolong tua (*old generation*) menjadi cermin bagi mereka. Yang jelas adalah Konfusianisme bukan agama. Bagaimana hakikat wawasan budaya Cina tentang kekayaan dan kemakmuran individual (menurut ajaran kuno Konfusius), yang meskipun dalam zaman modern telah mengalami perubahan dan tidak selalu dijadikan pedoman hidup individual?

Konfusius adalah Latinisasi dari nama Cina K'ung Tzu yang berarti Guru K'ung. Ia lahir pada tahun 551 SM di negara Lu yang sekarang bernama Ch'u Fu di Provinsi Shantung. Ia adalah pemikir orisinal tentang sikap atau perilaku yang tepat (*the right conduct*). Mengenai kaya atau kemakmuran (*wealth*) dan kehormatan (*honour*) dengan tegas ia nyatakan: "... Kemakmuran dan kehormatan merupakan hasrat setiap manusia. Tetapi kalau keduanya diperoleh secara tidak wajar, maka keduanya tidak patut dimiliki lebih lanjut. Tiada manusia unggul, kalau ia tidak memiliki perasaan sosial. ... Apa yang membuat seseorang unggul adalah pengembangan diri dengan wawasan mem-

bantu orang lain dan selanjutnya setiap orang (*self-cultivation with a view to helping others and further everybody*) ..." Wawasan ini pada dasarnya merupakan persepsi mengenai solidaritas sosial, meskipun tak terucapkan demikian.

Praktek bisnis sehari-hari menurut mereka yang tergolong generasi tua bisa digambarkan sebagai Konfusianisme dalam aksi (*Confusianism in action*), bukan Konfusianisme para birokrat dan intelektual petapa dan elit model kuno. Suatu rangkaian wawasan kultural yang mereka hayati sebagai landasan dalam kehidupan sosial dan ekonomi adalah: patuhi dan hormati ayah anda (*paternalism*); jangan langsung mempercayai setiap orang yang bukan keluarga, kecuali anda mengenalnya secara pribadi (*personalism*); dan sejauh mengenai kesejahteraan anda dan keluarga anda adalah mandiri (*on your own*). Prinsip-prinsip ini mengakar ke dalam jiwa (*psyche*) orang Cina. Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam masyarakat Cina terdapat pengertian yang mendalam mengenai sopan santun yang beradab, mengenai bagaimana harus berperilaku, dan bagaimana menjalankan peranan sebagai seorang yang dihormati.

Apa yang disebut sebagai "ajaran" Konfusius itu, kalau dilepaskan istilah-istilah Tionghoaanya, "ajaran" itu sesungguhnya telah pernah kita dengar di dalam alam pemikiran Indonesia -- khususnya alam pemikiran Jawa. Misalnya saja, ajaran "emasnya: tidak memperlakukan orang lain apabila Anda sendiri tidak ingin diperlakukan demikian ...". Ajaran ini mempunyai padanan yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu ajaran "Tepa Selira".

Di Muangthai juga terdapat semacam "kebijakan dan tenggang rasa yang memperkecil ketegangan suasana kerja dan mening-

katkan produktivitas dalam organisasi''. Sikap ini merupakan penjabaran dari *Kraeng-chai* yang berarti menghindari tindakan yang bisa menyebabkan sakit hati dalam pikiran orang lain. Berbagai eksekutif bisnis Muang-thai memanfaatkan sikap *Kraengchai* ini secara positif untuk memperkokoh etos kerja bisnis. Pada dasarnya masyarakat Muang-thai adalah *conflict-avoidance society* dan perilaku demikian berhasil menjadi landasan wawasan kewirausahaan mereka.

Di Filipina sekalipun masyarakatnya se-nantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari dunia Barat, seperti Spanyol dan Amerika, namun pada dasarnya terdapat perilaku khas yaitu *amor propio* (*self esteem*), *hiya* (*embarrassment*), *utang na loob* (*obligation*) dan *pakikisana* (*getting along together*).

Secara khusus *Pakikisana* mengekspresikan hasrat bangsa Filipina untuk hubungan interpersonal yang lancar. Ternyata pula masyarakat Filipino umumnya juga menjaga perasaan orang lain (tepa selira), bahkan sampai sejauh mengorbankan efisiensi kalau perlu, demi menghindari konfrontasi yang menyakitkan. Perilaku demikian ini sekali-pun tidak menonjol di permukaan tetapi sudah merupakan budaya dasarnya dalam interaksi personal.

Ajaran Konfusius yang terutama menyangkut bidang bisnis, menurut beberapa pengamat adalah ajaran tentang rumah tangga, keluarga dan kekeluargaan. Hal ini pun masih dapat dipersoalkan juga apakah ajaran ini unik dari Konfusius, atau sudah mengalami pula proses yang disebut domestifikasi (pribumisasi) di beberapa budaya di dunia ini. Misalnya saja, di Indonesia dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ini kita mempunyai asas keluarga dan kekeluargaan yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

Asas keluarga dan kekeluargaan tersebut menjadi sendi pokok dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

Di sisi lain kalau kita menelusuri sejarah dunia Barat, maka di dunia Barat juga dikenal adanya asas keluarga dan kekeluargaan khususnya pada masa asal mulanya era industrialisasi, bahkan hingga kini masih juga tampak sisa-sisanya. Misalnya, keluarga Rothschild, Krupp, Vroom, Dreesman, Ford, Rockefeller, Onasis, dan seterusnya. Dewasa ini sistem keluarga di Barat tersebut sudah makin berkurang, sebab sudah makin besar dan modern industri dan bisnisnya.

Sebagai kawasan (*region*) ASEAN mempunyai penduduk sebanyak 308 juta, yang hampir sama dengan Masyarakat Ekonomi Eropa dengan jumlah penduduk 320 juta dan lebih besar dari Amerika Serikat dengan jumlah penduduknya sebanyak 246 juta. Untuk lebih memahami potensi ASEAN kini dan masa mendatang, di bawah ini disajikan tabel yang merincikan jumlah penduduk, densitas penduduk, luas wilayah, Gross Domestik Bruto (GDP) dan pendapatan per kapita pada akhir tahun 1988.

Negara-negara anggota ASEAN memiliki satu kesamaan, yaitu keberadaan keturunan Cina yang kebanyakan berprofesi di bidang ekonomi atau bisnis. Yang menonjol adalah sekelompok kecil diantara mereka memperoleh sukses dalam bidang bisnis, sedangkan mayoritas dari mereka hanya berprestasi biasa-biasa saja dalam bidang bisnis yang mereka tekuni.

Disadari atau tidak, mesin-mesin pertumbuhan (*engines of growth*) ASEAN terutama terletak pada jantung bisnis. Sejak dekade 1980-an dan memasuki abad 21 kenyataan yang harus kita terima adalah bahwa bisnislah dan *bukan* negara (*nations*) yang

bersaing dalam pasaran domestik maupun internasional dan global. Tampak jelas lingkungan bisnis itu tidak hanya merupakan serangkaian struktur (*a set of structures*), konsep organisasi yang beraneka ragam dan praktek bisnis yang mengakar (*deep rooted business practices*).

Kota-kota ASEAN seperti Bangkok, Pulau Penang, Jakarta, Medan dan Surabaya, Manila, Brunei Darussalam, apalagi Singapura terdapat Pecinan (*China town*). Di negara-negara yang mayoritasnya Cina seperti Singapura (72%), hampir berimbang seperti Brunei (46,7%), cukup banyak seperti di Malaysia (35,5%), atau sekitar 9% di Muangthai -- pertumbuhan ekonominya sungguh mengesankan.

Banyak orang Barat dan sebagian Jepang beranggapan bahwa pelaku bisnis keturunan Cina ASEAN, yang pernah dan masih berinteraksi dengan mereka, adalah sangat dina-

mis, enerjik dan "jeli membaca angin atau peluang". Ungkapan ini, walaupun agak berlebihan, mencerminkan kenyataan seolah-olah keturunan Cina ASEAN dalam profesi bisnis demikian lenturnya berganti, tergantung pada pencapaian omset (*revenues*) dan uang tunai (*cash money*) yang masuk dalam laci mereka.

Dalam menelaah pertumbuhan bisnis keturunan Cina ASEAN S. Gordon Redding dalam bukunya *The Spirit of Chinese Capitalism* (1990) menguraikan bahwa bisnis keluarga (*family business*) adalah inti dan pusat kebanyakan bisnis mereka. Kalau ditelusuri lebih mendalam, maka terdapat beberapa pengaruh dasar dalam lingkungan budaya yang diwarisi oleh para pemilik bisnis keluarga itu. Meskipun demikian, sebagian sudah memasuki praktek berbisnis secara modern dengan mengakomodasi konsep-konsep manajemen modern baik da-

Tabel 1

- INDIKATOR ASEAN (1988)

Negara	Penduduk Juta Orang	Luas Wilayah Ribuan Km ⁸	Rata-rata Densitas Per Km ²	GDP US\$ Milyar	GDP Per Kapita US\$
Indonesia	175,2	1.919,0	92	83,2	440
Singapura	2,6	1,0	2.600	23,9	9.192
Malaysia	16,9	330,0	51	34,7	2.053
Muangthai	54,6	513,0	106	58,0	1.062
Filipina	59,9	300,0	200	39,2	654
Brunei Darussalam	0,3	5,8	51	3,4	22.000
	309,5	3.068,8	100	242,4	

Sumber: 1. *World Bank Report*, World Bank 1990

2. *Indonesia Menyongsong Perkembangan Asia Pasifik* oleh Hartojo Wignjowijoto (November 1990)

lam marketing, manajemen keuangan, produksi dan sumber daya manusia.

Yang masih sangat mengakar dalam pola pikir (*mindscapes*), terutama generasi tuanya adalah pengaruh lingkungan keluarga yaitu: Paternalisme dan perasaan tidak aman (*insecure feeling*) yang bermuara pada perilaku dan praktik berbisnis yang mempribadi (*personalistic*) dan sikap defensif dengan jaringan kerja (*networking*) yang mempribadi (*personalistic networking*), sekalipun sudah didukung oleh sarana teknologi elektronik komputer dan komunikasi seperti komputer, telex, facsimile.

Hubungan mempribadi atau dalam bahasa Cina Mandarinya disebut *Guanxi* dengan jaringan kerjanya yang mempribadi itu dilandasi dengan *shin yung* (sikap mempercayai atau *trust*) merupakan suatu keunikan tersendiri yang berlandaskan atas keluargaan. Pelanggaran janji tanpa alasan yang dapat diterima atau menyalahgunakan kepercayaan, mempersulit seseorang untuk dapat berbisnis dalam lingkungan tersebut. Awal setiap kontak atau interaksi bisnis keturunan Cina ASEAN biasanya dilandasi sikap dan pertanyaan "SIAPA pihak lain itu", dan baru kemudian "APA yang ingin dijadikan obyek interaksi itu "atau" *It is not WHAT business you are in, but WHO are you (do I know you or do you interact with someone you and I know in common)...*"

Sama seperti suku bangsa ASEAN lainnya, yaitu, mengutamakan hubungan internasional yang hangat dalam keluarga yang meluas ke dalam hubungan kekeluargaan dan banyak berorientasi pada kelompok. Dalam pada itu, orang-orang awam apalagi Barat menyebutkan bahwa keberhasilan keturunan Cina ASEAN dalam bisnis disebabkan oleh adanya berbagai tekanan dalam

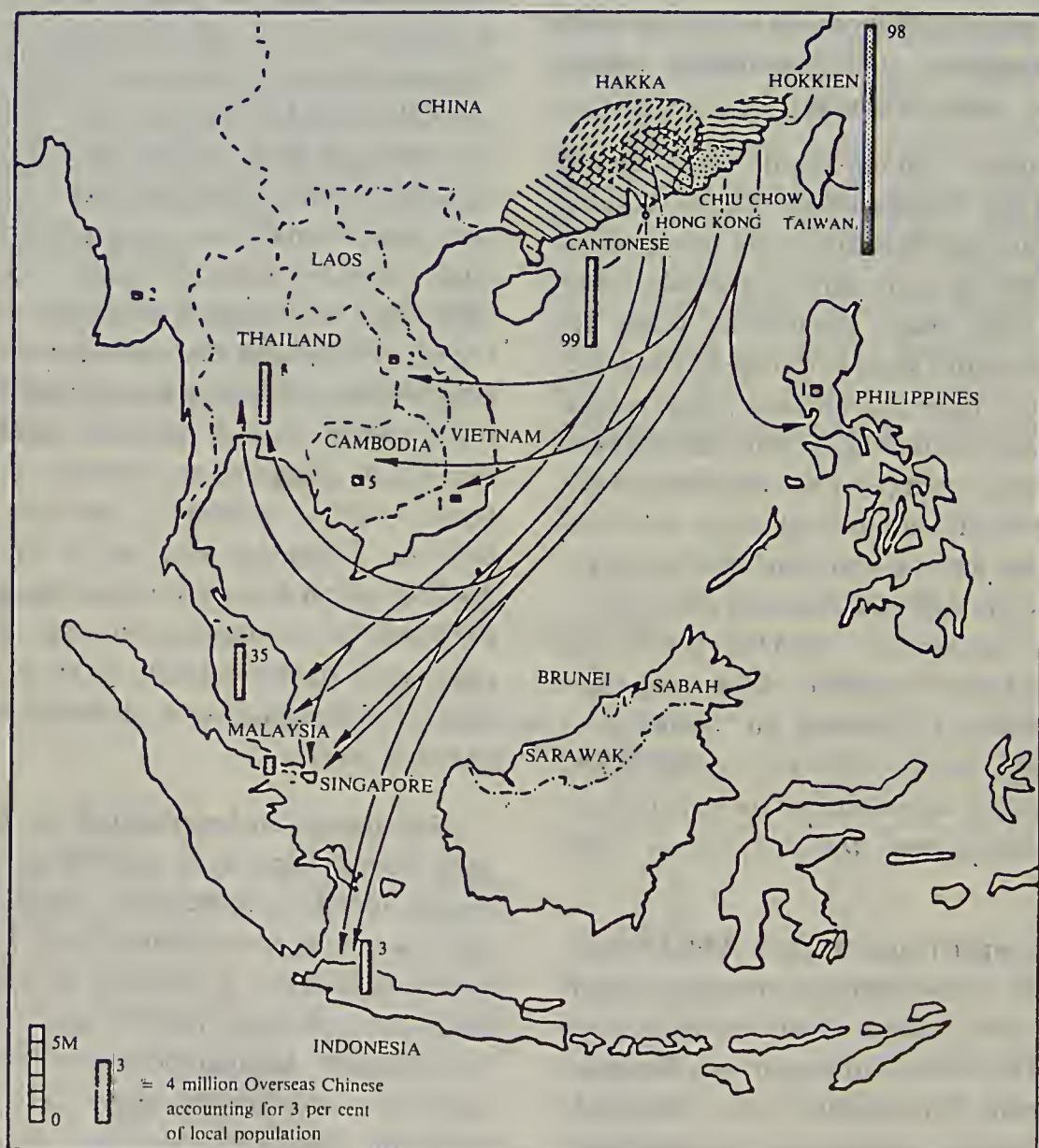
kehidupan di luar bisnis. Pandangan ini menyatakan bahwa justru karena hanya di bisnislah "kapling" mereka (diawali dengan berdagang eceran dan grosir), mereka meraup menjadi pengusaha yang mekar dan sukses. Fenomena ini tidaklah berlaku umum, karena banyak yang mengalami kegagalan juga akibat perkecokan di keluarga dalam mengelola bisnis.

Keluarga dalam konteks keturunan Cina, dapat dikatakan seperti dalam konteks bangsa Asia umumnya, adalah berbeda dengan keluarga Barat. Keluarga itu bukan hanya vertikal melainkan juga melebar horizontal dari keluarga dekat sampai yang agak jauh, bahkan sampai yang jauh sekalipun dan mencakup orang-orang yang sesungguhnya tidak terhitung keluarga tetapi terkait dengan salah satu anggota keluarga, misalnya karena perkawinan dengan salah satu anggota keluarga. Keluarga adalah lebih banyak suatu sistem kontak daripada suatu unit emosional sebagaimana terdapat di dunia Barat (*really a system of contacts, rather than an emotional unit as in the west*). Bahkan sistem kontak itu bisa meluas sampai kawan sekelas dan kawan sedaerah/kampung yang dipilih sebagai rekan berbisnis. Inilah mekanisme *guanxi* yang dilandasi sikap *shin yung*.

Wirausahawan keturunan Cina ASEAN yang berhasil dan terus tumbuh dalam bisnisnya adalah yang berhasil mendayagunakan *guanxi*. Ia menjunjung tinggi kewajiban-kewajibannya, ia seorang kawan yang baik, loyal, memiliki reputasi kejujuran dan bersikap adil, dan memberikan rekan bisnisnya porsi keuntungan sesuai kesepakatan meskipun tak tertulis. Meskipun ideal ini tidak selalu dianut dalam praktiknya, tetapi mereka sering bercermin pada sistem nilai atau *good conduct*.

Selain adanya sistem jaringan *guanxi* itu, mereka memiliki suatu sumber intelijen bisnis yang luar biasa (*a superb source of business intelligence*). Mereka selalu membicarakan bisnis di mana pun mereka berjum-pa, entah pada acara jamuān makan ulang tahun salah seorang anggota keluarga, acara perkawinan keluarga atau rekan bisnis, olah raga, di sela-sela nonton pertandingan olah

raga, mengantar anak sekolah, dan bahkan sewaktu bersama menikmati perjalanan wisata dalam maupun luar negeri. Kemampuan untuk menyerap informasi, sekalipun hanya sekilas saja didengarnya dan kemudian diolahnya, merupakan suatu "kejelian" yang bukan akibat sekolah formal yang tinggi, melainkan karena kemampuan unik untuk "mendengar", menyerap dan mengolah



Sumber: Pola migrasi historis orang Cina Perantauan dan perkiraan penyebarannya sekarang ini di sekitar Laut Cina Selatan.

suatu ide untuk kemudian di *follow-up*, atau menurut *feeling* atau "intuisi" sebagai tidak bisa dijalankan.

Sekalipun tampak menjadi karakteristik umum, tetapi realitas ini tidak berarti bahwa masyarakat keturunan Cina ASEAN adalah homogen. Perbedaan diantara mereka sendiri adalah mendasar, yang dapat ditelusuri dari berbagai asal mulanya generasi pertama sebagai pendatang pada abad-abad yang lalu. Banyak orang luar atau Barat beranggapan bahwa masyarakat emigran Cina yang keluar dari kampung halaman mereka ke wilayah Asia Tenggara antara kurun waktu awal 1800-an sampai pertengahan 1930-an adalah homogen. Hal ini *tidaklah benar* karena perbedaan-perbedaan diantara mereka dapat ditelusuri dari berbagai kelompok dialek bahasa seperti Hok-kian, Tio-ciu, Kanton, Hak-ka, Hainan dan Fu-chow, Hinghua, Hokcia dan dialek Wiajiangren (orang-orang dari propinsi tengah sebelah utara Guangdong dan Fujian). Lihat gambar.

Persamaan adalah bahwa emigran pertama yang berjumlah sekitar 4,8 juta orang meninggalkan Cina melalui pelabuhan-pelabuhan utama Xiamen (Amoy), Shantow (Swatow), Guangzhou dan Hongkong antara kurun waktu itu adalah: tidak berpendidikan, petani, buruh kasar tingkat rendah (tukang kayu, pandai besi, pekerja tambang) dan dengan perilaku kasar. Di negara tujuan, pergeseran lapangan kerja dari petani dan buruh kasar menjadi pedagang perantara (eceran) merupakan semacam rekayasa pemerintah kolonial setempat. Misalnya, pemerintah Inggris dan Belanda memberlakukan ketentuan bahwa para pendatang Cina generasi pertama tidak diberi hak untuk memiliki atau mengusahakan tanah. Untuk menjadi pegawai negeri pun mereka harus

melalui bermacam ragam ujian dan saringan birokrasi yang kompleks.

Di kalangan Cina ASEAN ada semacam anggapan bahwa mereka yang berhasil adalah yang mampu mempraktekkan *guanxi* dan *shin yung*. Dari pengamatan dan tukar pikiran dengan pengamat di beberapa negara ASEAN, dapat dikatakan bahwa kebanyakan pengusaha Cina ASEAN menjadi kaya dan makmur bukan karena membangun bisnis yang raksasa. Mereka menjadi kaya dengan meluaskan sistem jaringan *guanxi* dan dengan mendirikan banyak perusahaan.

Beberapa Catatan Akhir

Prestasi bisnis Cina ASEAN mulai dari yang kecil sampai yang besar, lebih banyak dikembangkan oleh sistem jaringan kerja *guanxi* dan *shin yung*. Suku bangsa ASEAN lainnya pun sesungguhnya memiliki sistem demikian itu, hanya tidak nyata dalam praktek bisnis sehari-hari.

Wawasan strategi dan operasi bisnis Cina ASEAN baik yang tampak secara eksplisit maupun implisit adalah:

- marjin keuntungan rendah dengan volume penjualan tinggi (*low profit but high revenue*) untuk memperoleh pangsa pasar (*market segment*) yang signifikan/mantap;
- strategi oportunistik dalam berbisnis dengan fokus jangka pendek;
- segala keputusan strategis, terutama dalam fungsi personalia (sumber daya manusia) dan fungsi *marketing*, berpusat pada pemilik atau lingkungan dalam/terbatas atau disebut *inner circle*;
- kalaupun organisasinya memiliki sistem

- manajemen dengan pola organisasi, sistem dan prosedur, diskripsi tugas dan wewenang yang rumusannya jelas, namun dalam prakteknya justru tidak transparan;
- kalaupun ada sistem kontrol secara tertulis, namun pemilik dan *inner circle* lebih banyak menerapkan sistem kontrol "tatap muka" yang berbeda dengan sistem kontrol eksplisit Barat;
- ketika tahap bisnis sudah menjadi makin formal dan profesional, maka yang tetap tampak adalah fungsi *marketing* dan keuangan tetap berada dalam tangan keluarga atau *inner circle*, yang belakangan ini terdiri dari anak, menantu atau ipar, pokoknya keluarga inti dan yang lebih mujur tingkat pendidikan formalnya dibandingkan generasi pemilik/pendirinya;
- fungsi administrasi/akunting boleh diserahkan kepada "profesional nonkeluarga" namun dengan petunjuk dan kontrol dari pemilik atau *inner circle*;
- kecuali di Singapura, pengembangan sumber daya manusia dengan kebijaksanaan dan program implementasinya belum dapat dikatakan konsisten, karena masih "tertutupnya" manajemen kebanyakan bisnis mereka;
- kebanyakan bisnis mereka seringkali adalah *low profile* dan seringkali berada dalam operasi bisnis yang tidak penuh glamour (*frequently in unglamorous business*).

Beberapa Kriteria Karakteristik Wirausaha ASEAN

Untuk memahami wawasan strategi bisnis ASEAN dan operasinya, diperlukan beberapa karakteristik bagi setiap wirausaha ASEAN baik keturunan Cina maupun dari suku lainnya. Ia harus memiliki kapasi-

tas untuk menumbuhkan *empathy* orang lain. Salah satu prioritas manajemen adalah pengarahan, pembinaan, pemberian nasihat dan pelatihan sumber daya manusia. Tekanan pada sumber daya manusia adalah pada potensi mereka sebagai manusia dan produktivitas mereka sebagai kawan sekerja atau karyawan. Wirausaha yang berwawasan strategis haruslah mampu menyelenggarakan manajemen yang berorientasi pada manusia. Ini berarti bahwa manajemennya haruslah dengan jalan "evolusi" dan bukan "revolusi" dan wirausaha ini haruslah dididik dalam disiplin manajemen, termasuk analisis finansial dan ketrampilan *marketing*.

Sama halnya dengan kebanyakan wirausaha suku bangsa lainnya, para wirausaha keturunan Cina ASEAN tidaklah demikian meremehkan pelatihan, meskipun dalam realitas sehari-hari mereka lebih suka menunda pelatihan itu bagi karyawannya karena alasan-alasan praktis.

Victor S. Limlingan dalam bukunya *The Overseas Chinese in ASEAN: Business Strategies and Management Practices* (1986) mengemukakan bahwa masa depan strategis bisnis dan praktek-praktek manajemen keturunan Cina ASEAN patut menjadi perhatian berbagai kelompok masyarakat ASEAN khususnya dan dunia umumnya. Salah satu kelompok ini adalah para pakar manajemen yang mengantisipasi munculnya kapitalisme manajerial di seluruh dunia (*world wide*), khususnya dalam perekonomian pasar bebas Asia Tenggara. Bagi para pengamat bisnis akan menarik sekali untuk melihat bahwa jiwa kewirausahaan bisnis keturunan Cina ASEAN yang dicirikan dalam keluarga juga meresap dalam perusahaan dan manajer profesional.

KEPUSTAKAAN

Chow How, Wee, Lee Khai Sheang dan Bambang Waluyo Hidayat. *Sun Tzu: War and Management*. Addison Wesley Publishing Co., 1991.

Effendy, Kemal & Eddy Soetriyono. "Dengan Jung Mereka Datang." *Majalah SWASEMBADA* (Februari 1989).

Gungwu, Wang. "China and the Chinese Overseas." *Times Academic Press* (Singapore, 1991).

Kasali, Rhenal. "Business Practice: Pengusaha Cina." *Majalah Manajemen dan Usahawan Indonesia* (Juni 1990).

Lassare, Philippe. "Corporate Strategic Management and the Overseas Chinese Groups." *Asia Pacific Journal of Management* (January 1988).

Limlingan, Victor S. "The Overseas Chinese in ASEAN; Business Strategies and Management Practices." Philippines: Vita Development Corp., 1986.

Lumbantoruan, Magdalena. "Manajemen Gaya Cina: Prinsip, Ciri dan Kelemahannya." *Majalah Manajemen IPPM* (1988).

Pye, Lucien. "Chinese Commercial Negotiation Style." *World Executive Digest* (May 1985).

Redding, S. Gordon. "The Spirit of Chinese Capitalism." *de Gruyter* (New York, 1990).

Sendut, Hamzah. John Madsen dan Gregory Thong. *Managing in a Plural Society*. Singapore: Longman Publishers Pte. Ltd., 1989.

Thong Tin Sin, Gregory. "The Management of Chinese Small Business Enterprises in Malaysia." *Asia Pacific Journal of Management* (May 1987).

Tsu-wee Tan, Thomas. *Your Chinese Roots: The Overseas Chinese Story*. Singapore: Times Books International, 1986.

Widyahartono, Bob. *Kongsi dan Spekulasi: Jaringan Kerja Bisnis Cina*. Jakarta: Grafiti Pers, 1989.

Widyahartono, Bob. "Kaya dalam Budaya Cina." *Majalah Warta Ekonomi* (29 Januari 1990).

Kebijaksanaan Teknologi untuk Pembangunan Ekonomi: Dapatkah Jepang Ditiru?*

Erman Aminullah

Pengantar

PERKEMBANGAN ekonomi suatu negara sering ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, di samping indikator lain seperti tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan. Ada dua sektor yang membentuk pertumbuhan ekonomi ialah sektor primer dan sektor nonprimer. Pergeseran sektoral ke sektor nonprimer, yaitu industri dan jasa, umumnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Pada awalnya, kepesatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh sumbangan yang besar dari sektor industri, setelah itu didukung oleh keduanya baik industri maupun jasa. Jadi, jelaslah peranan sektor industri adalah penting untuk pertumbuhan ekonomi.¹

*Sebagian besar dari tulisan ini berdasarkan laporan penelitian Erman Aminullah, *Technology Policy for Economic Development: Lessons from Japan* (Tokyo: The Japan's Institute of International Affairs, 1991), Research Report.

¹Di Jepang misalnya, sumbangan industri terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 61,5% dan sumbangan

Besarnya sumbangan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi itu sebagian besar dihasilkan oleh kemajuan teknologi, disamping sumbangan faktor masukan lain seperti kapital dan tenaga kerja. Pentingnya peranan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi itu sudah dibahas dan dibuktikan oleh beberapa hasil studi.² Dengan kata lain, tidak diragukan lagi bahwa kemajuan teknologi merupakan salah satu syarat penting untuk keberhasilan pembangunan ekonomi.

Hubungan antara kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi tersebut menjadi fokus tulisan ini. Meskipun kemajuan teknologi dapat dilihat dari berbagai segi, tulisan ini memusatkan perhatian pada cara

jasa sebesar 28,9% sebelum Perang Dunia II (1888-1938). Kemudian setelah Perang Dunia II (1955-1980), sumbangan jasa naik menjadi 44,9% dan industri tetap dominan yaitu sebesar 53,8%. Lihat Ryoshin Minami, *The Economic Development of Japan* (London: MacMillan Press, 1986), 116.

²Minami juga telah memperkirakan sumbangan teknologi terhadap pertumbuhan sektor industri di Jepang sebesar 41,6% (1908-1938) dan 58,3% (1956-1980). *Ibid.*, 105.

menguasai (memperoleh, mencerna, dan mengembangkan) teknologi. Lebih khusus lagi, mengenai langkah atau *kebijaksanaan* apa yang dapat diambil untuk mempercepat penguasaan teknologi.³ Analisis kebijaksanaan teknologi di sini memakai Jepang sebagai model dan mencoba menemukan faktor kunci yang mempengaruhi kemampuan teknologi Jepang. Analisis yang lebih dalam terhadap peranan sektor publik dalam pembangunan kemampuan teknologi di Jepang dirinci dalam bentuk kasus, sehingga diperoleh gambaran tentang dinamika dan dampak kebijaksanaan teknologi yang dibuat oleh sektor publik.

Kerangka tulisan ini adalah sebagai berikut: setelah bagian pertama sebagai pengantar, bagian kedua akan menjelaskan secara singkat proses dan kebijaksanaan umum pembangunan kemampuan teknologi di Jepang. Lalu bagian ketiga akan menguraikan unsur-unsur yang mempengaruhi kebijaksanaan teknologi di Jepang dilihat dari sektor publik dan swasta. Sedangkan bagian keempat menitikberatkan peranan sektor publik dalam pembangunan teknologi pada level industri melalui dua kasus, yaitu industri tekstil dan elektronik. Dan akhirnya ditutup dengan beberapa catatan kesimpulan untuk menerapkan kebijaksanaan teknologi berdasarkan pengalaman Jepang.

Proses Perkembangan Kemampuan Teknologi Jepang

Sebelum Perang Dunia II perkembangan kemampuan teknologi Jepang relatif sudah

³Pengertian kebijaksanaan teknologi di sini adalah keterlibatan sektor publik dalam sistem industri untuk meningkatkan kemampuan teknologi khususnya di sektor swasta.

maju. Hal tersebut ditunjukkan oleh penguasaan teknologi maju Jepang pada waktu itu. Jepang sudah menjadi pengeksport utama produk industri menengah seperti tekstil ketika masih pada awal tahun 1990-an. Pada tahun 1930-an, Jepang telah melakukau produksi massal untuk beberapa produk teknologi tinggi seperti pesawat terbang, kapal laut, mobil, dan mesin-mesin elektrik. Struktur industri tersebut telah diperkuat oleh produksi massal industri berat dan kimia, seperti besi baja dan petrokimia. Dengan kata lain, Jepang telah lama menguasai beberapa teknologi kunci untuk memproduksi barang-barang industri.⁴

Setelah Perang Dunia II fasilitas industri Jepang rusak berat. Tetapi Jepang cepat membangun kembali kemampuan industri-nya, yaitu dengan menetapkan prioritas pembangunan pada industri yang strategis. Pembangunan dipusatkan dalam industri berat (besi, kapal) dan industri kimia (petrokimia), disamping juga memberi perhatian pada industri permesinan dan mobil. Industri berat dan kimia kemudian kehilangan daya saingnya pada tahun 1970-an, khususnya setelah dipukul oleh krisis energi. Sejak itu, kebijaksanaan industri Jepang memperbarui prioritas industri strategis pada industri elektronik seperti komputer dan telekomunikasi. Ada beberapa pendapat tentang kriteria industri strategis tersebut.⁵

⁴United Nation Conference on Trade and Development (UNCTD), *Political for Transfer and Development of Technology in Pre-war Japan (1868-1937)* (UNCTD Secretariat, tanpa tahun), 3-34.

⁵Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) menetapkan industri berat dan kimia adalah strategis berdasarkan kriteria: produktivitas dan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang tinggi. Selanjutnya MITI menetapkan industri elektronik adalah strategis berdasarkan visi ke depan. Tetapi pakar ekonomi seperti Komiya melihat penetapan prioritas

Dilihat dari sudut tahapan inovasi teknologi, Jepang mengikuti pola umum yaitu: *inpor, sesuaikan, dan buat sendiri*.⁶ Yang paling penting dari tahapan tersebut adalah proses menyesuaikan teknologi impor dengan kebutuhan lokal. Pada awalnya, sektor publik berperan besar untuk proses penyesuaian teknologi yang dilakukan dalam lembaga penelitian dan laboratorium pemerintah. Teknologi yang telah disesuaikan ini kemudian disebarluaskan ke sektor swasta. Selanjutnya, hasil penyebarluasan teknologi tersebut merangsang sektor swasta untuk mengimpor dan menyesuaikan sendiri ke dalam proses produksi lokal. Kemudian, sektor swasta lah yang lebih berperan dalam proses penyesuaian teknologi. Dengan demikian tampak, bahwa peranan sektor publik di Jepang adalah sebagai pemrakarsa dan pendorong untuk penggunaan dan penyesuaian teknologi impor.

Dalam proses penyesuaian teknologi impor itu, sektor swasta di Jepang pada umumnya melakukan apa yang disebut *reverse engineering* terhadap teknologi impor, yaitu *membongkar, memperbarui sedikit, dan memasang kembali* teknologi yang telah dimodifikasi.⁷ Industri-industri di Jepang berha-

pada industri berat dan kimia tersebut lebih didorong oleh prestise industri sebelum Perang Dunia II, dan penetapan target pada industri elektronik lebih didorong oleh atensi masyarakat, bukan karena logika ekonomi. Lihat Ryutaro Komiya, "Introduction" dalam Ryutaro Komiya dkk. (ed.), *Industrial Policy of Japan* (Tokyo: Academie Press, 1988), 7-8.

⁶Ryozo Sato, "Nothing New? An Historical Perspective on Japanese Technology Policy" dalam Toshio Shishido dan Ryozo Sato (ed.), *Economic Policy and Development: New Perspective* (London: Auburn House Publishing Co., 1985), 309-311.

⁷Merton J. Peck dan Shuji Tamura, "Technology" dalam Hugh Patriek, *Asia's New Giant, How the Japanese Economy Works* (Washington: The Brooking Institute, 1976), 542-546.

sil menambahkan, meskipun sedikit, unsur baru pada teknologi yang sudah ada, sehingga mereka berhasil memperoleh hak paten terhadap teknologi yang dimodifikasi tersebut. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh hampir semua teknologi yang semula ditemukan di Barat telah diperbarui oleh Jepang, mulai dari teknologi mekanik dan elektronik seperti mobil dan alat-alat listrik, sampai pada teknologi elektronik sekarang. Bahkan Jepang berhasil menggabungkan teknologi mekanik dengan elektronik yang melahirkan mekatronik, seperti robot dan alat-alat kontrol numerik. Khusus dalam penguasaan teknologi elektronik dan mekatronik ini, faktor kemampuan *penelitian dan pengembangan* (R&D) industri lebih berperan daripada kemampuan 'konvensional' yaitu pembongkaran, pembaruan kecil dan pemasangan kembali.⁸

Melalui proses *reverse engineering* dan kegiatan R&D Jepang telah berhasil menguasai teknologi industri-industri strategis yang ditargetkan. Keberhasilan itu ditunjukkan oleh kemampuan memproduksi dan mengembangkan sendiri semua produk dari industri tersebut. Dan yang lebih menarik adalah Jepang tidak hanya mampu memproduksi dan mengembangkan produk tetapi juga sukses bersaing dalam pasaran internasional. Kesuksesan Jepang menguasai pasar jelas tergambar dari perubahan jenis dan jumlah ekspor produk industrinya.⁹ Melalui

⁸Berbeda halnya dengan teknologi niekanik, umumnya teknologi elektronik bisa rusak kalau dibongkar tanpa dukungan kemampuan R&D yang profesional.

⁹Sebelum Perang Dunia II, ekspor utama adalah tekstil dengan pangsa 66,3% (1921-1930) dari ekspor total. Setelah Perang Dunia II, ekspor utama adalah produk industri berat, permesinan dan kimia dengan pangsa 43,3% (1951-1960), 67,4% (1961-1970) dan 85,6% (1971-1980) dari ekspor total. Kemudian pangsa

penguasaan jaringan pasar, khususnya pasar ekspor, Jepang kemudian terus-menerus dapat memperbarui teknologi dari waktu ke waktu.¹⁰ Jadi, tampak bahwa pendekatan inovasi teknologi di Jepang tidak dapat dipisahkan dari proses umpan balik: teknologi produksi pasar teknologi. Perlu dicatat proses inovasi teknologi tersebut, khususnya setelah Perang Dunia II, umumnya dilakukan oleh sektor swasta.¹¹

Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Teknologi Jepang

Ada beberapa pendapat tentang keberhasilan Jepang dalam membangun kemampuan teknologi, khususnya teknologi industri. Pertama, keberhasilan itu disebabkan oleh peranan sektor publik yang lebih dominan. Hal tersebut ditunjukkan oleh penerapan kebijaksanaan industri nasional, di mana pemerintah Jepang melalui lembaga-lembaga industri, keuangan, dan perpajakan mengkoordinasikan industri-industri untuk men-

ekspor elektronik terhadap ekspor total meningkat dari 13,6% (1978) menjadi 24% (1987). Minami, *The Economic ...*, 227. Untuk elektronik, lihat Shigeru Itaya dkk., *A Case Study of Japan's Textiles and Electronics Industries* (Nagoya: Research Institute for International Relations, 1990), 168.

¹⁰Penjelasan pentingnya peranan pasar, baik yang diperoleh melalui prokuremen pemerintah maupun persaingan antarindustri, untuk pembaruan teknologi, lihat Fumio Kodama, "Demand Articulation: Targeted Technology Development" dalam Science and Technology Agency (STA), *NISTEP - Review 1* (Tokyo: NISTEP-STA, 1990), 62-68.

¹¹Pangsa sektor swasta dalam total (publik dan swasta) investasi R&D adalah 70% (1950-an), 71,6% (1960-an), 73% (1970-an), dan 78% (1980-an), Science and Technology Agency (STA), *Historical Review of Japan's Science & Technology Policies* (Tokyo: STA, 1990), 180.

capai target nasional.¹² Kedua, keberhasilan itu disebabkan oleh adanya persaingan di pasar, baik pasar domestik maupun internasional. Dengan kata lain, peranan sektor swasta dianggap lebih dominan untuk perkembangan teknologi dan kemajuan industri.¹³ Ketiga, keberhasilan itu tidak dapat dipisahkan dari kecepatan dan ketepatan reaksi sektor publik dan swasta menanggapi pengaruh eksternal terhadap sistem industri, misalnya reaksi pemerintah dan industri Jepang terhadap krisis energi tahun 1970-an.¹⁴

Ketiga faktor di atas: sektor publik, sektor swasta dan faktor eksternal sebagai sebuah sistem tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ada kerja sama yang harmonis antara dua unsur pokok, yaitu sektor publik dan swasta, dalam mengendalikan sistem industri di Jepang. Sistem industri tersebut bekerja untuk mencapai target nasional, mengendalikan ancaman pesaing dan menanggapi gangguan faktor eksternal.¹⁵ Kedua un-

¹²Keberhasilan sektor publik mengkoordinasi sektor swasta melalui kerja sama antara pemerintah dan kalangan industri dapat ditemukan dalam Chalmers Johnson, *MITI and Japanese Miracle, the Growth of Industrial Policy* (Stanford: Stanford University Press, 1982), et. passim.

¹³Komiya, "Introduction" dalam Komiya (ed.), *Industrial ...*, 7.

¹⁴Reaksi pemerintah Jepang terhadap krisis energi tahun 1970-an adalah mendorong industri untuk beralih dari teknologi padat energi (industri berat dan kimia) kepada teknologi hemat energi (industri elektronik dan telekomunikasi). Erman Aminullah, *The Inducing Power of Japanese Technological Innovation: An Empirical Analysis with Special Emphasis on Energy Crisis* (Saitama University: Unpublished MSc. Thesis), chap. IV.

¹⁵Tentang pendekatan sistem terhadap kebijaksanaan teknologi lihat Erman Aminullah, *Technology Policy for Economic Development: Lessons from Japan* (Tokyo: The Japan Institute of International Affairs, 1991), Research Report, 6-10.

sur pokok sistem dan interaksinya akan dijelaskan dalam uraian berikut.

Sektor Publik

Peranan sektor publik di Jepang dapat dikelompokkan menjadi dua segi, yaitu bersifat *katalis* dan *komplementer*. Peranan yang bersifat katalis adalah pemerintah berfungsi mempercepat proses peningkatan kemampuan teknologi swasta tapi tidak ikut investasi dalam bidang teknologi. Misalnya, bimbingan administratif dari MITI melalui jaringan formal dan nonformal berhasil mempengaruhi dan mendorong sektor swasta menuju target pemerintah. Sedangkan peran yang bersifat komplementer adalah pemerintah ikut serta dalam investasi di bidang teknologi untuk melengkapi kekurangmampuan sektor swasta, misalnya bantuan keuangan dan fasilitas R&D.

Bimbingan administratif dalam praktiknya di Jepang adalah pengaturan oleh pemerintah terhadap sektor swasta. Pengaturan itu biasanya dalam bentuk lisan atau catatan dari pejabat tinggi pemerintah. Meskipun pengaturan tersebut tidak mengikat secara hukum, namun sangat efektif untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah karena umumnya dipatuhi oleh sektor swasta. Biasanya penerapan bimbingan administratif dikaitkan dengan peraturan dan bantuan pemerintah yang lain.¹⁶ Misalnya, MITI memberikan bantuan keuangan (*research grant*) untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri elektronik pada tahun 1970-

an. Sebagai syarat dari bantuan tersebut, perusahaan elektronik yang saling bersaing harus bekerjasama dalam R&D guna menghadapi pesaing dari luar (khususnya IBM). Keberhasilan bimbingan MITI ini ditunjang oleh jaringan kerja sama antara pemerintah dan industri (lebih lanjut dalam III.2).

Keikutsertaan pemerintah dalam investasi langsung di bidang kerja sama R&D di atas adalah salah satu contoh peran yang bersifat komplementer dari pemerintah. Investasi yang bersifat langsung umumnya tampak dalam bermacam bentuk bantuan keuangan seperti keringanan pajak R&D, subsidi R&D, dan pinjaman lunak untuk R&D di dalam industri. Jumlah bantuan keuangan dari pemerintah ini relatif sangat kecil dan dari tahun ke tahun terus menuju.¹⁷ Dengan kata lain, pengembangan kemampuan teknologi di Jepang lebih mengandalkan kekuatan sektor swasta sendiri daripada bantuan keuangan yang bersifat langsung dari pemerintah.

Bantuan keuangan pemerintah dalam bentuk pajak, subsidi, dan pinjaman lunak tersebut diberikan untuk mendukung pencapaian tujuan tertentu. Keringanan pajak dalam bentuk keringanan tarif dan percepatan depresiasi barang kapital umumnya diberikan untuk meningkatkan impor teknologi, sedang pengurangan pajak diberikan untuk meningkatkan kegiatan R&D dalam industri. Selanjutnya, subsidi R&D umumnya diberikan untuk mendukung pengembangan teknologi strategis baik oleh sektor swasta maupun sektor publik. Kemudian pinjaman lunak umumnya diberikan untuk mendu-

¹⁶Takashi Wakiyama, "The Implementation and Effectiveness of MITI's Administrative Guidance" dalam Stephen Wilks dan Maurice Wright, *Comparative Government Industry Relations* (Oxford: Clarendon Press, 1987), 219.

¹⁷Pangsa bantuan pemerintah dalam investasi R&D oleh industri di Jepang adalah sebesar 5% (1960-an), 3% (1970-an) dan 2% (1980-an). Akira Goto dan Ryuhei Wakasugi, "Technology Policy" dalam Komiya, *Industrial*..., 191.

kung proses produksi dari hasil-hasil kegiatan R&D dalam industri.¹⁸ Dengan kata lain, ketiga bentuk bantuan keuangan itu saling melengkapi satu sama lain sesuai dengan tahapan inovasi teknologi di Jepang, yaitu impor teknologi (dengan pajak) \rightarrow R&D di dalam industri (dengan pajak/subsidi) \rightarrow produksi hasil R&D (dengan pinjaman lunak).

Investasi sektor publik yang bersifat komplementer tetapi tidak langsung meningkatkan kemampuan teknologi sektor swasta, ditunjukkan oleh pengeluaran publik untuk pembangunan prasarana teknologi dan kegiatan R&D sektor publik. Dalam hal ini prasarana teknologi mencakup sarana penelitian dan kelembagaan penunjang teknologi, seperti laboratorium penelitian milik universitas, lembaga nondepartemen, departemen dan perusahaan negara, dan lembaga paten serta standarisasi. Selanjutnya, secara kuantitatif jumlah investasi R&D oleh sektor publik itu relatif kecil dan terus menurun dibanding investasi R&D oleh sektor swasta.¹⁹ Khususnya aliran dana pemerintah tersebut sebagian besar pergi ke lembaga R&D di universitas, diikuti oleh lembaga R&D nondepartemen (*Science and Technology Agency*), kemudian lembaga R&D departemen (Seperti *Agency of Industrial Science and Technology* di bawah MITI). Dan hanya sekitar 1-2% saja dari dana pemerintah yang mengalir (dalam bentuk subsidi) kepada sektor swasta atau industri.²⁰ Dengan demikian semakin jelas, bahwa investasi teknologi oleh

¹⁸*Ibid.*, 190-196.

¹⁹Pangsa sektor publik dalam total (publik dan swasta) investasi R&D adalah berkisar 30% (1950-an), 28,4% (1960-an), 27% (1970-an) dan 22% (1980-an). Science and Technology Agency (STA), *Historical Review* ..., 180.

²⁰Lihat catatan kaki no. 17.

sektor publik adalah melengkapi dan bukan untuk menggantikan investasi teknologi di sektor swasta.

Sektor Swasta

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa kemampuan teknologi di Jepang lebih banyak bertumpu pada sektor swasta daripada sektor publik. Peranan sektor swasta dalam meningkatkan kemampuan teknologi dapat dijelaskan dari tiga faktor: kapasitas inovasi, persaingan, dan organisasi industri. Adapun faktor yang terakhir merupakan pintu masuk bagi keterlibatan pemerintah ke dalam sektor swasta. Berikut ini akan dijelaskan, bagaimana ketiga faktor itu berpengaruh terhadap peningkatan investasi teknologi di sektor swasta.

Kapasitas inovasi. Pada dasarnya kegiatan inovasi teknologi itu bersifat kumulatif, artinya semakin banyak kegiatan inovasi di dalam industri juga semakin besar kapasitas untuk melakukan inovasi berikutnya. Seperti telah disebutkan, pada umumnya proses inovasi teknologi di Jepang melakukan kegiatan *reverse engineering* yaitu membongkar, memperbarui dan memasang kembali teknologi yang diimpor dari Barat. Kegiatan inovasi demikian telah dilakukan oleh industri-industri di Jepang sejak seabad yang lalu. Akumulasi dari inovasi teknologi ini tercermin dalam perkembangan investasi R&D industri, jumlah peneliti dalam industri, dan jumlah paten yang dihasilkan kegiatan R&D dalam industri di Jepang.²¹

²¹Misalnya sampai pada tahun 1989 telah dihasilkan 262.200 paten, tersedia 868.700 peneliti, dan didukung oleh investasi R&D sebesar 10,6 triliun yen (di mana lebih 80% adalah pangsa sektor swasta). Management Coordination Agency, *Japan Statistic Year Book 1990* (Tokyo: Management Coordination Agency, 1990), 672-674.

Motivasi inovasi teknologi oleh industri di Jepang umumnya didorong oleh tiga faktor. *Pertama*, faktor pasar yaitu keinginan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, baik pasar domestik maupun internasional, disamping untuk memenuhi permintaan proyek-proyek pemerintah. *Kedua*, faktor persaingan yaitu keinginan untuk mengalahkan pesaing, baik dari dalam maupun luar negeri. *Ketiga*, faktor eksternal yaitu keinginan untuk meredam pengaruh faktor yang datang dari luar sistem industri di Jepang, misalnya krisis energi. Ketiga faktor keinginan tersebut kemudian diartikulasikan dalam bentuk investasi R&D untuk mewujudkan proses atau produk teknologi yang lebih inovatif.²²

Besarnya investasi R&D itu tergantung pada kapasitas inovasi yang ada sekarang, yang mencakup perangkat keras (peralatan R&D) dan perangkat lunak (kemampuan peneliti, penguasaan informasi dan kemampuan manajemen).²³ Pada umumnya industri besar memiliki sumber daya dan kapasitas inovasi yang lebih besar daripada industri menengah/kecil, sehingga industri besar cenderung memiliki investasi R&D yang besar, meskipun besarnya industri dan investasi R&D bukan jaminan untuk sukses dalam inovasi teknologi.²⁴

²²Kodama, "Demand Articulation ..." dalam *Science and Technology (STA), NISTEP ...*, 62-85.

²³Tentang peta kemampuan teknologi, di mana Jepang telah relatif unggul baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak (kemampuan sumber daya manusia, organisasi dan penguasaan informasi), lihat Asian Pacific Centre for Technology Transfer (APCTT), *Technology Atlas* (Bangalore: APCTT, 1988), 5 Volume, et. passim.

²⁴Sebagai contoh, pemimpin inovasi di bidang elektronik adalah Sony Corporation dengan melakukan investasi R&D 32 miliar yen pada tahun 1979. Sedangkan Matsushita Company perusahaan elektronik terbe-

Persaingan. Grup-grup industri atau konglomerat di Jepang hidup dan berkembang dalam suasana persaingan. Tidak ada konglomerat yang memonopoli satu jenis industri, sekurang-kurangnya lima atau lebih konglomerat bersaing dalam masing-masing industri.²⁵ Sebelum tahun 1970-an, pada umumnya persaingan antarindustri lebih menekankan pada harga produk yang murah, sehingga terjadi perlombaan investasi kapital untuk meningkatkan skala ekonomi dari industri. Kemudian sejak tahun 1970-an, persaingan antarindustri bukan hanya pada harga melainkan juga pada mutu produk, sehingga terjadi perlombaan investasi R&D untuk meningkatkan mutu produk industri. Bahkan pada beberapa industri sudah terjadi, bahwa nilai investasi R&D lebih besar daripada nilai investasi kapital.²⁶

Perlombaan investasi kapital dan R&D tidak hanya dimotivasi oleh kebutuhan pasar, persaingan, dan faktor eksternal, tetapi juga digerakkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Industri-industri besar, karena didukung oleh sumber daya -- teknologi, tenaga profesional, keuangan, informasi dan manajemen -- yang kuat, biasanya akan memanfaatkan kebijaksanaan pemerintah untuk menarik keuntungan yang lebih besar. Misalnya, perlombaan investasi untuk memper-

sar di Jepang mengeluarkan untuk R&D sebesar 43 miliar yen pada tahun 1979. Sato "Nothing New? ..." dalam Shishido (ed.), *Economic Policy ...*, 306.

²⁵Chalmers Johnson, "The Japanese Economy: Different Kind of Capitalism" dalam S.N. Eisenstadt dan Eyal Ben Ari (ed.), *Japanese Model of Conflict Resolution* (London: Kegan Paul International, 1990), 47.

²⁶Fumio Kodama, "How Research Investment Decision are Made in Japanese Industry" dalam *The Evaluation of Scientific Research* (Chichester: Ciba Foundation Conference, 1989), 201-214.

besar kapasitas produksi dalam industri pengilangan minyak (*oil refinery industries*) disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah, yang menetapkan kuota impor minyak men-tah berdasarkan kapasitas pengilangan dari masing-masing industri.²⁷

Perlu dicatat persaingan antarindustri yang tajam itu tetap dikendalikan oleh pemerintah. Mungkin keadaan ini dapat disebut sebuah 'persaingan yang terkendali'. Hal tersebut ditunjukkan oleh kebijaksanaan industri di Jepang yang mengendalikan efek negatif persaingan, yaitu kebangkrutan dan pertarungan yang mematikan industri. Untuk mengendalikan kebangkrutan, pemerintah berhasil mendorong penggabungan (*merger*) antarindustri. Dan untuk mengendalikan pertarungan yang mematikan, pemerintah berhasil mensponsori kerja sama R&D yang saling menguntungkan antarindustri.²⁸ Oleh karena kebijaksanaan ini bertentangan dengan Undang-undang Anti Monopoli di Jepang, maka pemerintah menggunakan instrumen kebijaksanaan yang tidak tampak (*intangible*) namun sangat efektif yaitu bimbingan administratif.

Organisasi industri. Dalam hubungan ini organisasi industri adalah struktur atau jaringan yang memberi bentuk pada industri di Jepang. Organisasi industri di Jepang juga berfungsi sebagai pintu masuk bagi keterlibatan pemerintah dan untuk membantu pe-

²⁷ Kotaro Suzumura dan Masahiro Okuno-Fujiwara, *Industrial Policy in Japan: Overview and Evaluation* (Australia-Japan Research Centre, Pacific Economic Paper no. 146, 1987), 30.

²⁸ Untuk merger lihat Akira Iwasaki, "Mergers and Reorganizations" dalam Komiya, *Industrial ...*, 497-511. Dan untuk kerja sama R&D lihat Martin Fransman, *The Market and Beyond, Cooperation and Competition in Information Technology Development in the Japanese System* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 278-283.

laksanaan kebijaksanaan pemerintah. Organisasi industri di Jepang dapat dilihat dari dua bentuk: struktur dan grup industri, dan jaringan perantara dalam industri.

Struktur dan grup industri adalah sebuah kesatuan. Hubungan antargrup industri umumnya membentuk struktur industri besar yang merupakan tempat bergantung bagi industri kecil dalam suatu sistem subkontrak.²⁹ Di sini hubungan antargrup industri diikat oleh sistem pemilikan saham antargrup (*interlocking shareholdings*).³⁰ Sistem ini membentuk jaringan komunikasi antargrup industri. Jaringan ini memudahkan pencapaian konsensus, misalnya konsensus antargrup industri untuk berpartisipasi dalam proyek kerja sama R&D yang disponsori oleh pemerintah. Demikianlah tampak bahwa struktur dan grup industri di Jepang mendorong ke arah inovasi teknologi.

Selanjutnya, keterkaitan industri besar dengan industri kecil secara sistem subkontrak mendorong industri besar untuk berkonsentrasi dalam *inovasi produk* yang akan disubkontrakan ke industri kecil. Sedangkan industri kecil terus-menerus melakukannya *inovasi proses* pengolahan sesuai dengan pesanan industri besar.³¹ Keterkaitan tersebut memungkinkan industri besar mendistribusikan gangguan eksternal kepada in-

²⁹ Lihat Daniel Okimoto, *Between MITI and the Market, Japanese Industrial Policy for High Technology* (Stanford: Stanford University Press, 1989), 39-42.

³⁰ Paul Sheard, *Intercorporate Shareholding and Structural Adjustment in Japan* (ANU, Australian Japan Research Centre, Research Paper no. 140), 16.

³¹ Inovasi teknologi di Jepang menekankan pada penyesuaian dan penyempurnaan teknologi proses secara terus-menerus, yang umumnya dilakukan di lantai produksi oleh industri menengah dan kecil. Ryokichi Hirono, *Factor which Hinder or Help Productivity Improvement, Country Report - Japan* (Tokyo: Asian Productivity Organization, 1980), 100.

dustri kecil. Dengan kata lain, industri kecil membantu industri besar untuk meredam gangguan eksternal, misalnya gangguan resesi akibat krisis energi tahun 1970-an. Industri besar dapat tetap melakukan inovasi produk, dengan meningkatkan investasi R&D seakan-akan tidak terpengaruh oleh resesi.³² Maka setelah resesi berakhir, industri-industri di Jepang telah siap untuk memasarkan hasil inovasi teknologi, yaitu produk yang lebih murah dan bermutu.

Kemudian, keberadaan jaringan perantara umumnya berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan kebijaksanaan teknologi. Ada dua bentuk jaringan perantara yaitu jaringan formal dan nonformal. Jaringan formal melalui perusahaan negara dan asosiasi industri, merupakan perpanjangan tangan sektor publik dalam pelaksanaan kebijaksanaan teknologi. Sedangkan jaringan nonformal melalui kelompok-kelompok (ikatan antarindividu) baik berdasarkan hubungan pekerjaan, famili, maupun sekolah, merupakan sarana komunikasi untuk mempermudah pencapaian konsensus antara sektor publik dengan sektor swasta.³³ Misalnya, keberhasilan MITI membangun konsensus proyek kerja sama R&D antarindustri elektronik swasta pada tahun 1970-an itu tidak lepas dari peranan NTT (perusahaan telekomunikasi milik negara) dan kerja sama nonformal antara pejabat MITI dengan pemimpin industri elektronik swasta.³⁴

³²Johnson, "The Japanese..." dalam Eisenstadt, *Japanese Model* ..., 48.

³³Perlu dicatat bahwa hubungan individual antara pejabat pemerintah dengan pemimpin perusahaan tertentu juga membuka kemungkinan korupsi struktural. Okimoto, *Between MITI* ..., 164.

³⁴*Ibid.*, 154. Lihat juga, Ira C. Magaziner dan Thomas M. Hout, *Japanese Industrial Policy* (Berkeley: Institute of International Studies, 1981), 104-105.

Kebijaksanaan Teknologi pada Dua Kasus Industri

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang bekerjanya kebijaksanaan teknologi di Jepang, berikut akan diuraikan keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan teknologi industri tertentu, yaitu industri tekstil dan elektronik. Fokus uraian akan diletakkan pada segi kebijaksanaan, langkah dan tindakan pemerintah dalam memperoleh, mencerna dan mengembangkan teknologi. Pembicaraan juga akan menyentuh segi-segi yang berkaitan dengan kebijaksanaan teknologi, yaitu pasar dan organisasi dari industri tekstil maupun elektronik.

Industri Tekstil

Industri tekstil telah memainkan peranan kunci dalam awal industrialisasi di Jepang. Hal tersebut jelas ditunjukkan oleh sumbangsih industri tekstil yang besar bagi perkembangan sektor industri keseluruhan.³⁵ Kemajuan yang pesat dari industri ini didukung oleh dua hal, yaitu penerapan teknologi dan persaingan antarindustri domestik. Penerapan teknologi maju ditunjukkan oleh kenaikan yang pesat dari stok kapital pada industri tekstil, khususnya untuk pembangunan industri-industri tekstil berskala besar. Dan persaingan yang tajam antarindustri ditunjukkan oleh perlombaan investasi dan jumlah industri tekstil yang terus meningkat.³⁶

³⁵Pangsa tekstil dalam nilai produksi real sektor industri pengolahan berkisar 25% pada tahun 1900-1930. Minami, *The Economic* ..., 133.

³⁶Untuk penerapan teknologi maju, lihat Minami, *The Economic* ..., 133. Dan untuk persaingan antarindustri, lihat Keijiro Otsuka, dkk. *Comparative Tech-*

Karena penerapan teknologi maju pada industri besar, maka produksi tekstil Jepang mampu bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai produksi domestik yang melebihi nilai impor pada awal tahun 1890-an. Selanjutnya, nilai ekspor telah melebihi nilai impor pada akhir tahun 1890-an. Ekspor tekstil sudah menjadi komoditi andalan pada tahun 1930-an, yaitu mencapai 60% dari total ekspor Jepang.³⁷ Dengan kata lain, sebelum Perang Dunia II, industri tekstil telah berhasil menerapkan teknologi maju baik untuk substitusi impor maupun untuk promosi ekspor Jepang.

Ada dua kebijaksanaan di balik cerita sukses industri tekstil Jepang ini, yaitu kebijaksanaan ekonomi umum dan kebijaksanaan teknologi. Kebijaksanaan ekonomi umum diarahkan untuk mencapai dan mempertahankan permintaan domestik yang tinggi. Akibat dukungan pasar domestik yang kuat, pada gilirannya Jepang sukses beralih dari industri substitusi impor ke industri promosi ekspor.³⁸ Sedangkan kebijaksanaan teknologi dikaitkan dengan dua segi yaitu pembangunan sumber daya manusia dan kegiatan R&D.³⁹ Dengan kedua segi yang disebut terakhir ini, Jepang telah berhasil meningkatkan kemampuan mencerna

nology Choice in Development, *The Indian and Japanese Cotton Textile Industries* (New York: Martin Press, 1988), 30-35.

³⁷ *Ibid.*, 134-135.

³⁸ Keberhasilan Jepang beralih dari substitusi impor ke promosi ekspor disebabkan oleh pasar domestik yang cukup untuk meneapai skala produksi yang besar. Kemampuan daya beli domestik yang kuat itu disebabkan oleh keberhasilan pembangunan di sektor pertanian, industri kecil dan perdagangan. Lihat Minami, *The Economic* ..., 134.

³⁹ *Ibid.*, 143.

dan mempercepat proses pendifusian teknologi impor.

Pertama, kebijaksanaan pembangunan sumber daya manusia adalah melalui perluasan dan pemerataan pendidikan tinggi, khususnya bidang keteknikan (*engineering*) berhasil menyalurkan tenaga profesional untuk kebutuhan industri, disamping meningkatkan jumlah latihan tenaga kerja di dalam negeri ataupun luar negeri.⁴⁰ *Kedua*, kebijaksanaan peningkatan kegiatan R&D adalah melalui pembangunan fasilitas R&D, baik oleh industri swasta maupun pemerintah. Kegiatan R&D pada awalnya diarahkan ke *penyesuaian teknologi impor* untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri domestik, kemudian dilanjutkan dengan *penyempurnaan teknologi impor* itu untuk peningkatan mutu produk industri. Kedua bentuk teknologi, baik yang telah disesuaikan maupun disempurnakan tersebut, kemudian *didifusikan* secara meluas di Jepang dengan bantuan pemerintah.⁴¹

Setelah Perang Dunia II, khususnya tahun 1950-an, industri tekstil tetap memegang peranan penting, seperti ditunjukkan oleh pangsa ekspor tekstil Jepang yang tetap besar. Tetapi, sejak tahun 1960-an daya saing industri tekstil mulai tumpul karena berbagai faktor dari dalam maupun luar Jepang. Faktor yang berasal dari dalam adalah meningkatnya upah buruh sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Jepang yang pesat, serta kenaikan nilai mata uang yen pada tahun 1971, 1973, 1978 dan 1985. Sedangkan

⁴⁰ Science and Technology Agency (STA), *Historical Review* ..., 21.

⁴¹ Untuk penyesuaian teknologi impor, lihat Otsuka, dkk., *Comparative Technology* ..., 30-35. Tentang peranan pemerintah dalam difusi teknologi tekstil, *ibid.*, 22. Untuk penyempurnaan teknologi impor oleh industri tekstil Jepang, lihat Hayashi, *Project on* ..., 44.

faktor yang berasal dari luar adalah meningkatnya daya saing negara-negara industri baru (NIB) dan ASEAN.⁴²

Dengan melemahnya permintaan pasar internasional terhadap tekstil Jepang, maka industri tekstil mengalami tiga masalah, yaitu lemahnya daya saing, kelebihan pengadaan dan terancam bangkrut. Sebagai jawaban atas masalah ini pemerintah Jepang mendorong dan membantu industri, baik secara finansial maupun administratif, untuk mengambil langkah-langkah: modernisasi peralatan, penyesuaian kapasitas, dan pengembangan organisasi industri tekstil.

Pertama, modernisasi peralatan industri dan inovasi produk tekstil untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produk tertentu, misalnya polyester, sehingga mendapatkan kembali daya saing di pasar internasional. *Kedua*, penyesuaian kapasitas industri, dengan menyediakan dana pembuangan (*scrapping*) kelebihan kapasitas, untuk mengembalikan keseimbangan antara permintaan dan pengadaan terhadap tekstil. *Ketiga*, pengembangan organisasi industri untuk mencegah kebangkrutan melalui: (i) penggabungan (*merger*) antarindustri; (ii) pindahan tempat pijakan ekspor (relokasi pabrik) ke negara-negara berkembang berupah murah; dan (iii) diversifikasi teknologi (misalnya bioteknologi -- pengembangan obat kanker 'interferon' oleh Toray Company).⁴³

Di tingkat industri ada dua faktor penting yang berkaitan dengan kebijaksanaan diversifikasi teknologi di atas, yaitu visi dan

⁴²Hirono, *Factors which ...*, 63.

⁴³Untuk tinjauan lebih lanjut, lihat Ippei Yamazawa, "The Textile Industry" dalam Komiya, *Industrial ...*, 401-403. Tentang diversifikasi teknologi, lihat Fumio Kodama, "Technological Diversification in Japanese Industries," *Science*, 1986 (Vol. 233): 294.

komitmen para industrialis Jepang. *Pertama*, visi para industrialis Jepang umumnya dipengaruhi oleh insinyur, di mana sebagian besar dewan direktur perusahaan berlatar belakang pendidikan keteknikan atau insinyur, sehingga pemecahan masalah dalam bisnis muncul dalam bentuk teknis keilmuan, seperti kegiatan R&D untuk diversifikasi teknologi.⁴⁴ *Kedua*, komitmen para industrialis Jepang pada spesialisasi perusahaan. Meskipun mereka melakukan diversifikasi, tetapi tetap mempertahankan inti (*core*) industri, seperti ditunjukkan oleh diversifikasi teknologi yang masih terkait dengan inti kegiatan R&D industri. Karena itu diversifikasi akhirnya justru akan memperkuat struktur industri di Jepang.⁴⁵

Ringkasnya, sektor publik senantiasa terlibat dalam pembangunan industri tekstil di Jepang. Keterlibatan pemerintah lebih nyata pada tahap awal (*infant industries*) dan tahap menurun (*declining industries*). *Pertama*, pada tahap awal ada dua bentuk keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan teknologi industri, yaitu bersifat umum dan khusus. Kebijaksanaan umum bertujuan untuk meningkatkan kegiatan R&D industri dengan cara: (i) memelihara persaingan antarindustri, baik domestik maupun asing; dan (ii) meningkatkan pengadaan sarana pendidikan dan latihan keteknikan (*engineering*) demi mendukung kegiatan R&D industri. Sedangkan kebijaksanaan

⁴⁴Berbeda halnya dengan di Amerika, karena sebagian besar direktur perusahaan berlatar belakang hukum dan keuangan, maka pemecahan masalah bisnis cenderung diusulkan berbentuk peraturan (proteksi) dan arus uang (moneter). Lihat Adam Swass, *Market, Plan, & State, the Strengths and Weaknesses of the Two Economic Systems* (New York: M.E. Sharpe Co., 1987), 62.

⁴⁵Untuk spesialisasi perusahaan, lihat Okimoto, *Between MITI ...*, 125.

naan khusus adalah bantuan keuangan baik subsidi maupun kredit untuk merangsang proses penyesuaian dan pendifusian teknologi ke dalam industri tekstil. *Kedua*, pada tahap menurun, keterlibatan pemerintah ditujukan untuk mempertahankan daya saing melalui peningkatan efisiensi industri dengan cara: modernisasi peralatan, penyesuaian kapasitas, dan pengembangan organisasi industri. Keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan ini didukung oleh instrumen bantuan keuangan dan bimbingan administratif dari pemerintah.

Industri Elektronik

Gambaran umum tentang keadaan industri elektronik di Jepang memperlihatkan, bahwa terdapat persaingan oligopolistik yang tajam antarindustri, baik untuk pembangunan teknologi maupun untuk memperluas pasar.⁴⁶ Peranan sektor publik dalam pembangunan teknologi elektronik telah mendorong perkembangan pesat industri elektronik di Jepang. Berikut akan dijelaskan peranan sektor publik dan perubahan perannya dalam pembangunan teknologi industri elektronik.

Peranan sektor publik dalam pembangunan teknologi elektronik sejak tahun 1950-an dapat dibagi dua, yaitu kebijaksanaan untuk mendorong perkembangan (*nurturing*) industri elektronik dan kebijaksanaan untuk memperkuat daya saing industri elektronik. Kebijaksanaan pertama menun-

⁴⁶ Misalnya pada tahun 1984, 5 besar yaitu NEC, Hitachi, Fujitsu, Toshiba dan Mitsubishi menguasai 76% produksi mikroelektronik. Lihat, W. Edward Steinmuller, "Industry Structure and Government Policies in the US and Japanese Integrated Circuit Industries" dalam John B. Stoven (ed.), *Government Policy Towards Industry in the United States and Japan* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 320.

juukkan bahwa industri elektronik yang masih lemah perlu perlindungan dan dukungan pemerintah untuk berkembang. Sedang kebijaksanaan kedua menunjukkan bahwa industri elektronik sudah tumbuh, tapi masih memerlukan bantuan pemerintah untuk bersaing di pasaran internasional. Bantuan dan dukungan oleh pemerintah tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, kebijaksanaan untuk mendorong perkembangan (*nurturing*) industri elektronik pada tahun 1950-an dan awal 1960-an mencakup instrumen ekonomi makro, keuangan, administratif dan kelembagaan. Instrumen ekonomi makro adalah seperti pengaturan untuk mengimpor teknologi melalui penjatahan devisa dan penentuan tarif untuk melindungi teknologi dalam negeri. Instrumen keuangan berupa bentuk subsidi, keringanan pajak dan pinjaman lunak, diberikan untuk mempercepat perkembangan industri elektronik. Instrumen administratif dan legal diantaranya dengan mengeluarkan undang-undang promosi industri elektronik tahun 1957. Dan instrumen kelembagaan berupa pembentukan divisi elektronik (setingkat dengan direktorat) dalam Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI). Jadi jelas, bahwa ada paket instrumen yang *menyeluruh* untuk mendorong perkembangan industri elektronik di Jepang tahun 1950-an.

Bantuan pemerintah itu tidak hanya dalam bentuk kemudahan dan keuangan, tetapi juga mendorong industri elektronik membentuk organisasi industri yang dapat menjembatani antara kepentingan industri elektronik dengan kebijaksanaan pemerintah. Dengan itu terjalin kerja sama yang erat antara sektor publik dan swasta, seperti tercermin dalam proses alih teknologi dari sektor publik kepada sektor swasta. Pada tahun

1950-an sektor publik, khususnya universitas dan lembaga penelitian nasional, melakukan alih teknologi secara aktif kepada sektor swasta. Laboratorium teknik-elektronik MITI, laboratorium komunikasi elektrik NTT (Perusahaan telekomunikasi milik negara), dan Universitas Tokyo mengambil prakarsa dalam proses alih teknologi ke sektor swasta tersebut.⁴⁷

Kedua, kebijaksanaan untuk memperkuat daya saing industri elektronik di akhir tahun 1960-an dan 1970-an. Dalam periode ini industri elektronik, khususnya industri komputer, meskipun sudah berkembang pesat sebenarnya masih lemah dalam menghadapi persaingan internasional. Kelemahan tersebut dianggap oleh MITI terletak pada kemampuan teknologi yang masih di bawah pesaing asing (khususnya IBM). Untuk mengimbangi kemampuan teknologi pesaing asing, maka pemerintah Jepang, dalam hal ini MITI, memberi bantuan keuangan guna mewujudkan dua hal, yaitu *kerja sama R&D* antarindustri didukung subsidi dan pembentukan perusahaan penjamin *pemasaran* komputer dalam negeri didukung pinjaman lunak.

Kerja sama R&D antarindustri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya saing melalui proses peningkatan kemampuan teknologi. Hasil dari kerja sama R&D tersebut adalah telah mampunya Jepang mengimbangi teknologi pesaing asing

⁴⁷ Misalnya, pada tahun 1950-an laboratorium teknik elektronik MITI mengembangkan komputer Mark I, II, III dan IV kemudian dialihkan kepada perusahaan NEC, Hitaehi dan Matsushita. Juga pada tahun 1950-an laboratorium komunikasi elektrik NTT mengembangkan komputer Musashino I, kemudian dialihkan kepada perusahaan Fujitsu dan NEC. Musashino dikembangkan dari 'parametron' yang ditemukan oleh Eiehi Goto dari Universitas Tokyo. Lebih lanjut lihat Fransman, *The Market and Beyond ...*, 16-21.

dan bahkan mengalahkan pesaing dalam meraih pangsa pasar domestik. Ada beberapa proyek kerja sama R&D yang telah disponsori pemerintah sejak tahun 1960-an.⁴⁸ Peranan pemerintah dalam setiap proyek kerja sama R&D itu sangat besar, seperti ditunjukkan oleh bantuan keuangan berupa subsidi, keringanan pajak dan pinjaman lunak dari pemerintah. Sebagai contoh, untuk proyek VLSI pemerintah mensubsidi penuh sebesar 29,1 miliar yen. Sungguhpun demikian, investasi teknologi oleh pemerintah demi meningkatkan kemampuan teknologi sektor swasta ini bersifat komplementer terhadap kelemahan investasi teknologi di sektor swasta.⁴⁹

Selanjutnya, pemerintah mendorong pembentukan perusahaan penjamin pemasaran komputer yaitu *The Japan Electronic Computer Corporation* (JECC). Perusahaan ini merupakan investasi bersama oleh industri-industri komputer dalam negeri. JECC bertanggung jawab membeli komputer produksi industri dalam negeri, kemudian menyewakan kepada konsumen. Supaya dapat beroperasi, pemerintah memberikan pinjaman lunak.

⁴⁸ Diantara proyek tersebut adalah Fontac Project (1962), VHSCS Project (1966), PIPS Project (1971) dan VLSI Project (1974). Proyek yang terakhir, Very Large Seale Integrated (VLSI) Circuit telah menghasilkan lebih dari 600 paten dalam bidang teknologi elektronik. Koji Shinjo, "The Computer Industry" dalam Komiya, *Industrial ...*, 344-349. Lihat juga Steinmuller, "Industry ..." dalam Shoven, *Government Policy ...*, 329.

⁴⁹ Disebut komplementer, karena pemerintah tidak menggantikan peran sektor swasta dalam pengembangan teknologi elektronik, meskipun investasi R&D pemerintah lebih besar dari investasi sektor swasta sendiri. Misalnya, untuk periode tahun 1970-1975 bantuan keuangan pemerintah untuk kegiatan R&D di bidang elektronik meneapai US\$1,18 miliar, sedangkan investasi R&D oleh industri elektronik sendiri sebesar US\$0,722 miliar. Lihat, Fransman, *Between Market ...*, 46.

jaman lunak kepada JECC. Maka pada akhir tahun 1960-an, industri komputer telah menguasai lebih dari 70% pasar domestik dan mengalahkan pesaing asing. Di sini tampak bahwa peningkatan kemampuan teknologi harus diikuti dengan kemudahan pemasaran yang dapat mengurangi risiko dan ketidakpastian investasi teknologi.⁵⁰

Dari keterangan di atas ada dua butir kebijaksanaan teknologi yang penting pada industri elektronik, yaitu: (i) pada tahap awal, pemerintah melalui universitas dan lembaga penelitian nasional mengambil prakarsa dalam pengembangan kemampuan teknologi, dan kemudian untuk memperkuat kemampuan teknologi swasta maka pemerintah aktif mengalihkan teknologi kepada sektor swasta; (ii) pada tahap selanjutnya, pemerintah mensponsori kerja sama R&D antar-industri swasta untuk mempercepat proses peningkatan kemampuan teknologi sektor swasta, dan investasi teknologi ini dilengkapi pembentukan instrumen yang menjamin pemasaran hasil produksi dari investasi teknologi.

Catatan Kesimpulan: Dapatkah Jepang Ditiru?

Sebagai penutup dari pembahasan tentang kebijaksanaan pembangunan teknologi di atas, akan diajukan beberapa catatan berharga dari pengalaman Jepang dan relevansinya untuk Indonesia.

Pengalaman Jepang

Pengalaman Jepang menunjukkan adanya tiga unsur penting untuk membangun

kemampuan teknologi yaitu basis kemampuan teknologi yang tersedia, kerja sama antara sektor publik dan swasta, dan faktor eksternal.

Pertama, basis kemampuan teknologi yang tersedia merupakan titik tolak menentukan tentang teknologi apa yang mungkin dikembangkan, karena semakin besar kemampuan yang tersedia makin cepat berproses penguasaan (memperoleh, menyesuaikan dan mengembangkan) teknologi. Kemampuan teknologi tersebut adalah akumulasi investasi teknologi yang menceakup perangkat keras (kapital dan R&D) serta perangkat lunak (pendidikan/latihan, informasi, dan manajemen). Di Jepang akumulasi investasi teknologi telah berlangsung lebih dari satu abad: mulai dari industri menengah (tekstil), dilanjutkan dengan industri berat (besi dan kimia), kemudian industri teknologi tinggi (elektronik dan komunikasi).

Kedua, kerja sama antara sektor publik dengan sektor swasta merupakan faktor penting juga untuk membangun dan mempercepat proses akumulasi kemampuan teknologi. Pada awal pembangunan kemampuan teknologi, peranan sektor publik di Jepang lebih bersifat *komplementer* (melengkapi kekurangmampuan) terhadap sektor swasta, yaitu memberi bantuan pendidikan/latihan, sarana R&D, keuangan R&D, dan alih teknologi kepada sektor swasta. Selanjutnya, setelah sektor swasta memiliki kemampuan teknologi yang cukup, peranan sektor publik lebih bersifat *katalis* (mempercepat proses tanpa ikut bereaksi di dalam kegiatan R&D sektor swasta), yaitu memberi bantuan yang lebih bersifat koordinatif dan administratif untuk mencapai target nasional. Jadi jelas di Jepang pembangunan kemampuan teknologi pada umumnya bertumpu pada sektor swasta, sedang sektor publik umumnya ber-

⁵⁰Shinjo, "The Computer Industry" dalam Komiya, *Industrial ...*, 343.

peran untuk memberi bantuan kepada sektor swasta, baik bersifat komplementer maupun katalis.

Bantuan sektor publik secara efektif telah meningkatkan kemampuan teknologi di Jepang, karena didukung oleh *keadaan* sektor swasta. Sebab sektor swasta di Jepang memiliki dua ciri utama, yaitu *organisasi* industri dan *persaingan* antarindustri yang kondusif untuk membangun kemampuan teknologi. Keadaan organisasi industri -- mencakup struktur industri besar-kecil, hubungan antargrup industri, lembaga keuangan pendukung industri, dan jaringan kerja sama dengan sektor publik di dalam industri -- memudahkan penerapan kebijaksanaan teknologi yang dibuat pemerintah. Sedangkan suasana persaingan antarindustri swasta dalam pasar domestik, diciptakan dan dipelihara oleh pemerintah untuk memacu perlombaan investasi teknologi.

Ketiga, faktor eksternal yaitu *input* industri dan pesaing internasional, merupakan salah satu faktor yang mendorong investasi teknologi di Jepang. Salah satu *input* utama untuk industri di mana Jepang tergantung pada luar negeri adalah energi. Krisis energi telah menjadi salah satu faktor penting yang mendorong investasi ke arah pengembangan teknologi hemat energi (elektronik dan telekomunikasi). Sedangkan pesaing internasional dari negara maju maupun NIB menjadi faktor yang memaksa Jepang meningkatkan investasi teknologi untuk mempertahankan daya saing dalam pasar internasional.

Relevansinya dengan Indonesia

Sektor publik telah aktif melakukan investasi teknologi di Indonesia. Dari sudut perangkat lunak, khususnya pembangunan

sumber daya manusia, ditunjukkan oleh telah meluas dan beragamnya pendidikan/latihan formal. Dari sudut perangkat keras, khususnya investasi kapital oleh sektor publik di Indonesia selama dua dasawarsa yang lalu, tampak ditunjukkan dalam pembangunan sumber daya alam (energi dan tambang) dan industri baik yang berskala besar (besi dan petrokimia) maupun ber-teknologi tinggi (pesawat terbang). Dan itu adalah wajar karena Indonesia kaya akan sumber daya alam, perlu memperkuat struktur industri hulu, dan perlu mengejar ketinggalan teknologinya. Sedangkan investasi R&D untuk meningkatkan kelembagaan R&D, sarana R&D dan kegiatan R&D oleh sektor publik di Indonesia lebih kurang 0.3% GNP (tahun 1990).

Seperti telah disebutkan penyempurnaan teknologi dan peningkatan *mutu* sumber daya manusia di Jepang diperoleh melalui kegiatan *reverse engineering* di lantai produksi, bengkel, dan laboratorium industri. Dengan kata lain, ada proses umpan balik positif antara mobilisasi tenaga kerja dengan pembangunan teknologi. Dan hal itu relatif mudah dicapai melalui industri menengah dan kecil dengan sejumlah tenaga terdidik dan terlatih. Oleh karena Indonesia juga kelebihan tenaga kerja (terdidik), maka sektor publik perlu memberi bantuan investasi kapital, R&D, dan latihan kerja untuk industri menengah dan kecil. Salah satu bentuk bantuan yang penting adalah sektor publik perlu aktif untuk *mengalihkan hasil-hasil R&D* dari laboratorium universitas, lembaga penelitian nasional, dan balai industri kepada industri menengah dan kecil di seluruh Indonesia.

Sektor swasta belum berperan nyata dalam kegiatan investasi R&D di Indonesia (di-

samping itu tidak ada data resmi). Meskipun sumbangan sektor swasta cukup nyata untuk investasi kapital akhir-akhir ini, namun suasana persaingan yang tajam antarindustri swasta belum nyata dijamin oleh pemerintah. Akibatnya, industri-industri swasta belum terangsang untuk mencapai *efisiensi* dan *mutu* melalui investasi teknologi, khususnya di bidang R&D. Lemahnya investasi R&D tersebut (berarti tidak berlangsung proses pencernaan teknologi impor) menyebabkan sejumlah industri pengganti impor sekarang sulit bersaing di pasar internasional. Disamping itu faktor *input* untuk industri hilir adalah lebih mahal karena berasal dari *output* industri hulu yang kurang efisien (sebagian besar dikuasai atau dilindungi pemerintah). Lagipula, umumnya industri hilir tersebut masih dilindungi terhadap persaingan dengan produk impor.

Pengalaman Jepang mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan kemampuan teknologi itu lebih bertumpu pada persaingan di dalam sektor swasta. Kedua faktor, baik lemahnya kegiatan R&D maupun kurang efisiennya industri swasta, memang memerlukan keterlibatan atau kebijaksanaan pemerintah. Tetapi, jika belum ada *dukungan sektor swasta sendiri* (dalam bentuk persaingan yang tajam antarindustri), maka kebijaksanaan teknologi dari pemerintah (baik bantuan investasi teknologi yang bersifat komplementer maupun katalis kepada sektor swasta) diperkirakan tidak akan efektif untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri swasta. Oleh karena itu, sekarang sudah waktunya di Indonesia persaingan antarindustri diciptakan dan dijamin melalui *undang-undang anti monopoli*. Dalam hal ini Jepang mungkin patut ditiru.

Profil PMA dan PMDN: Alokasinya Menurut Provinsi dan Sektor Serta Negara Asal PMA

J. Supranto

Pendahuluan

IBARAT bayi yang tumbuh menjadi dewasa karena diberi makan, ekonomi juga dapat tumbuh karena diberi modal. Begitu pentingnya modal, sehingga pemerintah selalu berusaha menarik minat para pengusaha domestik dan asing guna menanamkan modalnya agar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan pembangunan. Sekarang ini pihak swasta diminta aktif berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan, khususnya melalui penanaman modal.

Walaupun modal bukan satu-satunya faktor yang menentukan suksesnya pembangunan (faktor lain yang penting: semangat rakyat untuk membangun, penguasaan ilmu & teknologi), namun pada umumnya kita sependapat bahwa tanpa modal sulit melaksanakan pembangunan. Pada saat ini bukan hanya negara berkembang seperti Indonesia yang memerlukan modal, tetapi juga seba-

gian besar negara Eropa Timur yang sudah bertahun-tahun menganut paham sosialis memerlukan modal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang jelas telah ketinggalan jauh dari negara Eropa Barat.

Indonesia dalam upaya menarik modal asing harus bersaing bukan hanya dengan negara berkembang lainnya melainkan juga dengan negara-negara Eropa Timur. Mengingat sulitnya memperoleh modal asing, maka apabila modal tersebut sudah diperoleh, pemanfaatannya haruslah benar-benar disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah, khususnya untuk pemerataan usaha pembangunan. Rasanya sulit sekali melakukan upaya pemerataan usaha pembangunan apabila tidak diimbangi dengan pemerataan modal.

Salah satu dari 8 jalur pemerataan yang telah dicanangkan ialah jalur "pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air". Jalur pemerataan usaha pembangunan ini hanya bisa dicapai kalau memang terjadi pemerataan modal dan pemerataan lainnya, seperti pemerataan tenaga

yang terampil/berpendidikan, pemerataan sarana dan prasarana.

Setiap penduduk Indonesia, di mana pun dia tinggal, sangat mendambakan realisasi pemerataan usaha pembangunan tersebut, agar terjadi pemerataan pendapatan yang benar-benar nyata (*real*), bukan hanya semu berupa semboyan kosong yang mudah diucapkan/dijanjikan tetapi sulit dilaksanakan. Pelaksanaan secara nyata memerlukan politik (*political will*) yang sungguh-sungguh dari pemerintah dengan dukungan aparatnya. Perlu diketahui bahwa tidak meratanya pendapatan sebagai hasil pembangunan akan selalu menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu kestabilan nasional.

Dalam tulisan ini akan dibahas alokasi PMA & PMDN menurut provinsi dan sektor untuk mengetahui pemerataan alokasi modal serta negara asal PMA. Disamping itu, akan dilihat perkembangan PMA & PMDN selama tiga tahun terakhir tepatnya 1988 s/d November 1990. Perkembangan PMA & PMDN ini perlu dipantau sebab seperti telah disebutkan sebelumnya, kekurangan modal akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan modal baik asing maupun domestik harus selalu diusahakan, untuk menjamin laju pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan sekitar 5% dalam PELITA V ini.

Perkembangan PMA & PMDN Secara Umum

Pemerintah Orde Baru telah mengizinkan modal asing beroperasi di Indonesia sejak tahun 1967. Selama Indonesia melaksanakan pembangunan nasional sejak Pelita 1 yang dimulai tahun 1969, PMA telah ikut berperan sebagai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan nasional. Peranan

PMA semakin meningkat, secara kumulatif sejak 1967 s/d November 1990 telah beroperasi sebanyak 1.741 proyek dengan modal sebesar US\$37,98 miliar, di luar sektor minyak, asuransi dan perbankan.

Apabila kita perhatikan Tabel 1, sejak tahun 1988 PMA yang telah disetujui meningkat dengan tajam. Tahun 1988 sebanyak 129 proyek senilai US\$4,426 miliar, tahun 1989 sebanyak 295 proyek senilai US\$5,920 miliar, kemudian berdasarkan perkiraan sementara penulis tahun 1990 proyek mencapai 419 buah senilai US\$10,02 miliar. Suatu peningkatan yang lumayan besar. Selama tiga tahun sejak 1988 jumlah proyek sudah mencapai 843 buah, rata-rata per tahun sebesar 281. Dibandingkan dengan sebelumnya, sejak 1967 s/d 1987 jumlah proyek adalah $1.741 - 843 = 898$ buah, rata-rata per tahun hanya sebanyak $898/20 = 44,9$ atau 45 buah.

Selama tiga tahun terahir nilai rata-rata per proyek sebesar $20,348/843 =$ US\$0,024.138 miliar atau US\$24,138 juta. Sedangkan sebelumnya dalam periode 1967 s/d 1987, sebesar $(37,979 - 20,348)/898 =$ US\$0,019634 miliar atau US\$19,634 juta. Jadi secara rata-rata baik jumlah proyek PMA maupun nilai modalnya memang mengalami kenaikan yang lumayan besar, khususnya selama tiga tahun terakhir tepatnya dari 1988 s/d 1990.

Kenaikan PMA baik jumlah proyek maupun nilai modalnya selain merupakan hasil upaya pemerintah untuk menarik modal asing, juga didukung oleh murahnya upah tenaga kerja di Indonesia di samping faktor ketertiban & keamanan yang memang boleh dibanggakan, apalagi bila dibandingkan dengan keadaan keamanan di Filipina atau Kamboja misalnya.

Posisi PMDN juga tidak kalah dengan posisi PMA selama tiga tahun terakhir yaitu sejak 1988 s/d 1990. Tahun 1988, proyek PMDN yang telah disetujui mencapai 806 proyek, senilai Rp 15,681 trilyun, tahun 1989 sebanyak 777 proyek senilai Rp 21,907 trilyun, kemudian tahun 1990 berdasarkan perkiraan sementara penulis banyaknya proyek mencapai 1.280 buah senilai Rp 62,923 trilyun. Selama tiga tahun jumlah proyek mencapai 2.863 buah, rata-rata per tahun sebanyak 954 proyek. Selama 19 tahun sebelumnya, 1968 s/d 1990 banyaknya proyek = $6.950 - 2.863 = 4.087$, rata-rata per tahun hanya sebanyak $4.087/19 = 215$ proyek, jauh di bawah rata-rata tiga tahun terakhir. Semua kenyataan ini menunjukkan adanya kemampuan pihak swasta Indonesia dalam

usaha akumulasi modal sehingga mampu berpartisipasi aktif menyediakan dana untuk membiayai proyek-proyek sebagai realisasi pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ekonomi untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Jadi jelas sekali bahwa yang memanfaatkan peluang bisnis di Indonesia bukan hanya para pemodal asing melalui PMA melainkan juga pemodal nasional/domestik melalui PMDN, sebab kenyataan menunjukkan baik PMA maupun PMDN sama-sama mengalami kemajuan/kenaikan. Baik PMA maupun PMDN berperan merealisasikan salah satu komponen trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, khususnya pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1

POSISI PMA DAN PMDN YANG TELAH DISETUJUI

PMA

1967 s/d Nov. 1990		1988		1989		1990*	
Proyek	Modal (Miliar US\$)	Proyek	Modal (Miliar US\$)	Proyek	Modal (Miliar US\$)	Proyek	Modal (Miliar US\$)
1.741	37,979	129	4,426	295	5,920	419	10,002

PMDN

1968 s/d 1990		1988		1989		1990*	
Proyek	Modal (Trilyun Rp)	Proyek	Modal (Trilyun Rp)	Proyek	Modal (Trilyun Rp)	Proyek	Modal (Trilyun Rp)
6.950	140,115	806	15,681	777	21,907	1,280	62,925

Catatan: *Perkiraan sementara penulis

Sumber: *Indikator Ekonomi*, Februari 1991.

Alokasi PMA Menurut Sektor Ekonomi

Ternyata sektor yang paling banyak menyerap modal asing ialah sektor industri, kemudian diikuti oleh sektor pertambangan & penggalian. Sektor-sektor lainnya seperti pertanian, perdagangan, transportasi/pe-

hubungan, lembaga keuangan/perbankan hampir sama kemampuannya dalam menyerap modal asing.

Berdasarkan data tahun 1967 s/d November 1990, maka dari modal asing sebesar US\$37,979 miliar ternyata sebanyak US\$27,524 miliar diserap oleh sektor indus-

Tabel 2

PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH DISETUJUI PEMERINTAH MENURUT SEKTOR EKONOMI (Miliar US\$)*

Jenis Kategori	1967 s/d Nov. '90		1988		1989		1990**	
	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal
1. Pertanian, Perkebunan Kehutanan & Perikanan	142	1,749	13	0,177	14	0,194	12	0,619
2. Pertambangan & Penggalian	120	3,103	-	0,292	-	1,043	-	-
3. Perindustrian	1.124	27,524	89	3,468	225	4,265	305	6,691
4. Listrik, Gas & Air	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Konstruksi	111	0,553	6	0,003	9	0,024	-	-
6. Perdagangan Besar & Eceran, Restoran dan Hotel	64	1,938	10	0,318	14	0,207	-	-
7. Transportasi, Pergudangan & Perhubungan	20	1,153	-	0,002	1	0,004	-	-
8. Lembaga Keuangan, Perasuransian, Real Estate & Jasa Perusahaan	44	1,505	-	0,080	2	0,067	15	0,824
9. Jasa Masyarakat, Sosial dan Perorangan	116	459	11	0,084	30	0,115	-	-
Jumlah	1.741	37,979	129	4,426	295	5,920	419	10.002

Catatan: *tak termasuk sektor minyak, asuransi & perbankan

**perkiraan sementara penulis

Sumber: *Indikator Ekonomi*, Februari 1991, diolah kembali.

tri, jadi sekitar 72,74% atau lebih dari dua-pertiga. Sektor pertambangan & penggalian menyerap sebanyak US\$3,103 miliar ($\pm 8,17\%$), sektor perdagangan besar & eceran, restoran dan hotel menyerap US\$1,938 miliar ($\pm 5,10\%$) dan sektor pertanian hanya menyerap US\$1,749 miliar ($\pm 4,60\%$), lihat Tabel 2.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemodal asing (*foreign investor*) hanya tertarik pada sektor industri, khususnya industri pengolahan (*manufacturing sector*). Ini membuktikan bahwa bagi para pemodal asing pertumbangan ekonomi adalah sangat dominan. Dari segi teori, sektor industri mempunyai koefisien *dispersi* dan koefisien *sensitivitas* yang tinggi, artinya kalau sektor industri berkembang, akan mempunyai dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional, oleh karena banyak sektor yang meningkat *output*nya untuk memasok *input* ke sektor industri. Sebaliknya kalau perekonomian tumbuh pesat, sektor industri pun akan ikut tumbuh dengan pesat, oleh karena sektor industri sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi nasional yang pesat ini akan mampu memasok *input* untuk peningkatan *output* sektor industri.

Sebagai ilustrasi kalau sektor industri sudah mampu memproduksi mobil sendiri, apabila terjadi peningkatan permintaan mobil sebagai akibat daya beli masyarakat naik (pendapatan nasional meningkat), maka produksi mobil akan meningkat (sifat *sensitivitas* sektor industri). Kemudian peningkatan produksi mobil akan menimbulkan permintaan *input* yang nota bene merupakan *output* sektor lain, seperti permintaan *karet* (sektor pertanian), *kayu* (untuk bak truck), *plastik*, *kain* (= tutup jok), *besi*, *kaca*, *bensin*; dan lain sebagainya (sifat *dis-*

persi sektor industri). Pembangunan sektor industri dengan demikian memicu laju pertumbuhan perekonomian nasional!

Selama tahun 1988 s/d 1990 ternyata perkembangan PMA menurut sektor, didominasi oleh sektor industri. Tahun 1988 ada 89 proyek bernilai US\$3,468 miliar, tahun 1989 naik menjadi 225 proyek bernilai US\$4,265 miliar dan tahun 1990 berdasarkan perkiraan sementara penulis menjadi 305 proyek bernilai US\$6,691 miliar. Dari 419 proyek bernilai US\$10,002 miliar ternyata diserap oleh sektor industri sebanyak 222 proyek ($\pm 54\%$) bernilai US\$6,691 miliar ($\pm 67\%$), lihat Tabel 2.

PMA Menurut Lokasi

Dalam Tabel 3 terlihat bahwa pemodal asing lebih tertarik menanamkan modalnya di Jawa, khususnya di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Berdasarkan data dari tahun 1967 s/d November 1990, sebanyak 1.741 proyek bernilai US\$37,979 miliar terserap di Jawa sebanyak 1.314 proyek ($\pm 75\%$) bernilai US\$23,718 miliar ($\pm 62\%$), di Jabar 623 proyek ($\pm 36\%$) bernilai US\$12,193 miliar ($\pm 32\%$), di DKI Jakarta 509 proyek, (29%) bernilai US\$6,533 miliar (17%). Di Sumatera terserap sebanyak 162 proyek (9%) bernilai US\$8,154 miliar ($\pm 21\%$), di Kalimantan sebanyak 109 proyek ($\pm 7\%$) bernilai US\$1,964 miliar ($\pm 5\%$), sisanya dalam jumlah yang relatif kecil menyebar ke pulau-pulau lainnya. Penyebaran (distribusi) PMA menurut lokasi sangat tidak merata, sangat memberat ke Indonesia Bagian Barat. Indonesia Bagian Timur (= IBT) relatif sangat kecil daya serapnya terhadap PMA.

Sejak tahun 1988 s/d 1990 konsentrasi PMA lebih banyak di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1988 terdapat sebanyak 129 pro-

Tabel 3

**PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH DISETUJUI
PEMERINTAH MENURUT LOKASI
(Miliar US\$)***

Lokasi	1967 s/d Nov. '90		1988		1989		1990**	
	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal
JAWA	1.314	23,718	99	1,705	245	4,012	98	6,875
DKI Jakarta	509	6,533	34	0,242	75	0,549	98	1,714
Jawa Barat	623	12,193	54	1,188	140	1,385	212	3,725
Jawa Tengah	43	2,309	2	0,024	7	1,729	6	1,509
DI Yogyakarta	4	0,007	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur	135	2,676	9	0,252	23	0,349	26	0,963
SUMATERA	162	8,154	10	1,506	17	0,746	34	1,818
DI Aceh	12	1,125	1	0,966	1	0,050	1	0,428
Sumatera Utara	50	3,458	2	0,194	3	0,003	9	0,798
Sumatera Barat	11	0,672	-	-0,025	-	0,005	-	-
Riau	55	1,634	7	0,370	10	0,351	-	-
Jambi	3	0,024	-	-	-	-	-	-
Lampung	12	0,571	-1	-0,003	2	0,081	-	-
Sumatera Selatan	19	1,276	1	0,004	1	0,257	-	-
KALIMANTAN	109	1,964	-2	0,129	1	0,580	7	0,659
Kalimantan Barat	25	0,112	1	0,045	-	0,005	-	-
Kalimantan Timur	34	1,342	-3	-0,009	-	0,553	-	-
Kalimantan Tengah	32	0,263	-	0,080	-	0,009	-	-
Kalimantan Selatan	18	0,248	-	0,013	1	0,013	-	-
SULAWESI	46	1,628	7	0,044	6	0,111	-	-
Sulawesi Utara	12	0,214	-	-	2	0,102	-	-
Sulawesi Tengah	7	0,031	2	0,024	1	0,004	-	-
Sulawesi Tenggara	7	0,039	4	0,019	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	20	1,345	1	0	3	0,005	-	-
Bali & Nusa Tenggara	75	1,306	14	0,362	25	0,230	26	0,522
Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur	28	1,168	3	0,680	-	0,200	-	-
Gabungan Daerah	7	0,040	-2	-	1	0,041	-	-
Jumlah	1.741	37,979	129	4,426	295	5,920	419	10,002

Catatan: *tak termasuk sektor minyak, asuransi & perbankan

**perkiraan sementara penulis

Sumber: *Indikator Ekonomi*, Februari 1991, diolah kembali.

Tabel 4

**PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH DISETUJUI
MENURUT NEGARA ASAL**
(Miliar US\$)*

Negara Asal	1967 s/d Nov. '90		1988		1989		1990**	
	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal
AMERIKA	153	2,647	1	0,604	12	0,214	22	0,266
USA	120	2,195	2	0,534	12	0,167	14	0,205
Kanada	11	0,029	1	0,005	-	0,002	5	0,016
Amerika Lainnya	22	0,423	-	0,075	-	0,045	-	-
EROPA	315	6,982	24	1,357	37	0,746	38	1,364
Belgia	16	0,217	-	-	3	0,043	-	-
Denmark	10	0,084	-	0,000	1	0,009	1	0,009
Perancis	29	0,283	3	0,008	5	0,019	6	0,075
Italia	3	0,017	-	-	2	0,002	-	-
Nederland	78	1,862	8	0,271	9	0,284	10	0,538
Norwegia	6	0,216	1	0,014	2	0,183	1	0,005
Jerman Barat	48	1,854	5	0,956	4	0,016	4	0,015
Inggris	90	0,724	4	0,089	8	0,162	-	-
Swiss	21	0,212	2	2	0,017	0,011	-	-
Eropa Lainnya	14	1,512	1	0,001	2	0,018	2	0,559
ASIA	1.042	18,574	94	1,845	222	2,248	322	5,572
Jepang	378	9,545	23	0,225	65	0,919	69	2,450
Korea Selatan	184	1,666	26	0,209	65	0,481	72	0,634
Hongkong	174	3,655	12	0,232	14	0,377	42	0,999
Taiwan	162	2,259	15	0,923	52	0,190	97	1,092
Singapura	100	0,993	18	0,255	20	0,183	33	0,232
India	12	0,187	-	-	2	0,059	-	-
Asia Lainnya	32	0,268	-	0,001	4	0,039	9	0,161
AUSTRALIA	111	0,874	7	0,357	13	0,157	-	-
Oceania Lainnya	-	-	-	0,005	1	0,000	-	-
Gabungan Daerah	120	8,902	3	0,257	10	2,553	25	2,585
Jumlah	1.741	37,979	129	4,426	295	5,920	419	10,002

Catatan: *tak termasuk sektor minyak, asuransi & perbankan

**perkiraan sementara penulis

Sumber: *Indikator Ekonomi*, Februari 1991, diolah kembali.

rek bernilai US\$4,426 miliar. Di Jawa tersebut sebanyak 99 proyek ($\pm 77\%$) bernilai US\$1,705 miliar ($\pm 38\%$), khususnya di Jawa Barat 54 proyek ($\pm 42\%$) bernilai US\$1,188 miliar ($\pm 27\%$). Dalam tahun 1989 ada sebanyak 295 proyek, bernilai US\$5,920 miliar, terutama diserap Jawa sebanyak 245 proyek ($\pm 83\%$), bernilai US\$4,012 miliar ($\pm 68\%$) dan Jabar 140 proyek ($\pm 47\%$) bernilai US\$1,385 miliar ($\pm 21,3\%$). Kemudian untuk tahun 1989 terjadi peningkatan menjadi 419 proyek bernilai US\$10,002 miliar. Jawa menyerap 348 proyek ($\pm 83\%$) bernilai US\$6,875 ($\pm 69\%$), diserap Jabar 212 proyek ($\pm 51\%$) bernilai US\$3,725 miliar ($\pm 63\%$). Sisanya yang relatif kecil jumlahnya tersebar ke pulau-pulau lainnya. Bagi pemilik modal asing Pulau Jawa merupakan tempat yang paling menarik, mungkin karena banyak tenaga kerja murah, keamanan terjamin, fasilitas transportasi & komunikasi jauh lebih baik dibandingkan daerah-daerah/kepulauan lainnya.

Alokasi PMA Menurut Negara Asal

Dalam bayangan sepantas lalu, mungkin orang menyangka bahwa modal asing yang besar-besar berasal dari Amerika atau Eropa (seperti dari Amerika Serikat, Jerman dan Inggris). Ternyata tidak. Asal modal asing terbesar bahkan dari Asia, khususnya Jepang, Hongkong, Taiwan, kemudian disusul oleh Eropa dan Amerika Serikat.

Berdasarkan data tahun 1967 s/d November 1990, proyek sebanyak 1.741 bernilai US\$37,979 miliar ternyata dari Asia 1.042 ($\pm 60\%$) bernilai US\$18,574 miliar, dan dari Jepang 378 ($\pm 22\%$) bernilai US\$9,545 ($\pm 25\%$). Dari Eropa 315 ($\pm 18\%$) bernilai US\$6.982 ($\pm 18\%$) dan

dari Amerika 153 ($\pm 9\%$) bernilai US\$2,647 ($\pm 7\%$). Sisanya dalam jumlah yang relatif kecil berasal dari negara-negara lain (lihat Tabel 4). Diantara negara-negara ini, misalnya investasi Amerika Serikat bernilai US\$2,195 miliar, Nederland US\$1,862 miliar, Jerman Barat US\$1,854 miliar, Korea Selatan US\$1,666 miliar. Selama tahun 1988 s/d 1990 investasi yang menonjol hanyalah dari Jepang, Taiwan, dimana nilai modalnya melebihi US\$1 miliar.

Alokasi PMDN Menurut Kategori/Sektor

Ternyata pola penyebaran PMDN menurut sektor juga sama seperti PMA. Sebagian besar investasi diserap oleh sektor industri, kemudian diikuti sektor pertanian, perdagangan, dan lembaga keuangan. Berdasarkan data tahun 1968 s/d 1990, terdapat 6.950 proyek bernilai US\$140,115 trilyun, tersebar di sektor perindustrian sebanyak 4.586 proyek ($\pm 66\%$) bernilai Rp94,834 trilyun ($\pm 68\%$), di sektor pertanian terdapat 1.283 ($\pm 18\%$) bernilai Rp23,865 trilyun ($\pm 17\%$), di sektor perdagangan 308 proyek ($\pm 4\%$) bernilai Rp7,2562 trilyun ($\pm 5\%$), di sektor lembaga keuangan 194 proyek ($\pm 3\%$) bernilai Rp 5,411 trilyun ($\pm 4\%$), dan sisanya tersebar di sektor lain (lihat Tabel 5).

Sejak tahun 1988 s/d 1990 investasi masih juga didominasi sektor perindustrian, baru kemudian pertanian & perdagangan. Pada tahun 1988 terdapat investasi dalam 806 proyek bernilai Rp15,681 trilyun, di sektor perindustrian terdapat 486 proyek (60%) bernilai Rp8,922 trilyun ($\pm 57\%$), di sektor pertanian 200 proyek ($\pm 41\%$) bernilai Rp4,744 trilyun ($\pm 30\%$). Dalam tahun 1989 terdapat 777 proyek bernilai Rp21,907

trilyun, di sektor perindustrian ada 481 proyek ($\pm 62\%$) bernilai Rp14,336 trilyun ($\pm 65\%$). Kemudian pada tahun 1990 terdapat 1.280 proyek bernilai Rp62,925 trilyun, di sektor perindustrian terdapat 873 proyek ($\pm 68\%$) bernilai Rp44,679 trilyun ($\pm 71\%$) dan di sektor pertanian 161 proyek ($\pm 13\%$) bernilai Rp8,718 trilyun ($\pm 14\%$), sisanya tersebar di sektor lain, lihat Tabel 5.

PMDN Menurut Lokasi

Pola penyebaran PMDN menurut lokasi juga tak berbeda jauh dengan PMA, sebagian besar berlokasi di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Selama periode 1968 s/d November 1990 berlangsung investasi sebanyak 6.950 proyek bernilai Rp140,115 trilyun, diserap Jawa 4.544 proyek ($\pm 65\%$) bernilai

Tabel 5

**PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH DISETUJUI
PEMERINTAH MENURUT SEKTOR EKONOMI**
(Trilyun Rp.)

Jenis Kategori	1968 s/d Nov. '90		1988		1989		1990*	
	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan perikanan	1.283	23,865	200	4,744	178	4,369	161	8,718
2. Pertambangan dan Penggalian	117	2,045	19	0,156	9	0,109	15	0,163
3. Perindustrian	4.586	94,834	486	8,922	481	14,336	873	44,679
4. Listrik, Gas & Air	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Konstruksi	72	0,862	3	0,031	5	0,135	-	-
6. Perdagangan Besar & Eceran, Restoran dan Hotel	308	7,252	28	0,517	12	1,333	92	4,202
7. Transportasi, Perdagangan & Perhubungan	234	3,724	25	0,166	26	0,299	56	2,381
8. Lembaga Keuangan, Perasuransian, Real Estate & Jasa Perusahaan	194	5,411	15	0,784	17	1,068	39	2,229
9. Jasa Masyarakat Sosial & Perorangan	156	2,122	30	0,360	29	0,257	38	0,469
Jumlah	6.950	140,115	806	15,681	777	21,907	1.280	62,925

Catatan: *Perkiraan sementara penulis

Sumber: *Indikator Ekonomi*, Februari 1991, diolah kembali.

Tabel 6

**PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH DISETUJUI
PEMERINTAH MENURUT LOKASI**
(Trilyun Rp.)

Lokasi	1968 s/d Nov. '90		1988		1989		1990*	
	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal	Proyek	Modal
JAWA	4.544	91,877	519	9,064	523	15,496	909	42,883
DKI Jakarta	900	11,270	54	1,041	56	1,663	88	2,940
Jawa Barat	2.186	57,749	311	6,043	312	10,196	585	29,942
Jawa Tengah	521	10,796	39	0,751	47	0,808	109	6,468
DI Yogyakarta	113	0,855	19	0,190	9	0,047	29	0,507
Jawa Timur	824	11,207	96	1,039	99	2,781	97	3,026
SUMATERA	1.142	26,775	141	3,905	139	3,592	171	10,935
DI Aceh	85	1,781	13	0,314	9	0,236	18	0,245
Sumatera Utara	305	3,754	43	0,737	26	0,379	41	0,351
Sumatera Barat	108	1,375	5	0,129	7	0,146	17	0,556
Riau	215	10,161	26	1,280	42	1,312	26	6,177
Jambi	59	2,104	3	0,308	3	0,384	8	0,638
Bengkulu	35	0,422	6	0,037	7	0,078	6	0,087
Lampung	139	2,635	13	0,326	21	0,617	30	0,941
Sumatera Selatan	196	4,543	32	0,774	24	0,438	23	1,940
KALIMANTAN	582	10,063	58	1,491	36	1,033	58	4,145
Kalimantan Barat	184	3,911	25	0,746	11	0,422	28	1,962
Kalimantan Timur	196	4,569	17	0,541	5	0,264	10	1,751
Kalimantan Tengah	88	0,510	2	0,025	5	0,135	6	0,119
Kalimantan Selatan	114	1,072	14	0,178	15	0,212	14	0,313
SULAWESI	305	4,197	35	0,316	32	0,429	51	1,440
Sulawesi Utara	67	1,092	9	0,073	7	0,214	10	0,233
Sulawesi Tengah	64	0,961	6	0,109	10	0,050	-	-
Sulawesi Tenggara	15	0,687	-	0,004	2	0,051	-	-
Sulawesi Selatan	159	1,456	20	0,129	13	0,114	30	0,625
Bali & Nusa Tenggara	208	3,538	29	0,468	30	0,617	60	2,305
Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur	169	3,664	32	0,354	20	0,420	32	1,234
Gabungan Daerah	-	-	8	0,082	-3	0,320	-	-
Jumlah	6.950	140,115	806	15,681	777	21,907	1,280	62,925

Catatan: *Perkiraan sementara penulis

Sumber: *Indikator Ekonomi*, Februari 1991, diolah kembali.

Rp91,877 trilyun (\pm 66%), khususnya diserap Jabar 2.186 proyek (\pm 31%) bernilai Rp57,749 trilyun (\pm 41%) dan DKI Jakarta 900 proyek (\pm 13%) bernilai Rp11,270 trilyun (\pm 8%), sedangkan sisanya menyebar di Kalimantan, Sulawesi dan Pulau-pulau lainnya dalam jumlah yang relatif kecil.

Dari tahun 1968 s/d November 1990 penyebaran PMDN masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1988 terdapat 806 proyek bernilai Rp15,681 trilyun, diserap Jawa 519 proyek (\pm 64%) bernilai Rp9.064 trilyun (\pm 58%), Jabar menyerap 311 proyek (\pm 38%) bernilai Rp6,043 trilyun (\pm 38%) dan diserap Sumatera 141 proyek (\pm 17%) bernilai Rp3,905 trilyun (\pm 25%). Dalam tahun 1989 terdapat 777 proyek, bernilai Rp21,907 trilyun, diserap Jawa 523 proyek (\pm 67%) bernilai Rp15,496 trilyun (\pm 71%), Jabar menyerap 312 proyek (\pm 40%) bernilai Rp10,196 trilyun (\pm 46%) dan Sumatera menyerap 139 proyek (\pm 18%) bernilai Rp3,592 trilyun (\pm 16%).

Kemudian pada tahun 1990 terdapat 1.280 proyek bernilai Rp62,925 trilyun, yang diinvestasikan di Jawa 909 proyek (\pm 71%) bernilai Rp42,883 trilyun (\pm 68%), Jabar menyerap 585 proyek (\pm 46%) bernilai Rp29,942 trilyun (\pm 47%), lalu Sumatera menyerap 171 proyek (\pm 13%) bernilai Rp10,935 trilyun (\pm 17%) dan sisanya tersebar di lokasi lain dalam jumlah yang relatif kecil (Lihat Tabel 6).

Faktor-faktor yang Mendorong Pemasukan Modal Asing

Telah disebutkan di atas bahwa faktor tenaga kerja yang murah dan keamanan yang mantap merupakan faktor yang men-

dorong masuknya modal asing ke Indonesia. Disamping itu sebetulnya masih ada beberapa faktor lain yang dapat mendorong masuknya modal asing ke Indonesia yaitu antara lain:

1. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan pasar yang potensial.
2. Kekayaan alam yang melimpah sebagai penyedia bahan mentah.
3. Kebebasan para penanam modal untuk menransfer mata uang asing, antara lain laba setelah pajak dan royalti.
4. Berbagai usaha pemerintah bersama swasta dalam menarik modal asing baik melalui kunjungan anggota KADIN ke berbagai negara maupun ikut sertanya Indonesia dalam pameran dagang tingkat internasional.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai sumber pembiayaan pembangunan, baik PMA maupun PMDN selama tiga tahun terakhir meningkat dengan pesat.
2. Baik PMA maupun PMDN penyebarannya menurut lokasi dan sektor sangat tidak merata. Menurut sektor investasi terkonsentrasi pada sektor industri, sedangkan menurut lokasi terkonsentrasi di Jawa, terutama di Jawa Barat & DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan tidak merata usaha pembangunan ke seluruh tanah air, yang pada gilirannya akan menyebabkan ketidakmerataan pendapatan sebagai hasil pembangunan.
3. PMA menurut negara asal ternyata berdatangan dari Asia, khususnya dari Jepang yang menduduki peringkat perta-

ma, kemudian diikuti Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Dari Amerika khususnya datang dari Amerika Serikat, sedangkan dari Eropa investor yang menonjol hanya dari Belanda dan Jerman Barat.

4. Faktor-faktor yang mendorong masuknya modal asing ke Indonesia antara lain adalah tenaga kerja yang murah, keamanan yang mantap dan kebebasan untuk mentransfer mata uang asing.

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN

Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

I. PERSIAPAN KTT ASEAN IV

II. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

A. Masalah Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)

1. Seminar Perdagangan Bebas ASEAN
2. Pernyataan KADIN ASEAN Tentang AFTA
3. Masalah Pelaksanaan AFTA
4. Konsep AFTA

B. Kerja Sama Industri, Mineral dan Energi

1. Pertemuan AFCM
2. Pertemuan Pusat Informasi Ketenaga Listrikan ASEAN

C. Kerja Sama Pangan, Pertanian dan Kehutanan

- Pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN

III. KERJA SAMA NON-EKONOMI

- Kerja Sama Kebudayaan dan Informasi

1. Sidang Umum CAJ
2. Konferensi Guru ASEAN
3. Pertemuan Pejabat Tinggi Agama ASEAN
4. Pertemuan MABIM

IV. KERJA SAMA NON-PEMERINTAHAN (NGO)

A. Kerja Sama Kesehatan

1. Kongres Ahli Anestesi ASEAN
2. Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN IV

B. Kerja Sama Palang Merah ASEAN

C. Kerja Sama Lingkungan Hidup

1. Masalah Kebakaran Hutan
2. Seminar Lingkungan Hidup

V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. Hubungan ASEAN-Vietnam

1. Keinginan Vietnam Menjadi Anggota ASEAN
2. Reaksi dan Komentar

B. Hubungan ASEAN-Asia Pasifik

- Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik

VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH KAMBOJA

- Pertemuan SNC

I. PERSIAPAN KTT ASEAN IV

Siaran pers Pemerintah Singapura tanggal 21 Nopember 1991 mengatakan bahwa: (1) KTT ASEAN IV bulan Januari 1992 perlu mengambil prakarsa baru untuk mempererat kerja sama ekonomi di antara anggotanya; (2) ASEAN harus memperluas dan mengintensifkan kerjasamanya agar tetap relevan dengan perubahan-perubahan lingkungan internasional yang sangat cepat; (3) KTT perlu meninjau kembali perkembangan-perkembangan besar di bidang ekonomi dan politik internasional yang terjadi sejak KTT Manila 1987 serta mempertimbangkan implikasinya terhadap wilayah Asia Tenggara (*Kompas*, 22-11-1991).

Dalam pertemuan Pengusaha ASEAN-Jepang yang berlangsung di Singapura tanggal 19 Nopember 1991, Menteri Negara Senior Pendidikan Singapura, Tay Eng Soon, mengatakan bahwa: (1) KTT ASEAN IV perlu mempertimbangkan sebuah paket langkah-langkah yang tegas untuk membantu perkembangan perdagangan ASEAN seperti: (a) usul pembentukan perdagangan bebas ASEAN (AFTA-ASEAN Free Trade Area); (b) pengurangan secara progresif bea masuk yang menyeluruh intra ASEAN; (c) penghapusan hambatan non-tarif, seperti kuota, kontrol ekspor dan subsidi; (2) KTT akan diawali dengan pertemuan SOM bidang ekonomi dan para Dirjen (*Kompas*, 22-11-1991).

II. KERJA SAMA EKONOMI

A. MASALAH PERDAGANGAN BEBAS

1. Seminar Perdagangan Bebas ASEAN

Seminar bertema Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 28 Nopember 1991, diselenggarakan oleh Institut Manajemen Prasetya Mulya dihadiri antara lain oleh Menteri Perdagangan Arifin Siregar, Menteri Perindustrian Ir. Hartarto, Sekjen Depertemen Perindustrian, Ilahadi Elias, Dirjen Seknas ASEAN Agus Tarmidzi, Prof.Dr. Suhadi Mangkusuwondo, Prof.Dr. Moch.Sadli, Sofjan Wanandi, Anggota DPR Marzuki Darusman.

Prof.Dr. Suhadi Mangkusuwondo mengatakan pada seminar itu bahwa: (1) ASEAN sangat perlu untuk menarik dana dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas, sebab selama dasawarsa 1990 dunia mengalami kelangkaan dana; (2) rencana ME menyatakan pasarnya ternyata mampu menarik pemodal besar memasuki daerah itu, karena potensi pasarnya besar, dan ASEAN dapat menarik pelajaran dari keberhasilan itu dengan mengambil langkah serupa; (3) perdagangan bebas ASEAN tidak hanya mampu

menarik modal asing yang diperebutkan, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi semua negara anggota ASEAN; (4) manfaat perdagangan bebas ASEAN antara lain: (a) terjadinya 50% penurunan tarif untuk beberapa komoditi yang diperdagangkan sesama ASEAN akan sangat bermanfaat; (b) kegiatan ekspor dan impor intra-ASEAN akan meningkat tajam dan kenaikannya akan terbagi merata; (c) sebagian kenaikan impor merupakan penciptaan impor baru dan sebagian lainnya berupa pengalihan impor dari negara lain sesama ASEAN; (d) kenaikan ekspor sama sekali tidak akan mengurangi jumlah ekspor ke luar ASEAN; (e) sukses perdagangan ASEAN akan semakin mengkokohkan hubungan dan keterikatan yang menguntungkan ASEAN; (5) antusias ke arah pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN sangat rendah, terutama masyarakat Indonesia sama sekali tidak tertarik dengan rencana itu sebab: (a) ASEAN lebih disibukkan oleh masalah Kamboja; (b) dunia usaha Indonesia sangat sibuk memikirkan kesulitan ekonomi dalam negeri; (c) sikap pengusaha yang skeptis akan kemungkinan terbentuknya perdagangan bebas ASEAN, karena ASEAN memang belum siap memperdagangkan secara bebas komoditi dalam jumlah dan jenis yang lebih banyak; (6) jika dalam suatu area perdagangan bebas satu negara diperbolehkan untuk tidak ikut serta adalah kurang irasional atau tidak masuk akal (*Kompas*, 29-11-1991); (7) bila ASEAN tidak mengambil keputusan yang berani dalam KTT-ASEAN IV nanti, tarikan ekonomi dari luar yang semakin kuat akan memperlemah kerja sama regional ini; (8) kehadiran forum APEC yang lebih efektif sekarang dan penandatangan Bilateral Trade and Investment Framework Agreement antara Singapura dan AS, Muangthai dan AS serta Filipina dan AS telah membuka pintu baru bagi ASEAN untuk secara sendiri-sendiri mengadakan ikatan baru dengan pihak luar (*Suara Karya*, 29-11-1991).

Pada saat yang sama, Menteri Perdagangan Arifin Siregar mengatakan bahwa: (1) meskipun perhatian ASEAN pada masalah ekonomi baru mulai, tetapi telah mampu menunjukkan sisi-sisi cerah di bidang perdagangan; (2) jika di ASEAN dibentuk perdagangan bebas, negara anggotanya harus berani menanggung konsekuensinya, terutama Indonesia harus siap: (a) menerima investasi dengan persyaratan yang sangat mudah; (b) menerima impor berbagai barang dari sesama negara anggota ASEAN; (c) proteksionisme yang lebih ringan (*Kompas*, 29-11-1991).

Menteri Perindustrian Ir. Hartarto mengatakan bahwa: (1) rencana pembentukan perdagangan bebas hanya akan memperdagangkan produk-produk industri; (2) tidak semua produk industri diperdagangkan secara bebas seperti barang modal, industri kecil dan produk

yang berkaitan dengan kesehatan. Sementara itu, produk industri yang belum mampu bersaing dapat dikecualikan; (3) negara anggota ASEAN yang belum memiliki kemampuan mencrima perdagangan bebas boleh memilih tidak ikut kawasan perdagangan bebas ASEAN; (4) komoditi Indonesia yang paling dapat diandalkan adalah tekstil, elektronik, produk kimia, sumber daya alam olahan dan beberapa produk industri kecil; (5) pembatasan perdagangan bebas komoditi itu perlu dilakukan untuk melindungi industri Indonesia (*Kompas*, 29-11-1991).

Sementara itu, Sofjan Wanandi mengatakan bahwa: (1) Indonesia belum memiliki daya saing karena itu tidak dapat berbuat banyak dalam perdagangan bebas; (2) jika perdagangan bebas dilaksanakan, Indonesia harus benar-benar siap. Untuk itu beberapa deregulasi harus segera dilakukan dan jangan hanya mempersoalkan masalah moneter yang hanya memberatkan pengusaha (*Kompas*, 29-11-1991).

Sedangkan Rudy Pesik mengatakan bahwa: (1) dilihat dari sisi Indonesia, perdagangan bebas itu dapat mematikan industri dalam negeri; (2) pengusaha Indonesia belum siap memasuki era perdagangan bebas, kecuali untuk komoditi-komoditi tertentu (*Kompas*, 29-11-1991).

Sekjen Departemen Perindustrian Ilchadi Elias mengatakan bahwa: (1) jika perdagangan bebas dilaksanakan dapat mematikan industri Indonesia, karena itu perlu memilih-milah komoditi yang perlu di perdagangkan; (2) secara historis perdagangan intra ASEAN tidak dapat dikatakan sukses; (3) meskipun dikeluarkan peraturan penurunan tarif 50% dari tarif umumnya, tetapi pelaksanaannya tidak berhasil. Di satu pihak perdagangan yang berdasarkan penurunan tarif hanya mencapai US\$289 juta, di lain pihak perdagangan di luar pengenaan tarif mencapai US\$19 miliar; (4) kegagalan perdagangan itu disebabkan oleh unsur birokrasi yang sangat menghambat, tidak konsistennya setiap anggota ASEAN untuk memberikan kemudahan tarif dan pengenaan perubahan tarif yang tidak menentu; (5) perdagangan bebas tidak akan mampu berkembang karena produk RI kurang diminati di Malaysia demikian pula sebaliknya; (6) data yang menunjukkan perdagangan intra ASEAN tidak berkembang adalah ekspor intra ASEAN pada tahun 1970 hanya memiliki porsi sebesar 19,8% dari total ekspor US\$6,154 juta, kemudian tahun 1980 ekspor intra ASEAN hanya 16,7% dari total US\$66,534 juta dan pada tahun 1989 hanya 17,4% dari total US\$119,536 juta (*Kompas*, 29-11-1991).

Marzuki Darusman mengatakan bahwa: (1) gagasan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ber-

bagai hubungan bilateral di bidang ekonomi menunjukkan perlunya segera dicarikan dan diciptakan struktur kerja sama baru ASEAN; (2) dibandingkan dengan gagasan baru tentang keamanan, dari segi jumlah dan kejelasan konsep ekonomi lebih memperoleh tanggapan dalam proses pendalaman integrasi ASEAN (*Kompas*, 29-11-1991).

Sedangkan Dewi Fortuna mengatakan bahwa: (1) dipandang dari jauh ASEAN sangat indah, tetapi kerja sama ekonominya hampir tidak berarti; (2) Indonesia yang seringkali dianggap sebagai batu penjuru ASEAN tidak memperlancar kerja sama ekonomi ASEAN. Padahal ketika Kamboja jatuh pada tahun 1976 kerja sama ekonomi dinilai penting untuk mempertahankan kelestarian ASEAN; (3) sudah seharusnya kerja sama ekonomi ASEAN merupakan bagian dari perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang (*Suara Karya*, 29-11-1991).

Dr. Djisman Simandjuntak dari CSIS mengatakan bahwa: (1) Singapura dan Muangthai akan mendominasi perdagangan intra ASEAN jika rencana perdagangan bebas diberlakukan dan Indonesia akan sulit bersaing dengan mereka karena: (a) basis industri kedua negara itu selangkah lebih maju dibandingkan dengan Indonesia; (b) perencanaan makro industri nasional Indonesia kurang memperhatikan perubahan eksternal yang terjadi selama ini, bahkan kebijakan makro ekonomi kadang-kadang kurang konsisten; (c) keterbatasan sejumlah infrastruktur, seperti listrik dan transportasi serta kurangnya investasi di bidang sumber daya manusia; (2) lahirnya kesepakatan negara anggota ASEAN dengan pihak luar menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN tidak ingin terintegrasi (*Media Indonesia*, 29-11-1991).

2. Pernyataan KADIN ASEAN Tentang AFTA

Siaran pers KADIN ASEAN dalam Harian The Nation Bangkok tanggal 2 Desember 1991 mengatakan bahwa KADIN ASEAN: (1) mendukung terciptanya kawasan perdagangan bebas ASEAN secara bertahap untuk mengurangi tarif impor produk-produk yang diperdagangkan di ASEAN selama 15 tahun; (2) menghendaki agar konsep perdagangan bebas diterapkan untuk jasa-jasa dan barang modal; (3) menyetujui jika untuk sementara waktu hasil-hasil pertanian dikecualikan; (4) mendukung pembentukan perdagangan bebas melalui metode *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang diusulkan Indonesia (*Media Indonesia*, 3-12-1991).

3. Masalah Pelaksanaan AFTA

Menteri Perdagangan Arifin Siregar mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 6 Desember 1991 bahwa: (1) ASEAN perlu segera menyepakati pelaksanaan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), agar negara-negara anggotanya tidak bergabung dalam wadah lain; (2) KTT ASEAN mendatang diharapkan dapat menyetujui usul para Menteri mengenai masalah AFTA; (3) AFTA perlu segera dilaksanakan sejalan dengan akan berfungsinya Pasar Tunggal Eropa (PTE) 1993, sementara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko telah sepakat membentuk kawasan perdagangan bebas serupa; (4) pembentukan AFTA diharapkan akan memacu peningkatan perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN yang selama ini berjalan lamban; (5) mengingat pelaksanaan AFTA diberlakukan secara bertahap, maka yang perlu dibicarakan adalah bukan kehadiran AFTA tetapi jenis produk yang dimasukkan ke dalamnya; (6) pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN akan menguntungkan konsumen, karena para produsen yang selama ini menikmati perlindungan pemerintah terpaksa meningkatkan produktivitas mereka; (7) masuknya barang produksi satu negara ke negara lain akan menguntungkan konsumen karena mereka memiliki berbagai pilihan; (8) kemiripan struktur ekonomi negara-negara anggota ASEAN seperti masih bertumpu pada sektor pertanian, menuju proses industrialisasi, jenis produk yang serupa dan banyaknya proteksi merupakan hambatan untuk mewujudkan perdagangan bebas ASEAN selama ini; (9) dalam beberapa tahun terakhir struktur ekonomi ASEAN semakin kokoh dan sektornya semakin luas, termasuk program diversifikasi produk dan manufakturnya telah berkembang sehingga membuka peluang kerja sama; (10) ASEAN harus mawas diri menghadapi perkembangan perdagangan global yang penuh proteksi dan munculnya blok perdagangan di berbagai belahan dunia (*Suara Karya*, 7-12-1991).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Ir. Hartarto mengatakan bahwa: (1) Indonesia telah berani bersaing dan membuka pasarnya untuk barang impor produk manufaktur; (2) untuk kepentingan konsumen dalam negeri produk manufaktur Indonesia jangan terus diberi perlindungan, karena akan mengakibatkan kurang berani mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan daya saingnya; (3) kesediaan Indonesia memasuki AFTA terecermin dari berbagai kebijaksanaan deregulasi yang dikeluarkan, sebab deregulasi itu ikut membuka pasar Indonesia bagi negara-negara ASEAN dan di luar ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 7-12-1991).

4. Konsep AFTA

Deputi PM Singapura, Lee Hsien Loong, mengatakan kepada AFP tanggal 15 Desember 1991 bahwa: (1) KTT ASEAN IV diharapkan akan menerima usulan AFTA tanpa perubahan yang berarti; (2) KTT akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan berbagai modifikasi teknis dari rencana yang disusun para Menteri Ekonomi bulan Oktober di Kuala Lumpur, Oktober 1991; (3) KTT akan mempertimbangkan Vietnam sebagai mitra dialog, tetapi masa depan kerja sama dengan Hanoi itu sangat tergantung dari sikap Vietnam terhadap perdagangan bebas; (4) konsep AFTA merupakan usulan Muangthai; (5) ASEAN mengalami banyak kemajuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di Asia Tenggara; (6) situasi sekarang berat bagi ASEAN untuk memajukan kerja sama ekonomi. AS dan Eropa sedang bergerak, dan ASEAN perlu meningkatkan posisinya; (7) keputusan membentuk Pasar Tunggal Eropa secara intrinsik tidak buruk bagi ASEAN, tetapi kesempatan pasar bagi penanaman modal akan membuat modal lari dari Asia; (8) para pejabat ASEAN sedang bekerja menyusun perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani dalam KTT IV; (9) pembentukan AFTA merupakan keputusan yang bagus, apalagi tidak dikutsertakannya bidang pertanian dan jasa sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran; (10) untuk merendahkan bea masuk di wilayah-wilayah yang diperkirakan lemah, sebuah negara diperbolehkan tidak ikut serta dalam peraturan perjanjian AFTA; (11) Filipina dan Indonesia khususnya berhati-hati untuk menerima perjanjian itu; (12) KTT akan membicarakan usul Malaysia mengenai *East Asian Economic Caucus* (EAEC) yang sudah mengalami banyak perubahan dari usul pertamanya, karena menghadapi tantangan dari AS; (13) ASEAN mendukung pembentukan sebuah badan tidak resmi yang akan membicarakan agenda atau jadwal pertemuan mengenai EAEC (*Kompas*, 16-12-1991).

B. Kerja Sama Industri, Mineral dan Energi

1. Pertemuan AFCM

Pertemuan ke-7 Federasi Produsen Semen ASEAN (AFCM) berlangsung di Yogyakarta tanggal 21-23 Nopember 1991 untuk membahas persediaan semen, program peningkatan dan perluasan industri semen ASEAN.

Dirjen Industri Kimia Dasar Wardiyasa mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) para produsen semen di Indonesia merasa terpukul oleh kebijaksanaan pemerintah tahun 1990 yang membatasi

ekspor semen, karena harus membatalkan kontrak yang telah ditandatangani dengan para importir dari berbagai negara sehingga menurunkan kredibilitas mereka. Di samping itu, para pengelola jasa angkutan laut juga menuntut ganti rugi dari pembatalan kontrak angkutan semen; (2) dalam 10 tahun terakhir ini Indonesia telah menjadi eksportir semen terbesar ASEAN; (3) dengan produksi 17 juta ton per tahun, Indonesia mampu menebus pasar di 20 negara, terutama Bangladesh yang merupakan importir semen Indonesia terbesar; (4) pembatasan eksport semen cukup rasional, karena semakin meningkatnya konsumsi semen di dalam negeri; (5) pembatasan eksport semen dilakukan karena perbandingan antara penawaran dan permintaan saat ini masih timpang, meskipun telah dilakukan optimalisasi produk dari semua pabrik semen; (6) pembatasan eksport semen akan diberlakukan sampai kebutuhan dalam negeri benar-benar terpenuhi (*Bisnis Indonesia*, 27-11-1991).

Hasil pertemuan antara lain: (1) kurangnya produksi semen di masing-masing negara anggota ASEAN akan tetap berlanjut sampai tahun 1992; (2) melalui program peningkatan dan perluasan industri semen, pada tahun 1993 akan terjadi surplus semen; (3) sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dan saling pengertian antar sesama anggota AFCM yang mengalami kesulitan produksi dan pemasaran; (4) sepakat membebaskan harga semen untuk memenuhi kebutuhan semen dalam negeri; (5) sepakat membentuk komite kerja sama teknik dan pemasaran serta komisi pengembangan sumber daya manusia yang diketuai oleh Masri Saridan, Direktur PT Semen Tonasa Indonesia; (6) sepakat memperluas pasar ke berbagai negara, seperti Vietnam, Myanmar dan Kamboja; (7) komite bertugas melaksanakan berbagai simposium, pertemuan dan lokakarya serta menjalin kerja sama dengan asosiasi semen seluruh dunia (*Bisnis Indonesia*, 27-11-1991).

2. Pertemuan Pusat Informasi Ketenaga Listrik

Pertemuan Pusat Informasi Ketenaga Listrik (*Electric Power Information Centre* atau EPIC) ASEAN ke-7 berlangsung di Bali Tanggal 5-8 November 1991, dihadiri 23 delegasi dan 9 peninjau dari negara anggota ASEAN kecuali Brunei Darussalam, serta 40 perwakilan dari badan pengelola ketenaga listrik ASEAN, untuk membahas penciptaan informasi ketenaga listrik, aspek finansial, perencanaan dan pengembangan tenaga listrik (*Antara*, 6-11-1991).

Dirut PLN Ermansyah Jamin mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) pertemuan bertujuan menciptakan informasi ketenaga listrik; (2) EPIC meru-

pakan salah satu dari sembilan proyek kerja sama yang ditetapkan dalam pertemuan para pimpinan perusahaan ketenaga listrik ASEAN tahun 1981 di Jakarta; (3) di kawasan Pulau Batam sedang diperlakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga diesel (PLTD) yang berkapasitas 4,5 megawatt. Kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan proyek itu dapat diekspor ke Singapura dan Malaysia. PLN akan segera mengadakan inventarisasi dan reorganisasi sistem jaringan listrik yang dapat langsung dipasok ke industri-industri yang membutuhkannya untuk mempercepat pengaturan sistem interkoneksi jaringan tenaga listrik di Pulau Batam; (4) PLN sebagai BUMN penghasil tenaga listrik terbesar di kawasan ASEAN sekarang ini potensi pelanggannya 12 juta dan dalam tahun 2000 akan mencapai 25 juta pelanggan (*Antara*, 6-11-1991).

C. KERJA SAMA PANGAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

- Pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN

Pertemuan para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN ke-13 berlangsung di Muangthai tanggal 31 Oktober-2 November 1991 untuk membahas upaya peningkatan pertanian dan perdagangan hasil pertanian antara negara anggota ASEAN.

Ketua delegasi Muangthai, Wakil Menteri Pertanian Ajva Taulananda, mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN perlu mempererat kerja sama ekonomi regionalnya untuk menghadapi perubahan pola pertanian yang begitu cepat dan meningkatkan perdagangan hasil pertanian; (2) ASEAN perlu membentuk kelompok khusus yang menyusun kebijakan baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat perubahan pola pertanian baik regional maupun internasional; (3) kelompok khusus ini akan mengkaji cara meningkatkan perdagangan hasil pertanian antar negara anggota ASEAN dan mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil hutan dan pertanian; (4) Muangthai sangat memperhatikan dampak perkembangan sektor pertanian terhadap lingkungan di kawasan ASEAN (*Merdeka*, 4-11-1991).

Hasil pertemuan antara lain: (1) sepakat untuk bekerjasama mempromosikan 12 produk pertanian utama dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN. Langkah ini merupakan permulaan yang baik untuk meningkatkan ekspor hasil pertanian dan menghadapi proteksionisme perdagangan hasil pertanian; (2) mendukung himbauan Muangthai agar ASEAN menanggapi tumbuhnya kesadaran lingkungan dan memperbaiki

inutu produk guna mempertahankan pangsa pasar di negara industri (*Merdeka*, 4-11-1991); (3) sepakat melaksanakan sebuah rencana aksi bersama untuk melestarikan hutan tropis di ASEAN untuk mempertahankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan; (4) mempersiapkan diri untuk menghadiri konferensi PBB mengenai lingkungan dan pembangunan yang akan berlangsung di Brasil, Juni 1992; (5) melihat pentingnya sikap bersama untuk mempertahankan diri dari tuduhan negara-negara maju atas kebijakan ASEAN mengenai hutan tropis; (6) ASEAN akan menjelaskan kepada dunia bahwa industri hutannya diawasi ketat untuk menjamin pertumbuhan dan lingkungan; (7) sepakat memperbanyak riset dan latihan mengenai masalah hutan tropis karena sangat diperlukan ASEAN; (8) sepakat mengenai pertemuan ke-14 dilangsungkan di Indonesia tahun 1992 (*Angkatan Bersenjata*, 4-11-1991).

Seusai pertemuan, Menteri Pertanian Muangthai Anat Arbhabhirom, mengatakan: (1) rencana aksi bersama ASEAN akan mencakup pemberian informasi kepada dunia bahwa ASEAN sangat memperhatikan masalah penebangan hutan; (2) Indonesia yang memiliki banyak hutan berjanji akan mengawasi penebangan hutan secara ketat; (3) ASEAN akan mengirim wakil-wakilnya untuk memantau kampanye menentang penebangan hutan tropis; (4) pengelolaan hutan tropis, riset, penebangan, pemrosesan kayu, pemasaran dan pembangunan industri hutan akan dilaksanakan sesuai dengan aksi bersama serta kerja sama ASEAN dan negara-negara maju (*Angkatan Bersenjata*, 4-11-1991).

III. KERJA SAMA NON EKONOMI

- KERJA SAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

1. Sidang Umum CAJ

Sidang Umum Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) ke-9 dengan tema "Garis Aksi Tindakan Wartawan ASEAN 1990" berlangsung di Bangkok tanggal 4-7 Nopember 1991, dihadiri 200 orang peserta dari ASEAN dan peninjau dari berbagai negara di Asia, Amerika Utara dan Australia untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi wartawan ASEAN dalam menjalankan profesi mereka (*Antara*, 5-11-1991).

PM Muangthai, Anand Panyarachun, mengatakan dalam pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) apapun sistem demokrasi dalam bentuknya yang aktual harus menghasilkan pemerintah yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan pers; (2) menurut penelitian terdapat 300 bentuk demokrasi, karena

itu membangun demokrasi tidak dapat menjiplak negeri lain; (3) pemerintahan mayoritas hendaknya menghargai sepenuhnya hak-hak minoritas. Artinya setiap orang atau kelompok mempunyai hak dan kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya; (4) demokrasi hanya bersfungsi jika rakyat berpartisipasi; (5) partisipasi rakyat harus digalakkan dengan menjamin bahwa setiap orang berhak untuk didengarkan dan berpartisipasi; (6) kebebasan pers dan kebebasan organisasi kemasayarakatan sangat berperan agar demokrasi bersfungsi, karena akhirnya rakyat yang harus mengontrol pemerintah; (7) kebebasan pers agar disertai dengan kredibilitas dan integritas, antara lain dengan meningkatkan kesamaan dan mutu serta menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dan mengurangi sensasionalisme; (8) pers perlu memperbesar kerja sama antar media ASEAN dan mewujudkan itikad baik yang mengatasi tapal batas nasional dan tapal batas lainnya; (9) Muangthai akan tetap melanjutkan berlakunya ekonomi pasar, ekonomi terbuka, deregulasi dan kompetisi; (10) sulit bagi negara-negara kecil untuk bersaing di pasar internasional dengan negara-negara yang lebih kuat yang semakin diperkuat dengan kemampuan kompetitifnya melalui aliansi-aliansi perdagangan bebas yang baru; (11) menurut konstitusi Muangthai yang baru, calon PM harus seseorang yang terpilih melalui pemilu atau oleh parlemen tanpa melalui pemilu (*Kompas*, 5-11-1991).

Ketua delegasi Muangthai, Manich Sooksomchetna, mengatakan bahwa: (1) pengawasan pers di Muangthai dimasa lalu sangat ketat, sebab suatu pembicaraan harus mendapat ijin dari pemerintah, termasuk pengawasan untuk mendapatkan ijin penerbitan pers; (2) di Muangthai sejak tahun 1976 dijalankan pengawasan dan larangan terhadap suatu pemberitaan; (3) sejak tahun 1990 pers di negaranya mulai merasakan kebebasan dan bebas dari pengawasan pemerintah; (4) kebebasan pers di negaranya sekarang lebih longgar dibandingkan dengan pers di berbagai negara Asia lainnya (*Antara*, 5-11-1991).

Ketua delegasi Filipina Julius F. Fortuna, mengatakan bahwa: (1) keadaan ekonomi negaranya yang sangat berat belakangan ini menyebabkan penghasilan wartawan menjadi sangat rendah dibandingkan dengan profesi lainnya; (2) persaingan yang tidak sehat antara para penerbit di Filipina saat ini mengakibatkan timbulnya wartawan ampol; (3) sejak tahun 1986 tereatasi 32 orang wartawan Filipina meninggal dalam melaksanakan tugasnya, namun disanggah pemerintah.

Sekjen Malaysian National Union of Journalist (NUJM), Don Ec S Seng, mengatakan bahwa: (1) pers Malaysia dalam beberapa tahun lalu sangat terpe-

ngaruh oleh sikap multi ras, tetapi kini telah berhasil dibina dalam kerukunan antar ras, khususnya dalam penerbitan yang beraneka ragam bahasa; (2) kondisi ekonomi wartawan di Malaysia cukup baik dibandingkan dengan para pekerja industri maupun profesi lainnya di Malaysia; (3) meningkatnya perkembangan ekonomi di Malaysia telah mendorong NUJM mengusahakan suatu status profesi yang lebih terjamin (*Antara*, 5-11-1991).

Hasil pertemuan antara lain mendesak: (1) pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk mengembangkan sistem pers yang bebas dan bertanggung jawab; (2) pemerintah negara-negara Asia Tenggara agar menghapuskan segala peraturan yang menghambat dan menolak adanya kebebasan mengeluarkan pendapat, tetapi hendaknya mendukung dan melindungi media massa untuk melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya; (3) penguasa agar menejptakan suatu lingkungan yang dapat mengembangkan profesionalisme jurnalistik termasuk pertumbuhan industri media massa; (4) para wartawan ASEAN agar mengembangkan liputan berita-berita dengan perspektif ASEAN, termasuk berita-berita dari negara tetangganya dengan memperhatikan isu-isu yang sensitif; (5) wartawan ASEAN agar memperluas terciptanya suatu keharmonisan dan solidaritas di antara pemerintah-pemerintah ASEAN dan rakyatnya. Selanjutnya mereka: (1) menyambut dan mendukung pandangan PM Muangthai tentang kebebasan pers yang merupakan suatu termometer dari demokrasi, sebab tanpa kebebasan dasar tersebut demokrasi tidak dapat berkembang; (2) menyampaikan rasa simpati kepada 300 wartawan Filipina yang menjadi korban letusan gunung Pinatubo dan meneatai permintaan bantuan mereka; (3) mengucapkan terima kasih kepada berbagai organisasi dan lembaga-lembaga internasional yang selama ini memberikan bantuan pendidikan dan peningkatan keterampilan wartawan ASEAN di berbagai tempat seperti, Jepang, Kanada, Jerman dan lain-lainnya; (4) menetapkan berlakunya kartu pers ASEAN yang dikeluarkan oleh CAJ sejak tahun 1991; (5) menetapkan Malaysia sebagai penyelenggara sidang para direktur CAJ tahun 1992 dan menyelenggarakan Sidang Umum CAJ X tahun 1993 di Indonesia; (6) memilih Bandhit Rajavatanadhanin dari Muangthai sebagai Presiden CAJ untuk masa bakti 1991-1993 (*Suara Pembaruan*, 8-11-1991).

2. Konferensi Guru ASEAN

Konferensi Guru ASEAN (*ASEAN Teacher Convention* atau ATC) ke-13 dengan tema "Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan" berlangsung di Bali tanggal 28-30 Nopember 1991, dihadiri 500

orang peserta dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Muangthai, Singapura dan Brunei Darussalam untuk membahas masalah globalisasi dan dampaknya dalam pembangunan (*Antara*, 21-11-1991).

Menteri Pendidikan Fuad Illassan mengatakan dalam pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) perubahan-perubahan yang terjadi akibat globalisasi, khususnya di bidang ilmu dan teknologi, di samping berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga harus diwaspadai kemungkinan dampak negatifnya bagi perubahan sosial dan budaya; (2) membahas dampak globalisasi di bidang pembangunan dan pendidikan semata adalah tidak cukup. Oleh karena itu perlu dikembangkan sikap yang tepat di kalangan anak didik dan generasi muda agar mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat proses globalisasi itu; (3) globalisasi yang tidak dapat dihindari dapat menejptakan masa depan yang tidak dapat dipastikan (*Kompas*, 30-11-1991).

Delegasi Indonesia Lukman Ali, mengatakan bahwa pemasyarakatan karya sastra belum tertangani secara baik, karena karya sastra belum menjangkau masyarakat luas menumbuhkan sikap positif pembaca terhadap nilai-nilai insani menghadapi kehidupan manusia (*Kompas*, 30-11-1991).

Prof.Dr. Sadi Ilutomo mengatakan bahwa di Indonesia kurang perhatian terhadap masalah mobilitas dalam buku-buku telaah sastra. Hal ini mengakibatkan pada pelajaran sastra yang bersifat historis, sehingga kedudukan pengarang dan karyanya kadang-kadang disalah tafsirkan. Buku "Soerapati" saduran Abdool Mocis misalnya, karena sebagai karya yang terbit tahun 1950, maka kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat kurang berarti dibandingkan dengan Salah Asochan (1928) (*Kompas*, 2-12-1991).

Pertemuan sepakat untuk: (1) mempererat solidaritas dan kerja sama serta meningkatkan profesionalisme dan status sosial mereka; (2) membentuk kelompok kerja yang bertugas merancang pembentukan organisasi guru ASEAN, termasuk struktur, tugas, sistem, fungsi dan prosedurnya; (3) menyarankan kepada organisasi guru sedunia agar tidak memberikan perhatian kepada hal-hal yang tidak berhubungan dengan tujuan organisasi guru; (4) menyelenggarakan konvensi ACT XIV di Filipina tahun 1992 dengan mengundang beberapa negara di luar ASEAN (*Media Indonesia*, 2-12-1991).

3. Pertemuan Pejabat Tinggi Agama ASEAN

Pertemuan para Pejabat Tinggi Agama ASEAN berlangsung di Bandung tanggal 11-13 Nopember

1991, dihadiri 30 peserta dari Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk membahas program kerja dan merumuskan bahan-bahan yang akan disahkan oleh ketiga Menteri Agama dalam Musyawarah Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia (MABIM) ke-3 di Bandung tanggal 14 Nopember 1991 (*Pelita*, 12-11-1991).

Seusai membuka pertemuan, Sekjen Departemen Agama, dr.H. Tarmizi Taher mengatakan kepada pers bahwa: (1) MABIM ke-3 akan memutuskan penyelarasan kajian strategi pembinaan akidah islamiyah, penyelarasan pengawasan barang gunaan dan makanan orang Islam dan penyelarasan rukyah dan takwim Islam; (2) dalam SOM tiap negara akan menyampaikan kertas kerja masing-masing; (3) Brunei akan menyampaikan makalah tentang Pertukaran Penerbitan, Malaysia mengenai Pusat Kajian Islam dan Indonesia membahas Pembentukan Pesantren Bersama dan Kerja Sama Seni Budaya Islam, sedangkan Singapura tentang Rencana Pengadaan Rumah Pemotongan Hewan (*Pelita*, 12-11-1991); (4) dalam MABIM ke-3 Filipina dan Muangthai akan hadir sebagai peninjau (*Pelita*, 14-11-1991).

Pada saat yang sama, Setia Usaha Menteri Hal Ehwal Ugama Brunei, Dato Paduka Abdul Saman bin Kahar, mengatakan bahwa: (1) perkembangan Islam di Indonesia maju pesat baik dalam bidang ekonomi maupun stabilitas politik; (2) umat Islam di Indonesia telah lebih maju dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain, karena telah mendirikan bank Islam; (3) umat Islam yang berada di Timur harus sungguh-sungguh menerapkan ukhuwah Islamiyah, agar negara-negara Barat melihat bahwa umat Islam bersatu; (4) Pusat Penterjemahan Asia Tenggara, khususnya penterjemahan bahan-bahan keagamaan perlu didirikan, karena akan bermanfaat bagi umat Islam di Asia Tenggara. Kerja sama penterjemahan itu dilakukan secara kolektif dan dikerjakan oleh umat Islam di empat negara, baik menyangkut teknis maupun tenaga kerja; (5) pertukaran penerbitan dapat meningkatkan kualitas umat Islam dan dapat membimbing pengertian keagamaan ke arah yang benar; (6) usul mendirikan pesantren bersama di daerah perbatasan Kalimantan sangat baik, karena dapat melahirkan ulama-ulama dan kader-kader Islam yang tangguh, sehingga kehidupan umat semakin mantap; (7) peningkatan kualitas institut pengajian atau institut agama di masing-masing negara perlu mendapat perhatian yang serius; (8) kehaneuran komunis Blok Timur perlu mendapat perhatian serius umat Islam, karena menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang dipereaya dan kemungkinan Islam dapat mengisinya jika umat Islam bersatu; (9) persatuan umat Islam Asia Tenggara dapat dijadikan contoh dan dapat menjadi

panutan negara-negara lain (*Antara*, 14-11-1991); (10) keharmonisan sosial menjadi syarat utama terbinanya suatu negara dan hal itu hanya dapat terwujud bila masalah kehidupan masyarakat telah diselesaikan dan diatur dengan baik; (11) sebagai agama yang selaras dengan naluri dan kehidupan manusia, Islam telah memberi tuntunan bagaimana membina keharmonisan sosial (*Kompas*, 14-11-1991).

Presiden Majelis Ugama Islam Singapura, H. Zainul Abidin Rasheed, mengatakan bahwa: (1) pertemuan MABIM sebaiknya membahas masalah narkotika, obat terlarang dan cangkok organ ginjal; (2) umat Islam perlu memainkan peranan aktif, agar tidak hanya orang-orang sekuler yang dapat berperan di kehidupan politik, tetapi juga umat Islam dapat melakukannya (*Pelita*, 12-11-1991); (3) ide pengadaan rumah pemotongan hewan didasarkan pada keinginan mengoptimalkan ekonomi umat dan menjamin daging memenuhi syareat agama, namun hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut (*Kompas*, 14-11-1991).

4. Pertemuan MABIM

Pertemuan tidak resmi para Menteri Agama tiga negara ASEAN (MABIM) ke-3 berlangsung di Bandung tanggal 14 Nopember 1991, juga dihadiri oleh delegasi Muangthai, Filipina dan Singapura sebagai peninjau, untuk membahas laporan pelaksanaan keputusan pertemuan MABIM ke-2 di Kuala Lumpur dan 5 hal pokok tentang kerja sama pertukaran penerbitan, kerja sama seni budaya Islam, Pusat Kajian Islam, pembangunan pesantren bersama dan pengadaan rumah pemotongan hewan bersama (*Suara Pembaruan*, 14-11-1991).

Menteri Agama II. Munawir Sjadjali mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) pertemuan dimaksudkan untuk mempersatukan umat Islam ASEAN, karena persatuan dan kesamaan pendapat umat Islam di kawasan ini akan semakin memperkokoh perjuangan untuk mewujudkan perdamaian dunia; (2) peranan negara-negara ASEAN cukup memberikan andil untuk mewujudkan perdamaian dunia sebab jumlah umat Islam di kawasan ini sangat banyak; (3) pembangunan yang mendapat dukungan positif masyarakat Islam harus terus menerus memperhatikan agama dan budaya masyarakatnya; (4) perlu diusahakan suatu iklim yang mendukung usaha peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Muslim; (5) keberhasilan modernisasi umat Islam hendaknya tidak membuat berpuas diri. Umat Islam harus berjuang demi kebangkitan Islam (*Pelita*, 15-11-1991).

Sementara itu Menteri Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam, H.M Zein bin H. Serudin mengatakan: (1) pertemuan MABIM tidak meneampuri masalah politik, tetapi membahas masalah sosial kemasyarakatan dan kemaslahatan bersama; (2) di dalam sesama Muslim harus ditumbuhkan semangat bersama agar tercipta kerukunan dan kedamaian bersama memperbaiki tingkat kedudukan umat Islam di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan; (3) Islam sebagai cara hidup harus dilaksanakan dengan baik. Di samping itu Islam harus menyelesaikan setiap permasalahan sesuai dengan dasar etika Islam, sebab hanya dengan cara itu usaha menciptakan perdamaian dunia akan lebih terbuka (*Pelita*, 15-11-1991).

Menyatakan bahwa: (1) Islam sedang memasuki era baru; (2) perlu diwujudkan semangat kesatuan dan persatuan sesama masyarakat muslim di negara anggota MABIM (*Pelita*, 15-11-1991).

Hasil pertemuan antara lain: (1) sepakat untuk menentukan awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama; (2) merencanakan pembangunan pesantren bersama tiga negara yang lokasinya telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat (*Merdeka*, 15-11-1991).

IV. KERJA SAMA NON PEMERINTAHAN (NGO)

A. KERJA SAMA KESEHATAN

1. Kongres Ahli Anestesi ASEAN

Kongres Ahli Anestesi ASEAN ke-VII berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 6-11-1991, dihadiri 350 peserta dari ASEAN dan negara-negara lainnya untuk membahas perawatan kaum lanjut usia (*Antara*, 7-11-1991).

2. Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN ke-IV

Pertemuan para Menteri Kesehatan ASEAN ke-IV berlangsung di Jakarta tanggal 4-5 Desember 1991, dihadiri para Menteri Kesehatan ASEAN kecuali Filipina dan Muangthai yang diwakilkan serta 18 pejabat staf senior bidang kesehatan untuk membahas masalah bahaya penyakit *Aquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) dan kesehatan lingkungan (*Kompas*, 5-12-1991).

Wakil Presiden Sudharmono mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) untuk mewujud-

kan kerja sama kesehatan perlu pemantapan pelaksanaan komunikasi kesehatan melalui pertukaran informasi; (2) pertukaran informasi penting karena masalah kesehatan yang dihadapi ASEAN tidak banyak berbeda, seperti kondisi geografis, pola makanan dan tingkat pendidikan; (3) melalui peningkatan komunikasi itu dapat ditingkatkan pertukaran informasi kesehatan yang memudahkan tukar pengalaman dan saling belajar di kalangan negara anggota ASEAN; (4) masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat strategis, karena tingkat kesehatan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat produktivitas bangsa dan negara serta mempunyai dampak jauh ke depan; (5) pertemuan agar menghasilkan keputusan nyata dan realistik serta memberi manfaat bagi kemajuan dunia kesehatan di negara anggota ASEAN (*Kompas*, 5-12-1991).

Hasil pertemuan antara lain sepakat untuk: (1) membentuk jaringan informasi tentang penyakit AIDS dan masalah lingkungan; (2) mengajukan permasalahan AIDS pada KTT ASEAN yang akan datang (*Suara Karya*, 5-12-1991).

Seusai menutup pertemuan, Menteri Kesehatan dr. Adhyatma MPH mengatakan kepada pers bahwa: (1) kini AIDS telah semakin meluas dan memburuk, sementara mutu lingkungan juga makin menurun akibat cepatnya industrialisasi di negara anggota ASEAN, yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan; (2) menurut WHO, hingga Juni 1991 sekitar 10 juta dewasa dan 1 juta anak di seluruh dunia telah tertular virus AIDS. Enam juta di antaranya terdapat di Afrika dan lebih 1 juta di Asia Selatan dan Tenggara; (3) di ASEAN jumlah penderita AIDS terbanyak di Muangthai sekitar 4.000 ribu orang dan Malaysia 2.500 orang. Meskipun relatif kecil tetapi bahaya peningkatannya semakin tampak, oleh karena itu perlu segera dilakukan penanggulangannya sedini mungkin; (4) sampai sejauh ini AIDS belum ditemukan obatnya dan 75% infeksi virus ini ditularkan melalui hubungan seksual; (5) untuk mengantisipasi AIDS, Indonesia mulai 1992 akan memperluas daerah waspada AIDS dari enam propinsi menjadi 10 propinsi. Langkah ini diambil untuk menekan jumlah penderita maupun yang sudah terinfeksi virus AIDS yang jumlahnya meneapai 40 orang; (6) semakin meluasnya penyakit AIDS memungkinkan meningkatnya jumlah penderita TBC, karena kuman-kuman TBC menjadi aktif. Sehingga peningkatan kasus TBC akan meluas seiring dengan peningkatan kasus infeksi virus AIDS (*Suara Karya*, 5-12-1991).

B. Kerja Sama Palang Merah ASEAN

Pertemuan para Sekjen Palang Merah negara anggota ASEAN berlangsung di Bali tanggal 1 Nopember 1991, dihadiri delegasi-delegasi Indonesia, Malaysia, Muangthai, Singapura dan Filipina, untuk membahas penggalian dana bagi kepentingan organisasi (*Antara*, 1-11-1991).

Sekjen PMI Soetikno Loekitodisastro mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 1 Nopember 1991 bahwa: (1) pertemuan Sekjen Palang Merah ASEAN diprakarsai oleh Liga Parang Merah Internasional; (2) pertemuan ini untuk mengetahui lebih jauh cara negara anggota ASEAN mengumpulkan dana kemanusiaan; (3) Indonesia menawarkan kepada anggota ASEAN lainnya tentang cara menggali dana melalui penyelenggaraan pameran lukisan, karena telah menunjukkan hasil yang baik; (4) penggalian dana yang dilakukan oleh PMI selama ini tidak dipaksa dan tidak ada paksaan untuk memberikan sumbangan; (5) cara meminta sumbangan dengan menghentikan kendaraan di jalan-jalan telah lama dihentikan (*Antara*, 1-11-1991).

C. KERJA SAMA LINGKUNGAN HIDUP

1. Masalah Kebakaran Hutan

Seusai bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim, Menteri Lingkungan Singapura, Ahmad Mattar, mengatakan kepada pers di Singapura tanggal 29 Nopember 1991 bahwa: (1) ASEAN akan mengkaji segala upaya untuk mencegah terbakarnya hutan seperti yang telah terjadi di Kalimantan dan Sumatera akhir-akhir ini; (2) pertemuan kelompok kerja ASEAN yang akan dilakukan bulan Januari 1992 direncanakan membahas penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan cara-cara perlindungan terhadap dampak lingkungan; (3) ASEAN akan mengkaji kemungkinan pembentukan proyek regional yang akan mempekerjakan konsultan asing untuk mengkaji penyebab dan pencegahan terbakarnya hutan; (4) kebakaran yang melanda Kalimantan dan Sumatera telah menimbulkan dampak lingkungan di Singapura dan Malaysia (*Media Indonesia*, 30-11-1991).

Pada saat yang sama, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim mengatakan bahwa: (1) kebakaran di Kalimantan sudah mulai berkurang dengan mulai datangnya musim hujan; (2) kebakaran di Kalimantan paling sedikit menghanguskan 50.000 hektar hutan (*Media Indonesia*, 30-11-1991).

2. Seminar Lingkungan Hidup

Direktur *Private Investment and Trade Opportunities* (PITO) Drs. Bob Widyahartono mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 29 September 1991 bahwa: (1) masyarakat Indonesia belum mempunyai kesadaran yang tinggi mengenai kebersihan lingkungan, karena sebagian besar penduduk masih lebih banyak dihadapkan pada masalah upaya peningkatan taraf hidup; (2) para industrialis tidak pantas memanfaatkan situasi sekarang ini untuk terus melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup; (3) ASEAN bekerjasama dengan *US Business Council* akan menyelenggarakan serangkaian seminar lingkungan hidup di berbagai negara anggota ASEAN, dan Jakarta akan mendapatkan kesempatan pada tanggal 5 Nopember 1991; (4) para industrialis sebaiknya untuk tidak meneemari lingkungan, meskipun pengadaan kebutuhan teknologinya masih dianggap sebagai beban biaya; (5) pengenaan sanksi terhadap perusak lingkungan tidak dapat diharapkan berjalan mulus karena berbagai instansi di Indonesia belum sepakat mengenai pencegahan kerusakan lingkungan hidup; (6) jika satu instansi menekankan agar pencegahan perusakan lingkungan hidup diperketat, instansi lain tidak menanggapi dengan serius; (7) sudah waktunya bagi semua instansi bersepakat mencegah kerusakan lingkungan hidup, karena dunia telah banyak menyorot kerusakan lingkungan hidup di Indonesia (*Kompas*, 1-11-1991).

V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. HUBUNGAN ASEAN-VIETNAM

1. Keinginan Vietnam menjadi anggota ASEAN

Keinginan Vietnam untuk menjadi anggota ASEAN telah dinyatakan lagi oleh Wakil Menlu Vietnam, Vu Khoan, yang mengikuti kunjungan PM Vietnam, Vo Van Kiet, ke Indonesia pada tanggal 24-27 Oktober 1991. Ia mengatakan bahwa Vietnam siap bekerja sama dengan negara-negara tetangganya, dan bersedia menandatangani *Declaration of ASEAN Concord and Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (*Kompas*, 26-10-1991).

2. Reaksi dan Komentar

Menlu Singapura, Wong Kan Seng, mengatakan di Singapura tanggal 29 Oktober 1991 bahwa: (1) pada prinsipnya Singapura tidak keberatan bila Vietnam menjadi anggota ASEAN. Kalau ekonomi Vietnam sudah berkembang setara dengan ekonomi negara-negara ASEAN, dan kebijaksanaan politiknya sudah

sejalan dengan apa yang selama ini berlaku dan diterapkan oleh ASEAN, maka tidak ada alasan untuk tidak menerima Vietnam menjadi anggota ASEAN. Tetapi ini tidak berarti bahwa keanggotaan Vietnam dalam ASEAN akan diterima dalam waktu dekat. Paling tidak dibutuhkan waktu lebih dari 3 tahun bagi Vietnam untuk menata ekonomi dalam negerinya; (2) penandatanganan Persetujuan Paris tentang Kamboja tanggal 23 Oktober 1991 akan dapat memperbaiki dan meningkatkan hubungan Vietnam dengan negara-negara di Asia Tenggara (*Kompas*, 31-10-1991).

Direktur Eksekutif CSIS Jakarta, Dr. Hadi Soesastro, mengatakan di Jakarta tanggal 9 November 1991 bahwa: (1) ASEAN secara resmi perlu segera menanggapi keinginan Vietnam untuk bergabung dalam ASEAN. Bila tidak dikhawatirkan Vietnam akan merasa kehadirannya kurang diterima oleh keenam negara anggota ASEAN; (2) meskipun beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura telah menyambut baik keinginan itu, namun ASEAN perlu menanggapi secara resmi; (3) pada saat sekarang ini, secara politik tidak mungkin membiarkan Vietnam dan negara-negara Indochina lainnya berada di luar. Namun secara ekonomi, kalau tidak diadakan pengaturan-pengaturan, dikhawatirkan masuknya Vietnam dalam ASEAN akan menghambat prospek pendalaman kerja sama ekonomi ASEAN, yang akan diarahkan menuju kawasan perdagangan bebas (*ASEAN Free Trade Area-AFTA*); (4) ada tiga alternatif yang mungkin ditempuh ASEAN, yaitu: (a) langsung menerima Vietnam sebagai anggota ASEAN, sama seperti saat ASEAN menerima Brunei Darussalam menjadi anggota ASEAN. Hal ini berarti, Vietnam diterima sebagai negara penandatangan Deklarasi Bangkok 1967, dengan taruhan mengorbankan pendalaman kerja sama ekonomi ASEAN. Dengan kata lain ASEAN mengorbankan pendalaman kerja sama ekonomi demi memperluas keanggotaan ASEAN; (b) - membentuk suatu forum baru yang baru sama sekali, yaitu Forum Asia Tenggara, di mana Vietnam dan negara-negara Indochina yang lain diikutsertakan. Negara-negara yang menjadi anggota Forum Asia Tenggara itu adalah negara-negara yang menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*). Jadi yang dijadikan basis dari Forum Asia Tenggara adalah penandatanganan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, walaupun isinya adalah kerja sama fungsional tentang ekonomi dan pembangunan. Sementara itu, ASEAN tetap berjalan terus. Dengan demikian Forum Asia Tenggara berjalan seiring dan bersama-sama dengan ASEAN; (c) sama seperti alternatif pertama, yaitu Vietnam menandatangani Deklarasi Bangkok 1967. Namun dalam tahap awal Vietnam tidak termasuk dalam AFTA yang akan diberlakukan

di enam anggota ASEAN terdahulu. Bagi ASEAN tidak mungkin untuk mengajak Vietnam dalam AFTA sejak awal, karena negara itu baru saja meninggalkan sistem perencanaan ekonomi terpadu, dan belum mengenal sistem ekonomi pasar seperti yang selama ini dianut ASEAN; (5) wadah kerja sama antar negara Asia Tenggara tetap satu, yaitu ASEAN, tetapi hanya sebagian dari anggota ASEAN yang membentuk AFTA. Apabila Vietnam sudah dapat ikut serta, maka tinggal bergabung dalam AFTA, yang hanya merupakan sebagian dari kegiatan kerja sama antar negara ASEAN; (6) apabila alternatif ketiga yang dipilih, maka banyak masalah kerja sama ASEAN akan dapat diselesaikan, seperti dualisme dalam kepemimpinan ASEAN atau persaingan antara Menlu dan Menteri Ekonomi ASEAN dapat dihindari. Dengan demikian, ASEAN yang besar itu adalah lahannya Menlu, sedangkan AFTA adalah lahannya Menteri Ekonomi; (7) ia lebih condong kepada alternatif ketiga, karena tidak mengecilkan arti kehadiran Vietnam, dan sekaligus tidak merugikan pendalaman kerja sama ekonomi ASEAN; (8) apabila yang dipilih adalah alternatif kedua, seakan-akan menunjukkan bahwa ASEAN tidak *very welcome*, sehingga akan memperlemah posisi ASEAN (*Kompas*, 12-11-1991).

B. HUBUNGAN ASEAN - ASIA-PASIFIK

- Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik

Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) III berlangsung di Seoul, Korea Selatan, tanggal 12-14 November 1991, dihadiri oleh 26 Menteri yang mewakili 15 negara dari ASEAN, AS, Kanada, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, Australia, Cina, Hongkong dan Taiwan untuk membahas masalah liberalisasi perdagangan (*trade liberation*), Putaran Uruguay; dan masalah keanggotaan baru dalam APEC.

Presiden Korea Selatan, Roh Tac-Woo, mengatakan pada pembukaan sidang bahwa: (1) sudah tiba saatnya bagi APEC untuk membentuk suatu dasar institusional guna mempromosikan perdagangan intra-regional dan kerja sama ekonomi; (2) ia mengimbau pada kelima belas negara yang hadir pada APEC III untuk mempelajari kemungkinan terbentuknya suatu "area perdagangan bebas" yang mencakup seluruh kawasan Asia-Pasifik; (3) ia memberikan empat saran atas perkembangan prinsip dan arah yang harus dicapai APEC, yaitu: (a) APEC harus turut membentuk ekonomi dunia di abad 21 ke dalam suatu ekonomi global dengan memberi contoh melalui regionalisme terbuka di bawah prinsip-prinsip perdagangan bebas. APEC tidak boleh menjadi suatu blok perdagangan.

APEC harus mengembangkan suatu hubungan kerja sama dengan kawasan lainnya agar dapat mencegah terjadinya regionalisme yang *inward-looking*; (b) APEC harus memainkan peran aktif sebagai badan kerja sama regional yang mengikutsertakan ASEAN dan NAFTA; (c) APEC agar berusaha dapat menutup jurang antara negara ekonomi maju dan terbelakang. Negara yang ekonominya maju harus memberikan fasilitas akses pasaran pada negara-negara yang sedang berkembang, juga bagi negara-negara yang sedang menransformasikan ekonominya; (d) di masa mendatang kawasan Asia-Pasifik agar menjadi suatu daerah perdagangan bebas (*Kompas*, 13-11-1991).

Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) APEC telah melampaui tahap penjajakan awal, yang dimulai pada pertemuan APEC I di Canberra November 1989 dan dikonkretkan pada pertemuan APEC II di Singapura Juli 1990; (2) ASEAN tidak menginginkan APEC terlalu cepat dilembagakan; (3) APEC diadakan pada saat putaran Uruguay menghadapi masalah kritis, sebab tahun 1991 ini putaran tersebut harus selesai; (4) ASEAN tidak mau tenggelam dalam APEC; (5) kawasan Asia-Pasifik masih memperlihatkan rasa kepentingan bersama yang terbatas. Kemajuan yang ada masih terbatas pada fungsi kerja sama bilateral, kerja sama antara kelompok sub-regional dan satu negara; (6) sebagai kelompok, APEC masih berada pada tahap-tahap awal mengembangkan kebiasaan-kebiasaan saling konsultasi, kerja sama satu sama lain, dan saling mengenal. Proses yang juga dialami pada sepuluh tahun pertama ASEAN; (7) kawasan Asia-Pasifik jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan ASEAN. Di sana juga terdapat sumber-sumber konflik, permusuhan dan persaingan. Kawasan ini diwarnai oleh banyak perbedaan, tidak saja dalam kebudayaan tetapi juga dalam kecepatan perkembangan ekonomi. Schingga kepentingan masing-masing pun akan berbeda; (8) diperlukan kesabaran, keteguhan dan visi yang jelas bagi APEC; (9) meskipun untuk mencapai daerah perdagangan bebas memerlukan waktu yang cukup lama, namun pasaran yang lebih terbuka dan lebih bebas akan dapat dicapai di Asia-Pasifik (*Kompas*, 14-12-1991); (10) pada akhir tahun 1991 Putaran Uruguay mendekati tahap kritis. ASEAN menerima APEC sebagai kendaraan untuk kerja sama yang lebih luas demi mempertahankan kemajuan (*Kompas*, 15-11-1991).

Menteri Perdagangan, Arifin Siregar, mengatakan bahwa: (1) saling ketergantungan di antara negara-negara ASEAN masih sangat rendah dan semua negara yang bersangkutan harus menyetujui suatu kerangka kerja GATT; (2) ketidak hadiran Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Malaysia dalam pertemuan itu, menandakan bahwa Malaysia merasa

tersinggung atas sikap AS yang tidak setuju pada konsep Kaukus Ekonomi Asia Timur (EAEC). Malaysia tersinggung atas surat Menlu James Baker yang dikirimkan kepada Jepang, yang menyarankan agar Jepang tidak perlu berpartisipasi dalam EAEC. Sebagai akibatnya, pada tanggal 10 November 1991, Menlu Jepang, Michio Watanabe, menyatakan bahwa Jepang tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan yang tidak mengikuti sertakan AS; (3) Indonesia dapat memahami posisi Malaysia sebab Malaysia melihat kepentingan-kepentingan AS, Kanada dan negara-negara lainnya sangat berlainan dengan negara-negara ASEAN. Olh karena itu Malaysia menyarankan suatu kerja sama ekstra (*extra cooperation*), bukan kerja sama intra (*intra cooperation*); (4) EAEC bukan suatu prioritas utama dalam agenda pertemuan APEC di Seoul ini, melainkan arah APEC di masa mendatang; (5) kerja sama perdagangan intra ASEAN masih sangat terbelakang. Kita tidak bisa begitu saja membuka pasaran kita pada dunia luar kalau negara-negara lainnya juga tidak ikut membuka pasaran mereka; (6) perbedaan di antara negara-negara ASEAN dalam kemajuan ekonomi akan menentukan sikap negara tersebut pada APEC dan liberalisasi perdagangan, misalnya Singapura, dengan sendirinya akan cenderung untuk memihak negara-negara APEC yang maju seperti AS dan Jepang. Sementara itu banyak negara di Asia-Pasifik yang masih belum menurunkan tarif, seperti Korea dan Jepang dalam beberapa sektor pertaniannya (*Kompas*, 14-11-1991); (7) kemajuan APEC III ini dapat dilihat dari tujuh proyek, yakni data perdagangan dan investasi, promosi perdagangan, pengembangan investasi dan alih teknologi, pengembangan sumber daya manusia, kerja sama energi, usaha bersama memelihara sumber daya laut, serta proyek kerja sama telekomunikasi yang selesai dibahas dan tiga lagi yakni perikanan, transpor dan turisme yang akan dimulai (*Kompas*, 15-11-1991).

Pada jumpa pers seusai sidang, Menlu AS, James Baker, mengatakan bahwa AS tidak setuju dengan pembentukan sub-group (EAEC) yang akan melemahkan APEC. Tetapi seandainya sub-group tersebut menguatkan APEC seperti NAFTA (*North American Free Trade Area*) yang konsisten dengan GATT maka masalahnya akan menjadi lain. Suatu badan konsultatif yang sengaja menarik garis dan membagi Pasifik bukan merupakan suatu badan yang mendukung adanya kerja sama.

Pendapat Menlu James Baker itu ditentang oleh Wakil Menteri Kehakiman Malaysia, Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar, yang mengatakan bahwa EAEC bukan merupakan suatu forum kebijakan dan EAEC tidak inkonsisten dengan GATT dan APEC. EAEC hanya merupakan forum dialog.

Sidang APEC III menghasilkan Deklarasi Seoul, dan Deklarasi Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang didukung pernyataan bersama oleh 26 menteri dari 15 negara.

Isi Deklarasi Seoul yang sebenarnya telah disetujui pada tanggal 29 Agustus 1991 itu menyetujui perlunya konsolidasi, namun semua anggota tidak menghendaki konsolidasi yang berarti pelembagaan. Deklarasi ini tidak mengikat para partisipan secara hukum dan tidak akan ditandatangani oleh 15 negara anggotanya, tetapi merupakan suatu *gentlemen's agreement* (kesepakatan tak tertulis). Deklarasi yang tidak ditandatangani merupakan konsensus yang dapat diterima semua partisipan, baik yang menginginkan pelembagaan atau tidak. Deklarasi itu berisi tujuh butir, yaitu: (1) APEC bertujuan mempertahankan pertumbuhan serta pembangunan. Hal ini hanya akan dicapai melalui penguatan perdagangan terbuka multilateral dan penurunan hambatan perdagangan yang menghalangi arus perdagangan; (2) perlunya memberikan ruang lingkup kegiatan APEC. Ditekankan yang menjadi landasan kegiatan adalah kepentingan bersama yang akan menghasilkan keuntungan bagi semua, yang mencakup pertukaran informasi, konsultasi kebijakan, dan pengembangan strategi untuk mengurangi hambatan-hambatan; (3) para anggota APEC perlu saling memahami kepentingan serta kebijakan para partisipan lainnya. Untuk ini akan dikembangkan program kerja sama ekonomi; (4) cara kerja APEC berdasarkan konsensus bersama melalui dialog terbuka. Ini memperhitungkan tahap-tahap perkembangan ekonomi yang berbeda dari para partisipan. Butir ini mengakui sumbangan sektor swasta; (5) syarat-syarat partisipan baru. Syarat utama adalah partisipan harus mempunyai hubungan ekonomi yang kuat dengan kawasan Asia-Pasifik. Keputusan untuk menerima anggota baru akan berdasarkan konsensus; (6) masalah organisasi APEC. Ditetapkan pertemuan tahunan menteri untuk menentukan arah dan sifat APEC. Negara yang menjadi tuan rumah akan menjadi pimpinan pertemuan itu juga. Program kerja yang ditentukan pada rapat menteri merupakan tanggung jawab para pejabat tinggi yang akan dibahas pada SOM; (7) masa depan APEC, yang menekankan fleksibilitas (*Kompas*, 15-11-1991).

Deklarasi Putaran Uruguay berisi: (1) APEC III membicarakan prioritas pertama agenda APEC, yakni status Putaran Uruguay dari perundingan perdagangan multilateral; (2) masalah Putaran Uruguay merupakan masalah ekonomi yang kritis yang sedang dihadapi oleh masyarakat internasional; (3) pentingnya suatu sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan kuat; (4) penyelesaian Putaran Uruguay penting bagi pertumbuhan perdagangan dunia, memperlamban tindakan-tindakan proteksionisme, menanam kepercayaan

di dalam pasaran dan untuk mendukung kesinambungan reformasi ekonomi; (5) APEC menyambut tanda-tanda perkembangan di daerah-daerah penting dari negosiasi dan meminta agar kemajuan di bidang pertanian, tekstil dan sepatu, pelayanan, akses pasaran, pembuatan peraturan dan hak milik intelektual diteruskan; (6) suatu Putaran Uruguay yang sukses harus mengikutisertakan liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) barang-barang dan pelayanan; (7) mengambil keputusan politis agar Putaran Uruguay akhir tahun 1991 berhasil (*Kompas*, 15-11-1991).

Dalam seminar dengan judul "Tantangan Bagi Kerja Sama Ekonomi Pasifik" yang diselenggarakan oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) di Jakarta, tanggal 8 November 1991, Dr. Andrew Elek mengatakan bahwa: (1) banyak tantangan bagi pembentukan APEC, sementara perbedaan besar terjadi pada kondisi ekonomi masing-masing negara peserta akan membatasi efektivitas APEC pada tahun-tahun awal; (2) perkembangan dan perubahan perekonomian dunia saat ini merupakan momentum yang tepat untuk lebih mengefektifkan fungsi APEC baik melalui institionalisasi maupun pembentukan struktur yang lebih nyata; (3) proses menuju institionalisasi perlu dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan pemberian struktur APEC itu sendiri; (4) berbagai liberalisasi kini terjadi di berbagai negara anggota APEC, yang menyebabkan kawasan ini semakin terintegrasi dengan sistem perekonomian dunia; (5) meskipun secara politis sulit, anggota APEC hendaknya meningkatkan konsultasi bilateral dan saling mempercayai untuk saling memberikan informasi guna lebih mengefektifkan APEC; (6) perlu adanya konsistensi kebijakan ekonomi di setiap negara dan dibarengi harmonisasi dalam berbagai ketentuan, seperti ekspor-impör dan kepabeanan; (7) model kerja sama ekonomi Eropa yang menuju pasar tunggal tidak sesuai dengan kondisi Asia-Pasifik; (8) perbedaan di antara anggota APEC sangat besar, misalnya tingkat kemakmuran yang sangat berbeda. Hal ini merupakan salah satu penghalang bagi dilakukannya kerja sama ekonomi di Asia-Pasifik; (9) *EFTA (European Free Trade Area)* yang merupakan forum konsultasi antara pejabat tinggi yang membicarakan masalah ekonomi yang aktual dapat dicontoh oleh APEC (*Suara Pembaruan*, 9-11-1991).

VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

- PERTEMUAN SNC

Pertemuan *Supreme National Council* (SNC) dan wakil-wakil kelima anggota tetap DK-PBB berlangs-

sung di Pattaya, Muangthai tanggal 3-5 Desember 1991.

Presiden Khmer Merah, Khieu Samphan, mengatakan bahwa: (1) ia menginginkan pasukan PBB yang ada di Kamboja bukan hanya untuk keselamatan dirinya tetapi juga untuk meneiptakan netralitas politik di negaranya; (2) PBB harus menciptakan suasana politik yang netral.

Utusan Ketua Bersama Konferensi Perdamaian Paris tentang Kamboja, Jean-David Levitte, mengatakan bahwa pertemuan SNC baru dapat dilaksanakan setelah pihak PBB mengatakan kepada Norodom Sihanouk agar proses perdamaian Kamboja segera kembali ke jalurnya dan SNC segera bekerja di Phnom Penh (*Kompas*, 4-12-1991).

Presiden Dewan Nasional Tertinggi Kamboja (SNC), Norodom Sihanouk, mengatakan bahwa: (1) rencana untuk suatu koalisi antara pendukungnya dan pemerintah Negara Kamboja (SOC) dibatalkan; (2) ia hanya percaya 50 persen kepada PM SOC Hun Sen; (3) secara definitif rencana untuk membentuk pemer-

rintahan koalisi sudah dibatalkan; (4) rencana pembentukan pemerintahan koalisi ini tidak hanya ditentang oleh kelompok gerilya lainnya (Khmer Merah dan KPNLF), tetapi juga dari negara-negara asing, misalnya RRC; (5) pihak Khmer Merah dan Son Sann telah memveto untuk membatalkan rencananya berkunjung ke Vietnam pertengahan bulan Desember 1991 ini, namun ia tetap akan pergi ke Vietnam pada awal tahun 1992; (6) sekretariat SNC akan mulai bekerja di Kamboja, dan beberapa pejabat misi pendahuluan dari PBB di Kamboja akan diempatkan pada sekretariat ini. Dengan demikian keamanan Khmer Merah akan terjamin; (7) AS tidak mempunyai peranan untuk menentukan nasib Khmer Merah, dan ia mengimbau kepada AS untuk tidak mencampuri urusan Kamboja; (8) SNC tidak dapat menjadi satelit atau budak dari Konggres AS (*Kompas*, 6-12-1991).

Keempat faksi Kamboja menyetujui langkah-langkah keamanan baru yang memungkinkan para pemimpin Khmer Merah kembali ke Phnom Penh untuk melanjutkan penerapan perjanjian perdamaian Kamboja, yang terganggu akibat serangan massa terhadap para pemimpin Khmer Merah pada tanggal 27 November 1991 (*Antara*, 4-12-1991).

Para Penulis

- **Erman Aminullah.**

Memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1981); Master of Science mengenai Kebijaksanaan Teknologi dari Graduate School of Policy Science, Saitama University, Japan (1989). Kini bekerja sebagai peneliti pada Pusat Analisa Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Papittek-LIPI), Jakarta.

- **Suhadi Mangkusuwondo.**

Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1957); Post graduate course, MIT Cambridge, Amerika Serikat (1959); Gelar Ph.D. dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat (1967). Jabatan sekarang Guru Besar Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UI; jabatan sebelumnya antara lain, Direktur Jenderal Penelitian dan Pengembangan Departemen Perdagangan (1973-1975) dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

- **Anwar Nasution.**

Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1968); Master in Public Administration dari the Kennedy School of Government, Harvard University (1973) dan Ph.D. in Economics dari Tufts University (1982). Kini ia menjabat sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- **Hadi Soesastro.**

Sarjana di bidang Teknik Pesawat Terbang (Dipl. Ing.), Rhenish Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, Jerman Barat, 1971 dan pada 1978 memperoleh Ph.D. dari The Rand Graduate Institute for Policy Studies, Santa Monica, Amerika Serikat; kini anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif CSIS; Anggota Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia (1981 sampai sekarang), Dosen FISIP dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- **J. Supranto.**

Menyelesaikan studi pada Akademi Ilmu Statistik (1961), dan memperoleh gelar MA dalam bidang statistik pada University of North Carolina, USA (1963). Kini sebagai Lektor Kepala Universitas Atmajaya, Jakarta dan Staf Ahli Badan Pusat Statistik (BPS).

- **Bob Widyahartono.**

Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1961). Kini ia sebagai konsultan manajemen, marketing dan Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan Universitas Tarumanagara.

Catatan:

tempel
perangko
di sini

Kepada:

Biro Pemasaran

Centre for Strategic and
International Studies

Jl. Tanah Abang III/23-27
Jakarta 10160
Telepon: 3865532 s/d 35

itu dikehendakinya. Surat menyurat yang berhubungan dengan hal tersebut harap ditujukan ke Redaksi ANALISIS CSIS.

Langganan

Harga pengganti ongkos cetak Rp 3.000,00 per eksemplar; langganan setahun (6 nomor, sudah termasuk ongkos kirim biasa) Rp 15.000,00. Surat menyurat yang berhubungan dengan langganan ditujukan ke Biro Pemasaran, CSIS.

Alamat

Jl. Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160, Telepon 3865532, 3865533, 3865534, 3865535